

#Ber
AKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMRINTAH DAERAH KABUPAYEN TEGAL TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tegal Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan strategi Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tegal.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tegal Tahun 2024. Hasil dari Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini diharapkan mudah untuk diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak terkait, berfokus kepada sejauh mana kinerja organisasi memberi manfaat kepada masyarakat dan mampu mengidentifikasi serta menyajikan pilihan penyelesaian untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan di masa datang.

Tegal, 24 Maret 2025

The official seal of Kabupaten Tegal, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'BUPATI TEGAL' and 'TEGAL'.
BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN, SH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB . I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.1.1 Penjelasan Umum	
A. Undang – Undang Pembentukan Daerah.....	1
B. Data Geografis Wilayah	2
C. Jumlah Penduduk	6
D. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tegal	6
E. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	7
F. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah.....	11
G. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	13
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	15
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	15
B. Visi dan Misi Kepala Daerah	22
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	31
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	32
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	34
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	42
2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO	42
2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	46
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	46
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	51
2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	52
A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	52
B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	54



C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	57
D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah ...	59
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	60
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	96
3.1 DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN....	96
3.2 GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	96
3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	98
3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Kabupaten Tegal	98
3.3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Kabupaten Tegal	98
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .	99
4.1. URUSAN PENDIDIKAN.....	99
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	99
4.1.2 Target Capaian SPM	100
4.1.3 Realisasi SPM	102
4.1.4 Alokasi Anggaran SPM.....	105
4.1.5 Dukungan Personil	105
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	106
4.2. URUSAN KESEHATAN.....	107
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	107
4.2.2 Target Capaian SPM	109
4.2.3 Realisasi SPM	112
4.2.4 Alokasi Anggaran SPM	125
4.2.5 Dukungan Personil	125
4.2.6 Permasalahan dan Solusi.....	126
4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM	128
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	128
4.3.2 Target Capaian SPM	129
4.3.3 Realisasi SPM	130
4.3.4 Alokasi Anggaran SPM	132
4.3.5 Dukungan Personil	132
4.3.6 Permasalahan dan Solusi.....	132
4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	133
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar	133
4.4.2 Target Capaian SPM	134
4.4.3 Realisasi SPM	135



4.4.4	Alokasi Anggaran SPM	137
4.4.5	Dukungan Personil	137
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	137
4.5.	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	138
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	138
4.5.2	Target Capaian SPM	139
4.5.3	Realisasi SPM	141
4.5.4	Alokasi Anggaran SPM	147
4.5.5	Dukungan Personil	147
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	148
4.6.	URUSAN SOSIAL	150
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	150
4.6.2	Target Capaian SPM	151
4.6.3	Realisasi SPM	152
4.6.4	Alokasi Anggaran SPM	160
4.6.5	Dukungan Personil	160
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	161
4.7.	PROGRAM DAN KEGIATAN	162
BAB V	PENUTUP	206



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

A. Undang – Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum pembentukan Kabupaten Tegal sebagai salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal; dan
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Sejarah Kabupaten Tegal dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu Aspek Historis dan Aspek Yuridis Formal. Secara Historis, Kabupaten Tegal diakui sebagai bagian dari *Babad Tanah Jawa* dimulai dari diangkatnya Ki Gede Sebayu menjadi Juru Demung (setaraf dengan Tumenggung) di Kadipaten Tegal pada Hari Rabu Kliwon tanggal 18 Mei 1601 Masehi atau tanggal 12 Robiul Awal Tahun 1010 Hijriyah atau 1523 Caka. Kabupaten Tegal bila ditinjau aspek yuridis, didasarkan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Tegal mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sehingga dipandang perlu untuk memindahkan Pusat Ibu kota dari Kota Tegal ke Kota Slawi. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun



1984 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ke Kota Slawi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, maka Ibukota Kabupaten Tegal yang sebelumnya di Kota Tegal pindah ke Kota Slawi. Perpindahan ibukota Kabupaten Tegal dari Kota Tegal ke Kota Slawi dilakukan sejak tahun 1981 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal No. 15 Tahun 1981 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ke Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Pemindahan Ibukota Kabupaten Tegal dari Kota Tegal ke Kota Slawi dimaksudkan untuk peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan Kabupaten Tegal. Disamping itu guna pengembangan wilayah, baik sebagai pusat pertumbuhan secara umum, pengembangan wilayah dan perubahan ruang yang lebih menyebar dan meluas sebagai dampak Pembangunan bidang Pemerintahan, Perekonomian maupun Kemasyarakatan.

B. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Tegal terletak antara 1080 57' 6" – 1090 21' 30" Bujur Timur dan 60 50' 41" - 70 15' 30" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 983,9 km².

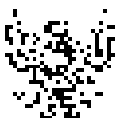
Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Tegal memiliki batas batas: Utara – Kota Tegal dan Laut Jawa; Selatan – Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas; Barat – Kabupaten Brebes; Timur – Kabupaten Pemasang.

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di Kota Slawi, lokasi strategis pengembangan pembangunan poros Jakarta – Semarang dan poros ke selatan Purwokerto / Cilacap. Wilayah Kabupaten Tegal meliputi pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayah berbatasan dengan laut Jawa (pantura).

Kabupaten Tegal terdiri dari 18 wilayah kecamatan dengan yang terdiri dari 281 Desa dan 6 Kelurahan.

Kabupaten Tegal berbatasan dengan:

- Sebelah utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Pemasang
- Sebelah selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah barat : Kabupaten Brebes



Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km)
1.	Margasari	Margasari	100,8
2.	Bumijawa	Bumijawa	109,2
3.	Bojong	Bojong	67,7
4.	Balapulang	Balapulang	86,2
5.	Pagerbarang	Pagerbarang	45,8
6.	Lebaksiu	Lebaksiu Lor	47,0
7.	Jatinegara	Jatinegara	109,5
8.	Kedungbanteng	Kedungbanteng	82,7
9.	Pangkah	Pangkah	37,6
10.	Slawi	Slawi Wetan	13,8
11.	Dukuhwaru	Dukuhwaru	26,3
12.	Adiwerna	Adiwerna	27,0
13.	Dukuhturi	Dukuhturi	17,1
14.	Talang	Talang	18,9
15.	Tarub	Mindaka	28,0
16.	Kramat	Kramat	43,9
17.	Suradadi	Suradadi	58,8
18.	Warureja	Warureja	63,6
Jumlah			983,9

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka, 2025

Kabupaten Tegal mempunyai letak yang sangat strategis, dilintasi oleh beberapa Jalur utama, sebagai berikut :

- Jalan Tol Pejagan – Pemalang
- Jalan Arteri Pantura Semarang – Tegal – Cirebon di sebelah utara
- Jalan Arteri Primer Tegal – Cilacap
- Jalan Arteri Sekunder Ketanggungan – Prupuk
- Jalur Kereta Api Jakarta – Semarang – Surabaya
- Jalur Kereta Api Jakarta – Cirebon – Yogyakarta
- Jalur Kereta Api Tegal –Slawi – Purwokerto – Yogyakarta – Solo – Semarang

Kabupaten Tegal secara Topografis terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu:

- Daerah Pantai meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja.
- Daerah Dataran Rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.



- Daerah Dataran Tinggi meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulangi, Bumijawa, Bojong dan sebagian Pangkah, Kedungbanteng.

Peta Topografi Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

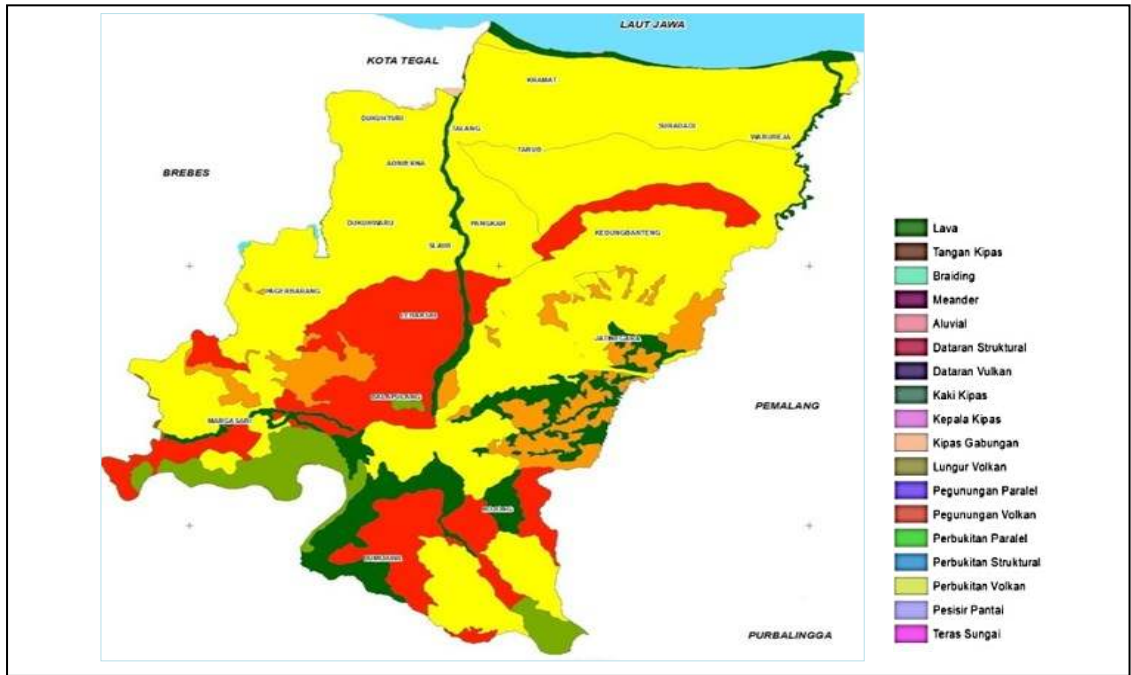
Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan air laut, Kabupaten Tegal untuk ketinggian permukaan laut dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :

- Wilayah Kramat sekitarnya : 11 Meter
- Wilayah Slawi sekitarnya : 42 Meter
- Wilayah Lebaksiu sekitarnya : 135 Meter
- Wilayah Bumijawa sekitarnya : 949 Meter

Kondisi Berdasarkan analisis data GIS oleh BPDAS Pemali Jratun di Kabupaten Tegal terdapat lima jenis tanah utama yaitu tanah Aluvial, Grumosol, Latosol, Litosol, Podzolik, dan Regosol, serta asosiasinya. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tegal antara lain adalah Alluvial (34,93%), Regosol (24%), Latosol (23,69%), Grumosol (9,42%), Andosol (4,29%) dan jenis lain-lain (3,67%). Tanah Aluvial merupakan jenis terluas yang ada di Kabupaten Tegal yaitu seluas 30.698 hektar yang merupakan tanah potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti padi, palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan dan lain-lain.



Peta Jenis Tanah Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

Kabupaten Tegal berada di kawasan pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Tegal memiliki garis pantai sepanjang 30 km, dengan luas daratan seluas 87.878 Ha, wilayah daratan Kabupaten Tegal memiliki kemiringan dan bentang alam yang bervariasi. Diantaranya berupa wilayah hutan, persawahan, dan ladang yang cukup luas. Begitu pula dari segi topografi, Kabupaten Tegal memiliki tiga kategori daerah yakni daerah pantai di wilayah utara, menerus ke selatan merupakan daerah dataran rendah, hingga daerah dataran tinggi di wilayah kaki Gunung Slamet.

Kabupaten Tegal secara kewilayahan dikelilingi dan dibelah oleh 2 Sungai Besar yaitu Sungai Gung dan Kumisik. Selain itu Kabupaten Tegal juga mempunyai Waduk Cacaban yang mempunyai fungsi water storage di wilayah bagian timur. Secara detail keberadaan dan pembagian DAS dan Sub DAS di wilayah Kabupaten Tegal ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Daerah Aliran Sungai (DAS)

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Kecamatan
1	Cacaban	14.599	Jatinegara, Kedungbanteng, Lebaksiu, Pangkah, talang, Tarub
2	Cenang	3.608	Suradadi
3	Gangsa	11.291	Adiwerna, Dukuhturi, Dukuhwaru, Lebaksiu, Slawi, Talang
4	Gung	17.229	Adiwerna, Balapulung, Bojong, Bumijawa, Slawi, Dukuhturi, Jatinegara, Lebaksiu, Pangkah, Talang
5	Rambut	13.078	Bojong, Jatinegara, Kedungbanteng, Warureja



No	Nama DAS	Luas (Ha)	Kecamatan
6	Semedo	3.064	Suradadi, Warureja
7	Pah	7.909	Kedungbanteng, Kramat, Suradadi, Tarub
8	Pemali	11.079	Balapulang, Bumijawa, Margasari, Pagerbarang
9	Kumisik	12.788	Balapulang, Bumijawa
10	Glagah	2.959	Bumijawa
	Jumlah	97.604	

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

C. Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan data yang ada pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal jumlah penduduk Kabupaten Tegal Tahun 2024 adalah sebanyak 1.761.471 jiwa. Angka jumlah penduduk dan angka kepadatan penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Struktur penduduk Kabupaten Tegal sebagai berikut :

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN TEGAL TIAP KECAMATAN

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	MARGASARI	61.564	59.615	121.179
2	BUMIJAWA	56.470	53.341	109.811
3	BOJONG	43.139	40.852	83.991
4	BALAPULANG	52.833	50.838	103.671
5	PAGERBARANG	34.260	33.648	67.908
6	LEBAKSIU	52.577	51.820	104.397
7	JATINEGARA	34.813	33.221	68.034
8	KEDUNGBANTENG	24.891	24.356	49.247
9	PANGKAH	62.891	60.928	123.819
10	SLAWI	42.135	41.969	84.104
11	ADIWERNA	73.080	69.596	142.676
12	TALANG	57.863	54.921	112.784
13	DUKUHTURI	54.101	51.526	105.627
14	TARUB	47.843	46.305	94.148
15	KRAMAT	62.095	60.933	123.028
16	SURADADI	51.931	50.172	102.103
17	WARUREJA	38.011	36.378	74.389
18	DUKUHWARU	37.548	36.814	74.362
	JUMLAH	873.426	888.045	1.761.471

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

D. Jumlah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup Propinsi



Djawa Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. 5 kelurahan berada di Kecamatan Slawi yaitu Kelurahan Slawi Wetan, Kelurahan Kudaile, Kelurahan Procot, Kelurahan Pakembaran, Kelurahan Kagok serta Kelurahan Dampyak di Kecamatan Kramat.

Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Luas (Km ²)
1	Margasari	13	100,8
2	Bumijawa	18	109,2
3	Bojong	17	67,7
4	Balapulang	20	86,2
5	Pagerbarang	13	45,8
6	Lebaksiu	15	47,0
7	Jatinegara	17	109,5
8	Kedungbanteng	10	82,7
9	Pangkah	23	37,6
10	Slawi	10	13,8
11	Dukuhwaru	10	26,3
12	Adiwerna	21	27,0
13	Dukuhturi	18	17,1
14	Talang	19	18,9
15	Tarub	20	28,0
16	Kramat	20	43,9
17	Suradadi	11	58,8
18	Warureja	12	63,6
Jumlah		287	983,9

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka 2025

E. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

- **Perangkat Daerah**

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Dinas Sosial;
 7. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 9. Dinas Lingkungan Hidup;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 12. Dinas Perhubungan;
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 18. Dinas Perikanan; dan
 19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
- e. Badan, terdiri atas:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pendapatan Daerah;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Kecamatan, terdiri dari :
 1. Kecamatan Margasari;
 2. Kecamatan Bumijawa;
 3. Kecamatan Bojong ;



4. Kecamatan Balapulang ;
5. Kecamatan Pagerbarang ;
6. Kecamatan Lebaksiu ;
7. Kecamatan Jatinegara ;
8. Kecamatan Kedungbanteng ;
9. Kecamatan Pangkah ;
10. Kecamatan Slawi ;
11. Kecamatan Dukuhwaru ;
12. Kecamatan Adiwerna ;
13. Kecamatan Dukuhturi ;
14. Kecamatan Talang ;
15. Kecamatan Tarub ;
16. Kecamatan Kramat ;
17. Kecamatan Suradadi ; dan
18. Kecamatan Warureja.

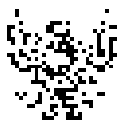
Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal:

1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo; dan
2. Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi.

• **UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH**

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah di Kabupaten Tegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, terdiri dari :

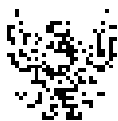
1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan terdiri dari UPTD Satuan Pendidikan yaitu:
 - b. SPF Taman Kanak-Kanak Bupati Tegal;
 - c. SPF Sekolah Dasar;
 - d. SPF Sekolah Menengah Pertama;
 - e. SPNF Sanggar Kegiatan.
2. Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. UPTD Instalasi Farmasi Kelas A 2



- b. UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A 3
 - c. UPTD Wisata Kesehatan Jamu Kelas B 4
 - d. UPTD Puskesmas
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, memiliki UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Penataan Bangunan Wilayah I - Vi Tipe A
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, terdiri dari :
 - a. UPTD Perumahan dan Permukiman Wilayah I - III Tipe A
 - b. UPTD Pemakaman Tipe B
 5. Dinas Sosial memiliki UPTD Loka Bina Karya Kelas A
 6. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Latihan Kerja Kelas A
 - b. UPTD Lingk. Industri Kecil Kelas A
 - c. UPTD Lab. Perindustrian Kelas A
 7. Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A
 - b. UPTD Pemrosesan Akhir Sampah Dan Limbah Kelas B
 8. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. UPTD Pengelolaan Obyek Wisata Kelas A
 - b. UPTD Pengelolaan Kawasan GOR Kelas B
 9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri dari :
 - a. UPTD Perlindungan Tanaman Kelas A
 - b. UPTD Pembibitan Dan Teknologi Pertanian
 - c. UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A
 10. Dinas Perikanan, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Benih Ikan Kelas A
 - b. UPTD Tempat Pelelangan Ikan Kelas B
 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, terdiri dari:
 - a. UPTD Metrologi Legal Kelas A
 - b. UPTD Pasar Wilayah I-V Kelas A

- **Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal

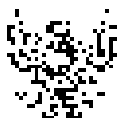


3. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat
8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal

F. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan tujuannya yang ingin dicapai haruslah mempunyai dan memiliki sumber daya manusia yang mampu mengemban tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Berhasil atau tidaknya suatu bidang usaha tidak terlepas dari peran serta karyawan atau pegawai tersebut mempunyai keterampilan dan keahlian yang cukup memadai maka tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi, apabila pegawai tersebut sesuai dengan keahliannya. Berikut rincian jumlah ASN Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.



Rincian Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tegal

No.	Nama Perangkat Daerah	Rincian ASN			Total
		Struktural	Fungsional (PNS dan PPPK)	Pelaksana	
1	Sekretariat Daerah Kab. Tegal	19	48	66	133
2	Sekretariat DPRD Kab. Tegal	9	2	20	31
3	Inspektorat	7	40	2	49
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	10	20	21	51
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	9	13	33
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	13	7	16	36
7	Badan Pendapatan Daerah	11	3	29	43
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	8	20	9	37
9	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4	21	8	33
10	Dinas Perikanan	7	4	13	24
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6	11	48	65
12	Dinas Kesehatan	13	1.193	94	1.300
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6	19	9	34
14	Dinas Lingkungan Hidup	9	6	48	63
15	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	8	4	32	44
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	14	30	109	153
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8	3	17	28
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8	7	13	28
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	10	11	24
20	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	12	6.511	296	6.819
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	13	9	70	92
22	Dinas Perhubungan	10	8	28	46
23	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	9	26	21	56
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	11	113	13	137
25	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	8	10	31	49
26	Dinas Sosial	9	9	10	28
27	Satuan Polisi Pamong Praja	11	47	17	75
28	RSUD Dr. Soeselo Slawi	10	335	71	416
29	RSUD Suradadi	10	133	7	150
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	2	5	12
31	Kecamatan Adiwerna	8	-	8	16
32	Kecamatan Balapulang	5	-	9	14
33	Kecamatan Bojong	8	-	9	17
34	Kecamatan Bumijawa	8	-	11	19



No.	Nama Perangkat Daerah	Rincian ASN			Total
		Struktural	Fungsional (PNS dan PPPK)	Pelaksana	
35	Kecamatan Dukuhturi	7	-	10	17
36	Kecamatan Dukuwaru	7	-	7	14
37	Kecamatan Jatinegara	7	-	6	13
38	Kecamatan Kedungbanteng	7	1	9	17
39	Kecamatan Kramat	9	1	13	23
40	Kecamatan Lebaksiu	8	-	8	16
41	Kecamatan Margasari	8	-	12	20
42	Kecamatan Pagerbarang	6	-	6	12
43	Kecamatan Pangkah	7	-	8	15
44	Kecamatan Slawi	30	-	16	46
45	Kecamatan Suradadi	5	1	6	12
46	Kecamatan Talang	7	1	8	16
47	Kecamatan Tarub	5	1	10	16
48	Kecamatan Warureja	8	1	10	19
JUMLAH		432	8.666	1.313	10.411

Sumber: BKPSDM Kab. Tegal

G. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} * 100$	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.983.553.621.391,00	2.992.634.879.765,47	100,30	2.812.588.545.848,80
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	560.723.789.011,00	601.769.824.459,47	107,32	553.338.257.851,80
4.1.01	Pajak Daerah	222.948.270.000,00	208.049.338.295,00	93,32	193.217.970.934,00
4.1.02	Retribusi Daerah	310.318.349.000,00	355.466.664.052,47	114,55	31.469.473.639,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.171.104.000,00	19.597.159.894,00	102,22	16.927.282.193,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.286.066.011,00	18.656.662.218,00	225,16	311.723.531.085,80
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	560.723.789.011,00	601.769.824.459,47	107,32	553.338.257.851,80
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.419.758.184.380,00	2.387.793.407.306,00	98,68	2.249.792.292.997,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.821.342.856.380,00	1.809.126.435.120,00	99,33	1.704.041.733.426,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	32.546.001.000,00	38.009.124.000,00	116,79	39.038.115.356,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.202.998.957.000,00	1.202.998.957.000,00	100,00	1.146.028.561.807,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	83.337.670.000,00	79.999.415.685,00	95,99	74.468.758.496,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	502.460.228.380,00	488.118.938.435,00	97,15	444.506.297.767,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.821.342.856.380,00	1.809.126.435.120,00	99,33	1.704.041.733.426,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	5.841.384.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	316.239.825.000,00	316.239.825.000,00	100,00	307.953.560.600,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	12.930.103.000,00	12.930.103.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	329.169.928.000,00	329.169.928.000,00	100,00	313.794.944.600,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	269.245.400.000,00	249.497.044.186,00	92,67	231.955.614.971,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	244.373.746.000,00	226.314.945.686,00	92,61	221.534.261.871,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	24.871.654.000,00	23.182.098.500,00	93,21	10.421.353.100,00



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	269.245.400.000,00	249.497.044.186,00	92,67	231.955.614.971,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	2.419.758.184.380,00	2.387.793.407.306,00	98,68	2.249.792.292.997,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.071.648.000,00	3.071.648.000,00	100,00	9.457.995.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.071.648.000,00	3.071.648.000,00	100,00	9.457.995.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.071.648.000,00	3.071.648.000,00	100,00	9.457.995.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.983.553.621.391,00	2.992.634.879.765,47	100,30	2.812.588.545.848,80
5	BELANJA DAERAH	3.249.885.597.425,00	3.091.455.662.213,80	95,12	2.845.915.030.703,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.359.105.315.382,00	2.228.355.987.328,80	94,46	1.987.002.149.754,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.239.404.187.996,00	1.165.882.185.148,00	94,07	1.024.291.899.517,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	957.704.198.386,00	902.821.341.346,80	94,27	858.043.557.237,00
5.1.05	Belanja Hibah	132.713.529.000,00	130.417.060.834,00	98,27	103.035.193.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	29.283.400.000,00	29.235.400.000,00	99,84	1.631.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.359.105.315.382,00	2.228.355.987.328,80	94,46	1.987.002.149.754,00
5.2	BELANJA MODAL	385.821.457.043,00	364.313.085.185,00	94,43	358.320.634.457,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	450.000.000,00	0,00	0,00	306.453.280,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.789.356.286,00	93.915.643.627,00	96,04	103.615.390.435,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	132.540.131.050,00	117.653.488.778,00	88,77	112.049.441.261,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	133.941.133.700,00	131.886.142.737,00	98,47	126.934.229.338,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.089.936.007,00	20.849.910.043,00	98,86	15.279.075.343,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.900.000,00	7.900.000,00	72,48	136.044.800,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	385.821.457.043,00	364.313.085.185,00	94,43	358.320.634.457,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	1.706.027.596,00	34,12	433.019.605,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	1.706.027.596,00	34,12	433.019.605,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	5.000.000.000,00	1.706.027.596,00	34,12	433.019.605,00
5.4	BELANJA TRANSFER	499.958.825.000,00	497.080.562.104,00	99,42	500.159.226.887,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	21.567.596.082,00	20.960.911.579,00	97,19	14.498.312.559,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.950.403.918,00	2.628.825.525,00	66,55	3.688.897.728,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	474.440.825.000,00	473.490.825.000,00	99,80	481.972.016.600,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	499.958.825.000,00	497.080.562.104,00	99,42	500.159.226.887,00
	JUMLAH BELANJA	3.249.885.597.425,00	3.091.455.662.213,80	95,12	2.845.915.030.703,00
	SURPLUS/DEFISIT	(266.331.976.034,00)	(98.820.782.448,33)	37,09	(33.326.484.854,20)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	266.331.976.034,00	266.541.022.597,96	100,08	269.458.460.889,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	272.431.976.034,00	272.541.022.597,96	100,04	307.458.460.889,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	236.131.976.034,00	236.131.976.034,96	100,00	281.204.116.830,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	33.800.000.000,00	33.800.000.000,00	100,00	26.200.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00	2.609.046.563,00	104,36	54.344.059,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	272.431.976.034,00	272.541.022.597,96	100,04	307.458.460.889,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.100.000.000,00	6.000.000.000,00	98,36	38.000.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.100.000.000,00	5.000.000.000,00	98,04	7.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.100.000.000,00	6.000.000.000,00	98,36	38.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	266.331.976.034,00	266.541.022.597,96	100,08	269.458.460.889,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	167.720.240.149,63	0,00	236.131.976.034,80

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2025 (unaudited)

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Prioritas fokus pembangunan daerah dan prioritas program pembangunan daerah juga disusun mendasari Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah dan isu-isu strategis yang diformulasikan sebagai kondisi yang perlu dihadapi tahun 2024 di Kabupaten Tegal. Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi maka permasalahan strategis pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2024 dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tegal. Dengan isu strategis tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Tegal bertekad untuk mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja menuju birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang jauh dari perilaku koruptif, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, birokrasi yang transparan dan birokrasi yang melayani.

Ada beberapa tantangan terkait pemerintahan di era new normal antara lain:

- Dalam pola pikir yang baru, semua pegawai harus mulai mengembangkan kecakapan berpikir lateral dan keberanian membuat eksperimen dengan tolok ukur risiko dan manfaat yang jelas;
- Mendorong *mindset* lama ke *mindset* baru bagi ASN;
- Mendukung kesiapan ASN dalam membangun budaya berteknologi; dan
- Dalam keadaan dimana kondisi moneter dunia saat ini sedang berada dalam ancaman resesi, maka perlu dilakukan sejumlah langkah pengamanan, khususnya terhadap neraca anggaran pemerintah



daerah. Secara teknis, hal tersebut dapat berupa pembatasan kegiatan yang berbiaya besar, pengurangan pos-pos yang semula bersifat melibatkan pengumpulan massa, dan sebagainya;

- Mendorong semangat kepemimpinan yang berbudaya.

Secara keseluruhan masih banyak permasalahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Tegal. Setidaknya terdapat delapan aspek yang perlu dibenahi yaitu aspek manajemen perubahan; aspek peraturan perundang-undangan; aspek kelembagaan; aspek ketatalaksanaan; aspek sumber daya aparatur; aspek pengawasan; aspek akuntabilitas kinerja dan aspek pelayanan publik.

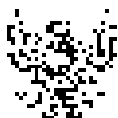
b. Pelayanan Infrastruktur Dasar

Berbagai aktivitas sosial-ekonomi dapat berjalan lancar jika didukung oleh infrastruktur yang memadai khususnya infrastruktur transportasi, air bersih, persampahan, sanitasi dan energi. Kondisi saat ini, infrastruktur jalan yang memadai jumlahnya masih sangat terbatas atau baru mencapai sekitar 68,01 % dari total 958,32 km. Oleh karena itu Pemerintah Desa dengan segala sumber dayanya harus mampu mengambil peran dalam upaya peningkatan kualitas jalan tersebut sesuai kewenangannya. Selain itu terdapat Kegiatan Strategis Nasional yang berlokasi di Kabupaten Tegal antara lain pembangunan infrastruktur jalan tol trans Jawa, program pengembangan wilayah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang.

Dalam perspektif infrastruktur yang lebih luas, Kabupaten Tegal mempunyai tantangan yang cukup berat dalam hal penataan kota. Hingga kini, perkembangan perkotaan Kabupaten Tegal cenderung sporadis (*leap frog*) dan belum mempunyai bentuk yang jelas. Bisa dikatakan belum memiliki ikon perkotaan layaknya kota-kota yang terdesain dengan jelas. Untuk itu penataan kota menjadi isu yang cukup strategis kedepan, minimal Kabupaten Tegal memiliki ikon perkotaan melalui penataan wajah Kota Slawi.

c. Pelayanan Kesehatan Lingkungan Hidup

Sebagai wilayah yang didominasi perekonomian berada pada sektor industri pengolahan dan pertanian, potensi ancaman degradasi lingkungan hidup di Kabupaten Tegal sudah mulai nyata. Limbah industri yang toksik yang

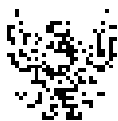


tidak tertangani dapat memperburuk kondisi lingkungan sekitar atau bisa menimbulkan kerusakan pada ekosistem lingkungan yang lain bahkan menimbulkan penyakit pada makhluk hidup yang terpapar.

Selain pencemaran air, isu penurunan kesehatan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal juga dipengaruhi oleh pencemaran udara yang cukup masif. Aktivitas pencemaran udara yang hingga saat ini belum terselesaikan adalah turunnya kualitas udara akibat pengolahan batu gamping atau kapur di Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari. Aktivitas pembakaran dan debu ukuran mikro dalam pengolahan batu gamping banyak beterbangan di udara yang dapat menyebabkan penyakit ISPA.

Pengelolaan sampah dan sanitasi juga masih menjadi permasalahan yang harus ditangani. Penanganan sampah meliputi penanganan persampahan rumah tangga baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pelayanan persampahan di perkotaan hanya mampu melayani untuk kawasan komersial, perkantoran, perumahan, taman dan jalan. Sedangkan di wilayah perdesaan 100% masih dikelola mandiri oleh masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah antara lain: manajemen pengelolaan sampah yang belum baik dari hulu ke hilir (*waste management*), keterbatasan alat angkut, keterbatasan alat pengolahan / pemrosesan sampah pada TPA, serta terbatasnya lahan TPA Penujah. Sedangkan dalam penanganan limbah tinja, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah *idle capacity* IPLT Penujah sudah mencapai 0%, perlu dilakukan upaya revitalisasi IPLT Penujah. Cakupan layanan sanitasi saat ini untuk on site system sebesar 65% dari total penduduk Kabupaten Tegal, yaitu terdiri atas sistem *on site individual* (tangki septik) mencakup 63,85% dan sistem on site komunal (MCK, MCK++) mencakup 1,15%. Sedangkan cakupan layanan *off site system* di Kabupaten Tegal saat ini belum ada. Untuk itu sanitasi juga masih menjadi tantangan dalam penataan perkotaan. Sanitasi secara umum juga berkaitan dengan permukiman kumuh. Cakupan pelayanan permukiman kumuh masih sangat rendah. Untuk itu upaya penyediaan lingkungan sehat bagi masyarakat khususnya perkotaan perlu difokuskan pada penyediaan RTLH dan sanitasi sehat terutama jamban.

Dari beberapa masalah kesehatan lingkungan di atas, jika tidak ditangani dan diantisipasi kedepan, maka skala kerusakan lingkungan dan dampak yang ditimbulkannya akan semakin luas. Oleh karena itu tantangan pembangunan kedepan adalah bagaimana meningkatkan pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan kesehatan lingkungan hidup.



d. Pemulihan Ekonomi Lokal Pariwisata, Industri Kreatif, dan Ketahanan Pangan

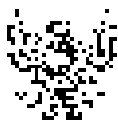
Sektor unggulan Kabupaten Tegal terdiri atas sektor industri pengolahan, pertanian (pertanian, kehutanan dan perikanan) dan perdagangan (perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor). Industri pengolahan, Kabupaten Tegal cukup terkenal dengan industri pengolahan logam dan pengolahan makan/minuman. Dalam kondisi covid-19 saat ini banyak sektor industri pengolahan yang gulung tikar akibat tidak mampu beradaptasi. Ini bisa menjadi ancaman sekaligus peluang bagi pelaku industri pengolahan di Kabupaten Tegal. Kondisi saat ini memang sebagian besar permintaan produk industri manufaktur mengalami penurunan yang tajam.

Di sektor pertanian, transformasi pertanian modern ramah lingkungan bisa menjadi opsi yang tepat. Dalam masa pandemi covid-19, permintaan produk pertanian khususnya pangan naik signifikan baik lingkup nasional bahkan global. Melalui modernisasi pertanian yang fokus pada produk kebutuhan pasar, diharapkan produk pertanian Kabupaten Tegal mampu mengambil bagian dalam pemenuhan permintaan produk pangan.

Di sektor perdagangan, digitalisasi perdagangan di seluruh skala bisnis harus mulai diaplikasikan. Saat ini transaksi tatap-muka di semua lini perdagangan mulai bergeser ke sistem online. Selain dapat meningkatkan manfaat ekonomi lainnya khususnya jasa kurir, sistem online juga dapat meluaskan pasar tidak hanya skala lokal bahkan menjangkau pasar internasional. Oleh karena itu pelaku usaha perdagangan harus mampu menguasai dan menjalankan mekanisme sistem online tersebut.

Selain ketiga sektor tersebut, potensi lokal yang diprediksi mampu mengangkat perekonomian masyarakat ialah sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata saat ini mempunyai tantangan yang cukup berat. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh dampak covid-19 yang hingga saat ini belum berakhir. Beberapa tantangan yang cukup strategis dalam pengembangan pariwisata antara lain:

- Kabupaten Tegal memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keberagaman budaya yang dapat dijadikan sebagai wahana kepariwisataan. Oleh karena itu tantangannya ialah bagaimana membangun pariwisata yang terintegrasi atau kolaboratif dengan sektor lainnya khususnya terkait pelestarian budaya lokal untuk menjadi atraksi baru.
- Kabupaten Tegal yang berlokasi pada simpul persinggahan mobilitas antar daerah yang ditunjang akses jalan tol trans Jawa dan dengan



kondisi topografi yang heterogen, serta memiliki karakteristik budaya lokal yang unik, tentunya memiliki banyak potensi wisata yang layak dikembangkan. Dampak positif bagi pariwisata Kabupaten Tegal dengan terbukanya akses jalan tol ruas pantai utara Jawa, perlu diantisipasi dengan perbaikan infrastruktur menuju lokasi wisata;

- Dalam kondisi pandemi covid-19 seperti ini, mobilitas masyarakat sangat dibatasi, hal ini berpengaruh pada penurunan jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Selain itu meskipun destinasi-obyek wisata bisa dibuka, namun syarat-syarat protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat. Untuk itu tantangan agar pelaku usaha pariwisata dapat menerapkan protokol kesehatan sesuai standar menjadi suatu hal yang wajib diwujudkan.
- Untuk mengantisipasi geliat sektor pariwisata yang masih minim, maka pelaku usaha pariwisata perlu difasilitasi agar dapat melakukan diversifikasi usaha lain minimal sampai pandemi berakhir.

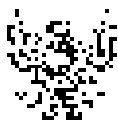
Selain dapat dikolaborasikan, budaya dan kearifan lokal juga dapat berfungsi sebagai benteng identitas lokal Kabupaten Tegal. Era globalisasi memungkinkan masuknya budaya luar secara bebas. Masuknya budaya luar tanpa adanya filter yang kuat, maka dapat merusak bahkan mengganti budaya atau kearifan lokal yang ada di Kabupaten Tegal. Untuk itu tantangan budaya kedepan ialah bagaimana menguatkan kearifan lokal agar dapat berfungsi untuk:

- Membentengi dari pengaruh dalam budaya luar yang tidak sesuai dengan adat ketimuran;
- Menyerap dan memfilter budaya asing;
- Memberikan arah pada pengembangan budaya.

e. Kualitas Sumber Daya Manusia

Isu Sumber daya manusia meliputi isu pendidikan, kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan kedepan. Isu kualitas Pendidikan masyarakat kedepan akan menjadi lebih berat ketimbang sebelumnya. Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,15 poin, dari 68,24 poin pada 2019 menjadi 68,39 poin pada 2020. Namun demikian terjadi penurunan pertumbuhan secara signifikan dari 0,91 menjadi 0,14 pada 2020.

Dalam kondisi Kabupaten Tegal mulai menata pengelolaan Pendidikan yang lebih berkualitas, seketika terganggu akibat wabah covid-19. Ekosistem pendidikan agar tidak lagi bergantung pada sekolah



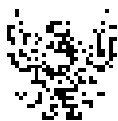
(Pendidikan Era 4.0). Selain sistem, kualitas tenaga pengajar dalam mengimplementasikan Pendidikan Era 4.0 harus ditingkatkan. Tantangan lainnya yang timbul yaitu terkait sarana prasarana yang memadai.

Isu kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Tegal masih sangat diwarnai efek pandemi covid-19 di Kabupaten Tegal. Berbagai permasalahan sektor kesehatan, memunculkan tantangan tersendiri dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Ada beberapa tantangan Kesehatan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Tegal antara lain:

- Adanya wabah ini mensyaratkan masyarakat untuk mampu menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian protokol kesehatan rutin di era kenormalan baru (*new normal*);
- Pemanfaatan teknologi dalam sektor kesehatan ke depan bisa menjadi suatu kebutuhan. Rasa cemas masyarakat untuk datang secara langsung ke fasilitas kesehatan, membuat pelayanan kesehatan membutuhkan teknologi yang bisa mendukung masyarakat agar dapat berkonsultasi dengan dokter secara virtual. Pemerintah Kabupaten Tegal harus mampu menyediakan layanan kesehatan online yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas layanan kesehatan;
- Belajar dari proses dan kondisi penanganan pandemi covid-19 secara umum, maka sistem kesehatan harus lebih dikuatkan. Kesiapan dan penanganan menghadapi pandemi lainnya harus lebih baik. Mengingat pandemi itu bisa terjadi kapan saja.

Sedangkan isu ketenagakerjaan adalah bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing tinggi. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait ketenagakerjaan pasca krisis antara lain:

- Tingkat penyerapan tenaga kerja di masa pasca krisis tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang telah di PHK, atau dengan kata lain supply tenaga kerja jauh melebihi demand tenaga kerja itu sendiri;
- Dengan keterbatasan sumber daya (ekonomi) perusahaan pasca krisis, maka memungkinkan perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas yang tinggi dan mampu mengerjakan hal lainnya (*multitasking*). Karena itu kualifikasi tenaga kerja akan semakin meningkat;
- Lapangan usaha yang berkembang di era pasca pandemi adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi dalam artian digitalisasi maupun mekanisasi. Sehingga peran manusia akan mulai berkurang porsinya dalam proses produksi hingga pemasaran. Oleh karena itu transformasi tenaga kerja diarahkan pada proses *entrepreneurship*.



f. Menekan Laju Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan dan isu multi dimensi dan krusial yang harus ditangani oleh berbagai kebijakan sektoral yang saling bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melalui Multi tiga strategi yakni, perlindungan sosial yang komprehensif; penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar; dan penyediaan mata pencarian yang layak serta berkelanjutan.

Permasalahan penanggulangan kemiskinan utamanya menyangkut akses kebutuhan dasar, kehidupan ekonomi berkelanjutan, perilaku dan budaya masyarakat, ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi, dan pengelolaan data kemiskinan Sumber.

g. Menekan Laju Pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah daerah yang saat ini masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan. Kemiskinan juga berkaitan erat dengan pengangguran yang keduanya saat ini menjadi satu entitas yang tidak bisa dipisahkan. Fenomena pengangguran di Kabupaten Tegal cukup unik dan perlu dikaji lebih mendalam. Idealnya penurunan angka kemiskinan berbanding lurus dengan penurunan angka pengangguran. Namun kenyataannya di Kabupaten Tegal disaat angka kemiskinan mengalami penurunan, angka pengangguran justru meningkat. Hal ini perlu diwaspadai dan mendapat perhatian khusus apalagi disaat kondisi pandemi covid-19 saat ini telah banyak merusak struktur ekonomi wilayah.

Tantangan isu pengangguran dalam era krisis lebih kepada bagaimana masyarakat dengan segala keterbatasan saat ini namun tetap mampu produktif secara ekonomi. Setidaknya dalam era krisis ini transformasi bentuk usaha digital harus menjadi *guideline* khusus. Digitalisasi ekonomi masyarakat mulai skala kecil hingga besar perlu difasilitasi. Hal ini didasarkan fakta bahwa adanya pandemi covid-19 di Kabupaten Tegal telah memunculkan ekonomi digital masyarakat di semua lini bahkan penjual sayur eceran telah masuk ke dalamnya. Kemunculan ekonomi digital ini mempunyai potensi pengembangan mulai dari hulu-hilirnya. Untuk itu perlu dimanage dan dikembangkan keterkaitan hulu hilirnya (*supply chain management*). Digitalisasi semua sektor usaha khususnya pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan harus dikembangkan.



B. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Tegal 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”

Arti Visi:

- Sejahtera** : Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.
- Mandiri** : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan memantapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri dan berkelanjutan.
- Unggul** : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.
- Berbudaya** : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai-nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal.
- Berakhlak Mulia** : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.



Misi

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia, dengan rincian sebagai berikut:

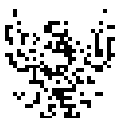
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.

Misi ini bermakna bagaimana agenda reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, akuntabel dan melayani, sampai dengan level pemerintahan desa. Upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik; modernisasi manajemen kepegawaian; restrukturisasi, *downsizing* dan *rightsizing*, perubahan manajemen dan organisasi; rekayasa proses administrasi pemerintahan; anggaran berbasis kinerja program dan proses perencanaan yang partisipatif. Tata kelola pemerintahan desa juga menjadi fokus perhatian untuk 5 (lima) tahun ke depan, dengan alokasi anggaran desa yang dari tahun ke tahun semakin tinggi, maka perlu terus dilakukan pengawalan kebijakan dalam implementasinya.

Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif melayani rakyat, maka penting adanya pemanfaatan Teknologi Informasi secara lebih optimal. Perwujudan *E-Government* sudah menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan berbasis TIK serta membuka akses informasi publik dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.

Misi ini bermakna terbangunnya infrastruktur yang andal dan berkualitas merupakan kunci utama untuk penguatan daya saing suatu daerah. Target pemerintah daerah dan tingginya ekspektasi masyarakat atas layanan infrastruktur yang andal dan berkualitas tentu harus direspons dengan sebaik-baiknya. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan terpadu dari berbagai sektor demi menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun,



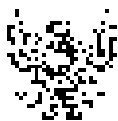
melainkan juga terintegrasi sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Untuk menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, pemerintah daerah harus melakukan peningkatan keterpaduan rencana dan program berbasis pendekatan wilayah. Pengembangan infrastruktur harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kapasitas daya dukung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis. Keterpaduan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan akan meningkatkan penyediaan air baku untuk semua kebutuhan, kinerja jaringan irigasi, kapasitas pengendalian daya rusak air, kemantapan jalan, konektivitas antar wilayah, kebutuhan hunian dengan prasarana dan sarana pendukung, penyediaan sanitasi layak (pengelolaan limbah dan sampah), serta penanganan *backlog* rumah hunian dan kualitas infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan.

3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Misi ini memiliki makna pembangunan ekonomi rakyat yang kokoh dan maju yaitu adanya hasil-hasil pembangunan yang tidak hanya tampak dari segi kuantitas melainkan juga secara kualitas yang dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi berkeadilan dapat didefinisikan sebagai suatu proses mendirikan atau membentuk dengan dilandasi nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional namun tetap memiliki keberpihakan terhadap pihak yang lemah. Dalam konsep ekonomi, artinya masyarakat mendapat kesempatan yang luas dan setara dalam memperoleh kesejahteraan kehidupan. Konsep pertumbuhan ekonomi berkeadilan di Kabupaten Tegal dikemas dalam *Triple track strategy*, yang terdiri dari *pro-growth* (pertumbuhan ekonomi); *pro-poor* (mengentaskan kemiskinan); dan *pro-job* (penciptaan lapangan kerja/ penurunan pengangguran). *Pro Growth Strategy* juga mencakup strategi pemberdayaan kelompok masyarakat yang memiliki usaha pada sektor-sektor pertanian, industri pengolahan dan pariwisata. *Pro-growth* selanjutnya diharap dapat mendorong program pengentasan kemiskinan atau *Pro-poor* dan penciptaan lapangan kerja atau *Pro-job*.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)* / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil World Summit 2005 menyebut ketiga hal dimensi



tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi, diharapkan tidak mengorbankan aspek-aspek sosial dan juga tidak menimbulkan degradasi lingkungan (*Environmental Gradient*). Penerapan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama pada sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi tinggi yaitu pertanian, perdagangan, pariwisata dan industri pengolahan harus memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan, program dan kegiatannya

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi ini memiliki makna peningkatan kualitas hidup manusia untuk membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia yang pintar, sehat, sejahtera dan berakhlak mulia melalui penyelenggaraan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang merata dan bermutu. Instrumen dasar dalam penguatan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial adalah dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah perangkat ampuh dalam meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial, serta harus dilaksanakan secara kolaboratif dengan lintas sektor. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pengurangan kemiskinan dan pengangguran menjadi tujuan utama dalam implementasi Misi keempat ini, dengan sasaran antara lain peningkatan derajat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat, pengendalian pertumbuhan penduduk, pemberdayaan dan pembangunan gender serta peningkatan kualitas pemuda dan olahraga.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain dengan pemanfaatan atas hasil pengkajian kelitbangan untuk dapat diterapkan dalam rangka mendukung program-program bidang pendidikan dan kesehatan. Pemanfaatan dan dukungan teknologi informasi juga menjadi faktor yang penting dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Untuk itu, pemanfaatan teknologi informasi pada upaya peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja / organisasi merupakan satu kesatuan kelabangan yang utuh dan saling berhubungan dalam proses kerjanya sebagai suatu sistem.

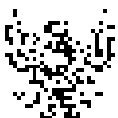


5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Misi ini memiliki makna untuk mewujudkan ketertiban umum dengan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat agar dapat tinggal di lingkungan yang aman, nyaman dan harmonis sehingga mampu menjalankan kehidupannya secara layak dan bermartabat. Dimensi sosial dalam kehidupan, meniscayakan penciptaan sebuah penataan sistem yang mewadahi dinamika kemasyarakatan. Ini dilakukan dengan terus memperkuat kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Aplikasinya bisa dilakukan secara berjenjang berdasarkan stratifikasi kehidupan sosial, budaya dan kearifan lokal.

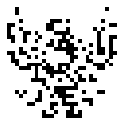
Upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan dialog dan kerja sama umat beragama dan antar umat beragama, penguatan kebinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga, peningkatan upaya penegakan perda, peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana, penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel, perlindungan dan pemanfaatan seni budaya dan peningkatan promosi seni budaya.

Untuk lebih rinci tentang penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya pada setiap misi dapat dilihat pada berikut.

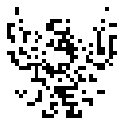


Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022-2024

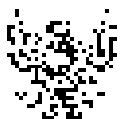
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020 REALISASI	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	
I	MISI I: Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat								
1	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	63,69	64,69	65,19	65,69	65,69
1.1		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen; Tahunan	78,21	82,15	84,83	86,2	86,2
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor; Tahunan	2,2	2,4	2,5	2,6	2,6
1.2		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	61,36	65,68	68,08	70,61	70,61
1.3		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.4		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Skor; Tahunan	72,12	76,42	78,31	80,56	80,56
II	MISI II: Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan								
2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan		Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	Angka; Kumulatif	70,17	77,73	80,04	82,12	82,12



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020 REALISASI	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	
2.1		Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	Persen; Tahunan	71,45	80,09	82,12	83,78	83,78
			Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak	Persen; Tahunan	67,11	74,23	79,41	84,80	84,80
2.2		Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten	Skor; Tahunan	75,20	75,30	75,40	75,50	75,50
2.3		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	55,05	55,33	55,48	55,83	55,83
III	MISI III : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan								
3	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	-1,46	3,59-5,20	4,20-5,35	4,85-5,45	4,85-5,45
3.1		Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	Persen; Tahunan	2,18	2,75	2,87	3,23	3,23
3.2		Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	Persen; tahunan	-0,46	1,56	2,74	3,78	3,78
3.3		Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	Jumlah; Tahunan	1,85	1,99	2,23	2,33	2,33
3.4		Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Persen; Tahunan	-4,20	2,75	3,23	4,56	4,56

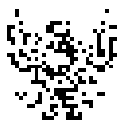


NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020 REALISASI	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	
IV	MISI IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi								
4	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	68,39	69,43	70,13	70,83	70,83
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,85	87,03	87,12	87,21	87,21
4.1		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin; Tahunan	0,546	0,556	0,558	0,560	0,560
4.2		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin; Tahunan	0,794	0,801	0,802	0,804	0,804
4.3		Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,25	70,16	70,8	71,4	71,4
4.4		Meningkatnya Produktivitas Pemuda	Wirausaha Muda Pemula berbasis Kinerja Bisnis	Orang; Tahunan	100	300	400	500	500
5	Menekan Laju Kemiskinan		Persentase Penduduk Miskin	Persen; Tahunan	8,14	8,45-8,12	8,35-8,05	8,25-7,89	8,25-7,89
5.1		Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen; Tahunan	1,08	0,98	0,82	0,78	0,78
			Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen; Tahunan	0,19	0,15	0,12	0,10	0,10
5.2		Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	9,82	10,21-9,42	10,12-9,14	9,85-8,85	9,85-8,85
V	Misi V: Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tenang dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal								



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020 REALISASI	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	
6	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Persen; Tahunan	80,00	86,00	88,00	90,00	90,00
6.1		Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan	Persen; Tahunan	82,66	86,66	88,66	90,66	90,66
7	Menurunnya Resiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	Angka; Tahunan	183	177,71	174,62	172,12	172,12
7.1		Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Angka; Tahunan	0,60	0,72	0,80	0,89	0,89
8	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Indeks; tahunan	44,74	55,27	63,16	73,69	73,69
8.1		Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	Indeks; tahunan	57,50	65,50	70,50	75,50	75,50

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2024



C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Adapun prioritas kebijakan tahun 2024 antara lain:

1. Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektivitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK, fokus kebijakan pada perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat
2. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup, fokus kebijakan pada:
 - a. Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah
 - b. Peningkatan kualitas layanan dan sarana transportasi
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
3. Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan, fokus kebijakan pada:
 - a. Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif ramah lingkungan
 - b. Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan ramah lingkungan
 - c. penguatan dan pengembangan destinasi wisata ramah lingkungan
 - d. Peningkatan efektivitas Pemasaran Wisata
 - e. Pemulihan dan pengembangan UMKM
4. Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru, fokus kebijakan pada:
 - a. Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
 - b. Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat berbasis TIK
 - c. Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK
5. Peningkatan produktivitas pemuda dan olahraga berbasis gender, fokus kebijakan pada:
 - a. Peningkatan Pelayanan Pengarusutamaan Gender
 - b. Perlindungan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, dan anak
 - c. Pengendalian kelahiran dan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana
 - d. Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda
 - e. Peningkatan layanan dan pembinaan olahraga Masyarakat
6. Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda Perubahan Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta



- Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin, fokus kebijakan pada:
- a. Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin
 - b. Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin
7. Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja, fokus kebijakan pada:
- a. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
 - b. Peningkatan kerja sama ketenagakerjaan
8. Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup Masyarakat, fokus kebijakan pada:
- a. Penguatan Kebinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog dan kerja sama antar Warga dan umat beragama
 - b. Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah
 - c. Optimalisasi penanganan bencana sesuai standar
9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal, fokus kebijakan pada:
- a. Penguatan Pemahaman Budaya dan kearifan lokal di Lingkungan Sekolah
 - b. Pelestarian dan Promosi Seni dan Cagar Budaya

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan pembangunan Kabupaten Tegal berdasarkan dokumen perencanaan tahun 2024 fokus pada 20 prioritas sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi 86,20 dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi 3,5;
2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja yang ditandai dengan peningkatan Nilai SAKIP Kabupaten menjadi 70,61;
3. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditandai dengan Opini BPK yang masih WTP;
4. Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah yang ditandai dengan peningkatan Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara menjadi 70,56;
5. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap yang ditandai dengan peningkatan persentase infrastruktur pekerjaan



umum yang mantap menjadi 83,59% dan persentase infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang layak menjadi 79,15%;

6. Meningkatnya Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan yang ditandai dengan peningkatan rasio konektivitas kabupaten menjadi 80,50%;
7. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 65,83%;
8. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian yang ditandai dengan peningkatan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Pertanian sebesar 2,95 - 3,35%;
9. Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Industri sebesar 33,75-5,23%;
10. Meningkatnya Produktivitas Pariwisata yang ditandai dengan peningkatan Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten menjadi 5,10;
11. Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Perdagangan sebesar 4,50-5,65;
12. Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pendidikan menjadi 0,60;
13. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kesehatan menjadi 0,804;
14. Meningkatnya Pemberdayaan Gender yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi 71,40%;
15. Meningkatnya Produktivitas Pemuda yang ditandai dengan peningkatan Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja sejumlah 600 wirausaha;
16. Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan yang ditandai dengan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan menjadi 0,78% dan Indeks Keparahan Kemiskinan menjadi 0,10%;
17. Menekan Laju Tingkat Pengangguran yang ditandai dengan penurunan Tingkat Pengangguran terbuka menjadi 9,64-9,40%;
18. Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan yang ditandai dengan meningkatnya Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan menjadi 90,66%;



19. Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan risiko bencana yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah menjadi 0,9;
20. Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan yang ditandai dengan meningkatnya Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan menjadi 75,50%.

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menimbulkan berbagai permasalahan di daerah. Kemampuan daerah, baik dari sumber daya aparatur, kelembagaan maupun keuangan, masih relatif terbatas. Ketidakmerataan kemampuan daerah juga menyebabkan kesenjangan antar daerah dalam melaksanakan urusan-urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut membuat Pemerintah Pusat merasa perlu untuk menyusun satu standar baku pelaksanaan urusan wajib dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Maka disusunlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi tolok ukur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan wajib dasar yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, sosial serta ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas). Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang didapatkan oleh warga negara secara minimal, berisi indikator-indikator yang menjadi panduan daerah dalam melaksanakan pelayanan dasar secara minimal kepada warga negara.

Penerapan SPM di Daerah, harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Pusat. Sehingga dalam laporan Penerapan SPM ini berisi rencana penerapan SPM, tahapan penerapan, realisasi pelaksanaannya, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta tindak lanjut dari pemerintah daerah dalam mengantisipasi kendala agar tidak terjadi di tahun mendatang.

Dasar hukum pelaksanaan penerapan SPM di Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

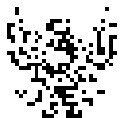


- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal; dan
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

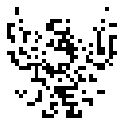


Keterkaitan antara Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Program Pembangunan Prioritas Daerah

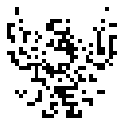
No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja 2024	PD Penanggung Jawab
1	Bidang Urusan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	1.1	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	79,86	79,99	DINAS DIKBUD
		Pendidikan Dasar	1.2a	Jumlah warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar jenjang SD/MI		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	107,03	100	DINAS DIKBUD
			1.2b	Jumlah warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar Jenjang SMP/MTs		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	105,99	100,00	DINAS DIKBUD
		Pendidikan Kesetaraan	1.3	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	97,25	97,29	DINAS DIKBUD
2	Bidang Urusan Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	2.1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,30	100,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	2.2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,20	100,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	2.3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,00	100,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan balita	2.4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	73,70	93,00	DINAS KESEHATAN



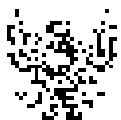
No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja 2024	PD Penanggung Jawab
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	2.5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	38,90	65,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	2.6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	15,40	40,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	2.7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	33,60	80,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	2.8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10,10	40,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	2.9	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74,50	81,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	2.10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	57,30	80,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	2.11	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	57,10	80,00	DINAS KESEHATAN



No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja 2024	PD Penanggung Jawab
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	2.12	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90,50	98,00	DINAS KESEHATAN
3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	3.1	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Akses Layanan Air Minum	61,09	70,00	DPU
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	3.2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik	94,37	96,37	DPU
4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	4.1	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100	DINAS PERKIMTAH
		Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	4.2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni					
5	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	5.1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang diselesaikan	83,00	90,00	SATPOL PP
		Pelayanan informasi rawan bencana	5.2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	79	100,00	SATPOL PP



No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja 2024	PD Penanggung Jawab	
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	5.3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	65	79,01	BPBD
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	5.4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1,38	1,68	BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	5.5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	22,26	27,06	BPBD
6	Bidang Urusan Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas di luar panti	6.1	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .	29,39	100,00	DINAS SOSIAL
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	6.2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti					
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	6.3	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti					
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	6.4	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti					



No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja 2024	PD Penanggung Jawab
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten	6.5	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	97,99	100,00	DINAS SOSIAL



BAB II
CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro Kabupaten Tegal Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024	Perubahan
1.	Indeks Pembangunan Manusia	71,12	71,7	0,70 poin
2.	Angka Kemiskinan	7,30%	6,81%	-6,71 %
3.	Angka Pengangguran	8,6%	7,53%	-12,44 %
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,93%	5,07%	2,84 %
5.	Pendapatan (PDRB) Per kapita	26,85 (juta rupiah)	28,49 (juta rupiah)	6.108
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,358	0,329	-8,101

Sumber : BPS Kabupaten Tegal 2024

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai IPM Kabupaten Tegal pada tahun 2024 masuk dalam kategori baik yaitu mencapai 71,70. Nilai ini naik 0,58 poin dari nilai IPM tahun sebelumnya yaitu 71,12. Pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal pada tahun 2024 mencapai 0,82 persen. Nilai ini lebih rendah dari capaian pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 0,99 persen.

Berdasarkan masing-masing komponen pembentuk IPM, capaian AHH saat lahir mencapai 74,25 tahun yang berarti bayi yang baru lahir di tahun 2024 kemungkinan dapat hidup mencapai umur 74,25 tahun. Semakin meningkatnya AHH saat lahir ini menggambarkan semakin panjang umur yang dimiliki generasi yang akan datang. Dari segi pengetahuan, capaian RLS mencapai 7,36 menggambarkan bahwa jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Tegal hanya mencapai 7 sampai 8 tahun atau setara dengan lama belajar di bangku kelas 1 atau 2 SMP. Nilai ini masih di bawah angka wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk nilai HLS mencapai 12,96 tahun menggambarkan bahwa anak usia 7 tahun ke atas memiliki harapan akan bersekolah hingga 12 tahun ke depan yaitu sampai tamat jenjang SMA atau



Diploma 1. Capaian nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai 10,97 juta per tahun, naik Rp 435.000 dibandingkan tahun sebelumnya.

Tantangan yang ada dari pembangunan manusia ini adalah meningkatkan nilai komponen penyusunan IPM sehingga angka IPM meningkat. Percepatan peningkatan pun menjadi penting agar angka IPM mampu mencapai kategori yang diinginkan. Sangat penting pemerintah daerah memperhatikan angka IPM. Hal ini dikarenakan angka IPM digunakan sebagai salah satu target pembangunan pemerintah dan yang terpenting ialah IPM juga digunakan sebagai alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

b. Angka Kemiskinan

Salah satu bukti keberhasilan dalam pembangunan adalah pengendalian masalah kemiskinan. Namun sampai saat ini kemiskinan masih tetap menjadi permasalahan klasik multidimensi karena di dalam masalah kemiskinan terkandung permasalahan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan serta keterbatasan akses terhadap pemenuhan kebutuhan pokok sehingga upaya penanganannya juga harus bersifat multi dimensi. Banyak sekali faktor yang menyebabkan kemiskinan yang berkelanjutan dan terus menerus.

Kriteria dan ukuran garis kemiskinan yang selama ini pemerintah gunakan adalah garis kemiskinan makanan (2100 kkal/kapita/hari) + non makanan (esensial). Garis kemiskinan juga diukur misalnya dengan jumlah pendapatan \$1 (atau sekitar Rp 14.000) per hari. Dalam beberapa situasi garis kemiskinan dilihat berdasarkan pada kebutuhan satu kali makan untuk satu orang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal mencatat bahwa Garis Kemiskinan (GK) di Kabupaten Tega; pada Maret 2024 sebesar Rp 497.315/kapita/bulan. Artinya angka tersebut merupakan batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk memperoleh standar hidup, baik untuk kebutuhan makanan dan non makanan di suatu wilayah. Jika di bawah angka tersebut maka masuk kategori penduduk miskin. Jika rata-rata setiap satu rumah tangga miskin di Kabupaten Tegal memiliki 4 anggota rumah tangga, maka pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar hidup mencapai RP 1,99 juta/rumah tangga miskin/bulan. Jika kurang dari itu maka masuk kategori rumah tangga miskin. Dengan garis kemiskinan sebesar itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal tahun 2024 ada sebesar 98,02 ribu jiwa (6,81 persen) berkurang sebesar 7,01 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2023



yaitu sebesar 105,03 ribu orang (7,30 persen). Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin menunjukkan tren menurun dari tahun ke tahun, dimana ketika tahun 2021 jumlah penduduk miskin Kabupaten Tegal mencapai 123,52 ribu jiwa (8,60 persen). Sehingga usaha pemerintah dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal patut diacungi jempol.

Namun, membicarakan masalah kemiskinan tidak bisa sekedar melihat jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan karena kebijakan pemerintah selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Meskipun jumlah penduduk miskin Kabupaten Tegal Maret 2024 menurun, indeks kedalaman kemiskinan justru meningkat dari 0,88 persen di tahun 2023 menjadi 0,97 persen di tahun 2024. Peningkatan indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan yang berarti bahwa diperlukan usaha yang lebih besar untuk mengangkat mereka dari kemiskinan.

Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan juga meningkat dari Maret 2023 sebesar 0,17 persen, sedangkan Maret 2024 sebesar 0,22 persen. Indeks Keparahannya Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin dan berarti pula semakin parah tingkat kemiskinannya.

Manfaat yang bisa diperoleh dua indikator tersebut diketahui adalah bagi pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah, akan sangat terbantu dalam alokasi dana dan program. Pemerintah bisa menyalurkan dana secara tepat guna serta menyusun program yang efektif dan pemerintah dalam usahanya mengentaskan kemiskinan harus melakukan pendekatan partisipasi yaitu melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan berbasis pembangunan.

c. Angka Pengangguran

Di Kabupaten Tegal pada tahun 2024 menyisakan 7,53 persen penduduk yang menganggur. Mirisnya, sebagian besar dari pengangguran tersebut berusia muda dan berpendidikan menengah atas. Pada tahun 2024 pengangguran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menempati urutan pertama terbesar penyumbang pengangguran di Kabupaten Tegal, yaitu sebesar 15,43 persen. Jumlah ini cukup besar dan meningkat drastis dibandingkan tahun 2023 sebanyak 15,81 persen.



d. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2023 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 44.440,29 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 28.023,03 miliar rupiah.

Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu 4,93 persen (y-on-y), pertumbuhan ini melambat dibanding capaian tahun 2022 yang tumbuh 5,13 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 12,62 persen. Dari sisi * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN * Pindai kode QR di samping untuk menampilkan dokumen asli pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga yaitu sebesar 7,26 persen.

Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2024 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 47.721,31 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 29.444,38 miliar rupiah.

Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu 5,07 persen (y-on-y), pertumbuhan ini meningkat dibanding capaian tahun 2023 yang tumbuh 4,93 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 9,94 persen. Dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga yaitu sebesar 17,24 persen.

Secara struktur, Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Tegal pada tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 36,45 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 82,04 persen

e. Pendapatan (PDRB) Per kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah atau wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. Nilai tersebut merupakan hasil



bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk per tahun.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku sejak 2022 hingga 2024 mengalami peningkatan. Peningkatan angka PDRB per kapita ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Tegal semakin membaik setelah pandemi Covid-19 terlebih dengan didirikannya perusahaan baru yang menyerap cukup banyak tenaga kerja. Pada 2022, PDRB per kapita tercatat sebesar 24,95 juta rupiah. Pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 26,85 juta rupiah dan berlanjut di tahun 2024 menjadi 28,49 juta rupiah.

f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi. Kondisi ketimpangan di Kabupaten Tegal yang digambarkan dari angka Gini Ratio pada periode 2017-2023 terlihat berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada Maret 2023 yaitu sebesar 0,358. Meningkatnya Gini Rasio ini disebabkan semakin meningkat jumlah penduduk kategori sangat miskin.

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	98,6661951	DINAS DIKBUD
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98,7559313	DINAS DIKBUD
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	94,8268393	DINAS DIKBUD
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	93,4295737	DINAS DIKBUD
2.	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	0,8657647	DINAS KESEHATAN



No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	101,2689478	DINAS KESEHATAN
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,9111243	DINAS KESEHATAN
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99,3868086	DINAS KESEHATAN
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	DINAS KESEHATAN
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	0	DINAS PUPR
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	DINAS PUPR
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	29,9859929	DINAS PUPR
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	62,2574548	DINAS PUPR
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6,41102	DINAS PUPR
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	DINAS PUPR
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	87,5128353	DINAS PUPR
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	19,5973154	DINAS PUPR
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa	100	DINAS PUPR



No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		kecelakaan konstruksi		
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	DINAS PERKIM
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	DINAS PERKIM
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	57,1698762	DINAS PERKIM
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7,7565656	DINAS PERKIM
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	DINAS PERKIM
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	SATPOL PP
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	52,3809524	SATPOL PP
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	SATPOL PP
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	BPBD
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	65,6441718	SATPOL PP
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	16,07	SATPOL PP
6.	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	31,9785619	DINAS SOSIAL
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	DINAS SOSIAL
7.	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	DINAS PERINTRANSNAKER
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0	DINAS PERINTRANSNAKER
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	68,0716218	DINAS PERINTRANSNAKER
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	8,1704457	DINAS PERINTRANSNAKER
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	95,629917	DINAS PERINTRANSNAKER
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	4,6313984	DINAS P3AP2KB



No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100	DINAS P3AP2KB
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	3,5350792	DINAS P3AP2KB
9.	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	68,9379399	DINAS KPTAN
10.	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	DINAS PERKIM
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	DINAS PERKIM
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100	DINAS PERKIM
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	DINAS PERKIM
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	DINAS PERKIM
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	DINAS PERKIM
11.	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	61,94	DINAS LH
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	50,2698564	DINAS LH
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	28,5714286	DINAS LH
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99,6430165	DINAS DUKCAPIL
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	34,7006756	DINAS DUKCAPIL
		Kepemilikan akta kelahiran	96,9532261	DINAS DUKCAPIL
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	58,8235294	DINAS DUKCAPIL
13.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	58,3333333	DINAS PERMASDES
		Persentase peningkatan status desa mandiri	3,1847134	DINAS PERMASDES
14.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,8368	DINAS PERMASDES
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	64,7621902	DINAS P3AP2KB
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,7725819	DINAS P3AP2KB
15.	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,79	DINAS PERHUBUNGAN
		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,372	DINAS PERHUBUNGAN
16.	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	64,5833333	DINAS KOMINFO
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	66,1290323	DINAS KOMINFO



No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	79,3855558	DINAS KOMINFO
17.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	18,4818482	DINAS KOP,UKM, PERDAGANGAN
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	1,1318334	DINAS KOP,UKM, PERDAGANGAN
18.	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	36,8204877	DINAS PMPTSP
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,1888107	DINAS PORAPAR
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,0550277	DINAS PORAPAR
		Peningkatan prestasi olahraga	8	DINAS PORAPAR
20	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	50	DINAS KOMINFO
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	50	DINAS KOMINFO
21.	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	68,2170543	DINAS KOMINFO
22.	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	248,4848485	DINAS DIKBUD
23.	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	70	DINAS PERPUSIP
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	48,08	DINAS PERPUSIP
24.	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	76,25	DINAS PERPUSIP
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	50	DINAS PERPUSIP
25.	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP	104,0877805	DINAS PERIKANAN
26.	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	375	DINAS PORAPAR
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	13,0297914	DINAS PORAPAR
		Tingkat hunian akomodasi	20,5775855	DINAS PORAPAR
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4,5812968	DINAS PORAPAR
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4,9092017	DINAS PORAPAR
27.	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	61,7109954	DINAS KPTAN
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	-95,7634598	DINAS KPTAN
28.	Kehutanan	Bukan kewenangan kabupaten/kota	100	DINAS LH
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di	0	DINAS PERINTRANSNAKER



No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		kab/kota		
30.	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	DINAS KOP,UKM, PERDAGANGAN
		Persentase kinerja realisasi pupuk	86,3380243	DINAS KOP,UKM, PERDAGANGAN
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	74,9418391	DINAS KOP,UKM, PERDAGANGAN
31.	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	0,1752993	DINAS PERINTRANSNAKER
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	77,55	DINAS PERINTRANSNAKER
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	DINAS PERINTRANSNAKER
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	DINAS PERINTRANSNAKER
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0	DINAS PERINTRANSNAKER
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	49	DINAS PERINTRANSNAKER
32.	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	100	DINAS PERINTRANSNAKER

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	17,0098165	BPKAD
		Rasio PAD	20,108361	BPKAD
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	BPKAD
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	BPKAD
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	66,9168105	BPKAD
		Opini Laporan Keuangan	8	BPKAD
2.	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	SETDA
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	39,691837	SETDA
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	40,8905329	SETDA



No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	92,7943615	SETDA
3.	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	67,0943396	BKPSDM
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	21,7839534	BKPSDM
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	20,9876543	BKPSDM
4.	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam	1,2887189	BPKAD
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam	7,3859448	BPKAD
		Manajemen Aset	4	BPKAD
		Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	5,8933678	BPKAD
5.	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	95,3950423	BPKAD
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	BPKAD

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Tegal Tahun 2024 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2024. Pemerintah



Kabupaten Tegal telah menetapkan Perjanjian Kinerja dan melakukan perubahan pada Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

No.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat				
1.	Tujuan :			
	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78,91
	Sasaran :			
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	86,2 3,5
1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	73,61
1.3	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini	WTP
1.4	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalisme ASN	Angka	80,56
Misi 2 : Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan				
2.	Tujuan			
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap Berwawasan Lingkungan	Angka	81,36
	Sasaran			
2.1	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	1) Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap 2) Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak	%	83,89 79,15
2.2	Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten	Angka	80,5
2.3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	65,83
Misi 3 : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan				
3.	Tujuan			
	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2-5,5
	Sasaran			
3.1	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	%	2,95-3,35
	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	%	3,75-5,23
	Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	%	12,5
	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	%	4,5-5,65
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				
4.	Tujuan			



No.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas	1) Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71
		2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	88,5
	Sasaran			
4.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Angka	0,61
4.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka	0,804
4.3	Meningkatnya Produktivitas Pemuda	Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja Bisnis	Orang	600
5.	Tujuan :			
	Menekan laju kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	%	7,8-71
	Sasaran :			
5.1	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	1) Indeks Kedalaman Kemiskinan	%	0,78
		2) Indeks Keparahan Kemiskinan	%	0,1
5.2	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,64-9,4
Misi 5 : Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tenteram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal				
6.	Tujuan :			
	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	%	90,66
	Sasaran			
6.1	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	%	90,66
7.	Tujuan			
	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Angka	172,12
	Sasaran			
7.1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Risiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Angka	0,89
8.	Tujuan			
	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	%	73,69
	Sasaran			
8.1	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	%	79,45

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Tegal. Pengukuran kinerja ini



berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2024 dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.

Secara umum pemerintah Kabupaten Tegal telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2024

No.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat					
1.	Tujuan :				
	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78,91	104,5
	Sasaran :				
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	86,2 3,5	100,2 90,2
1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	73,61	89
1.3	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini	WTP	100
1.4	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalisme ASN	Angka	80,56	100,25
Misi 2 : Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan					
2.	Tujuan:				
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap Berwawasan Lingkungan	Angka	81,36	
	Sasaran:				
2.1	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	1) Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap 2) Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak	%	83,89 79,15	104 107
2.2	Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten	Angka	80,5	98,5
2.3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	65,83	94,09
Misi 3 : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan					
3.	Tujuan				
	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2-5,5	95,5



No.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sasaran					
3.1	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	%	2,95-3,35	0*
3.2	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	%	3,75-5,23	100*
3.3	Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	%	12,5	39,28
3.4	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	%	4,5-5,65	100*
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi					
4. Tujuan					
	Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas	1) Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71	100,9
		2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	88,5	100,16
Sasaran					
4.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Angka	0,61	101
4.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka	0,804	103
4.3	Meningkatnya Produktivitas Pemuda	Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja Bisnis	Orang	600	112
5. Tujuan :					
	Menekan laju kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	%	7,8-71	101
Sasaran :					
5.1	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	%	0,78	75,64
		Indeks Keparahan Kemiskinan	%	0,1	20
5.2	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,64-9,4	119
Misi 5 : Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tenteram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal					
6. Tujuan :					
	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	%	90,66	102,55
Sasaran :					
6.1	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	%	90,66	103
7. Tujuan :					
	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Angka	172,12	133,89
Sasaran :					
7.1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Risiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Angka	0,89	91,01
8. Tujuan :					
	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	%	73,69	113,9
Sasaran :					
8.1	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	%	79,45	106,15



C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

No.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	% CAPAIAN 2023	% CAPAIAN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat					
1.	Tujuan :				
	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	113,6	104,5
	Sasaran :				
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	100,5	100,2
		2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	95,94	90,2
1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	98,53	89
1.3	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini	100	100
1.4	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalisme ASN	Angka	112,5	100,25
Misi 2 : Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan					
2.	Tujuan :				
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap Berwawasan Lingkungan	Angka	100,52	
	Sasaran :				
2.1	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	1) Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	%	104,51	104
		2) Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak	%	100	107
2.2	Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten	Angka	98,63	98,5
2.3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	120,4	94,09
Misi 3 : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan					
3.	Tujuan :				
	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi	%	100	95,5
	Sasaran :				
3.1	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	%	0	0
3.2	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	%	138,59	100
3.3	Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	%	593,53	39,28
3.4	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	%	128,82	117
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi					
4.	Tujuan :				
	Mewujudkan Sumber daya	1) Nilai Indeks	Angka	101,41	100,9



No.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	% CAPAIAN 2023	% CAPAIAN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Manusia yang Berkualitas	Pembangunan Manusia (IPM)			
		2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	99,25	100,16
	Sasaran :				
4.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Angka	100	101
4.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka	105,9	103
4.3	Meningkatnya Produktivitas Pemuda	Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja Bisnis	Orang	115,4	112
5.	Tujuan :				
	Menekan laju kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	%	100	101
	Sasaran :				
5.1	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	1) Indeks Kedalaman Kemiskinan	%	92,68	75,64
		2) Indeks Keparahan Kemiskinan	%	58,33	20
5.2	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	100	119
Misi 5 : Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tenteram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal					
6.	Tujuan :				
	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	%	100,81	102,55
	Sasaran :				
6.1	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	%	100,81	103
7.	Tujuan :				
	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Angka	127,69	133,89
	Sasaran :				
7.1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Risiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Angka	93,75	91,01
8.	Tujuan :				
	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	%	102,3	113,9
	Sasaran :				
8.1	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	%	110,87	106,15



D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Hasil Pembangunan Jangka Menengah

No.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			TARGET AKHIR RPJMD 2024	% CAPAIAN Terhadap Target Akhir RPJMD
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat							
1.	Tujuan :						
	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	78,91	82,48	104,5	65,69	125,5
	Sasaran :						
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,2	86,38	100,2	86,2	100
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,5	3,16	90,2	2,6	121,5
1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	73,61	65,58	89	73,61	89
1.3	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP*	100	WTP	100
1.4	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalisme ASN	80,56	80,61	100,25	80,56	100,1
Misi 2 : Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan							
2.	Tujuan :						
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap Berwawasan Lingkungan	81,36	82,98	101,9	81,36	101,9
	Sasaran :						
2.1	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	1) Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	83,89	87,51	104	83,89	104,3
		2) Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak	79,15	85,30	107	79,15	107,7
2.2	Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten	80,5	79,3	98,5	75,5	105
2.3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,83	61,94	94,09	55,83	110,9
Misi 3 : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan							
3.	Tujuan :						
	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi	5,2-5,5	4,97	95,5	4,9	101,4
	Sasaran :						
3.1	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	2,95-3,35	0,29	0	3,23	0
3.2	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	3,75-5,23	3,87	100	3,78	134,9
3.3	Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	12,5	4,91	39,28	2,33	210,7
3.4	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	4,5-5,65	6,62	117	4,56	145
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi							
4.	Tujuan:						
	Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71	71,7	100,9	70,83	101,2
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,5	88,64*	100,16	87,21	101,6
	Sasaran:						
4.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,60	0,61	101	0,560	108,9
4.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,804	0,835	103	0,804	103,8
4.3	Meningkatnya Produktivitas Pemuda	Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja Bisnis	600	677	112	600	112
5.	Tujuan:						
	Menekan laju kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	7,8-71	6,81	101	8,05	115,4



No.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			TARGET AKHIR RPJMD 2024	% CAPAIAN Terhadap Target Akhir RPJMD
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran:							
5.1	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,78	0,97	75,64	0,78	75,64
		Indeks Keparahan Kemiskinan	0,10	0,22	20	0,10	20
5.2	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,64-9,4	7,53	119	8,45	110,8
Misi 5 : Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tenteram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal							
6. Tujuan:							
	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	90,66	92,58	102,55	90,66	102,55
Sasaran:							
6.1	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	90,66	93,38	103	90,66	103
7. Tujuan :							
	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	172,12	113,79	133,89	171,84	133,7
Sasaran :							
7.1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Risiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,89	0,81	91,01	0,9	90
8. Tujuan :							
	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	73,69	83,93	113,9	73,69	113,8
Sasaran :							
8.1	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	79,45	84,34	106,15	75,5	111,7

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah Dicapai

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dengan Realisasi Tahun 2024, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada Tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019–2024. Analisis terhadap 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja yang ditetapkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada RPJMD 2019-2024. Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari hasil pengukuran capaian IKU, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebesar 105,3 dengan kategori “Sangat Baik” sebagaimana berikut:



Ringkasan Capaian Indikator Tujuan Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2024

NO	URAIAN IKU	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78,91	82,48	125,5
2	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	Angka	81,36	82,98	101,99
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2-5,5	4,97	95,5
4	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71	71,7	100,9
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	88,5	88,64*	100,16
6	Persentase Penduduk Miskin	%	7,8-71	6,81	101
7	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	%	90,66	92,58	102,55
8	Indeks Risiko Bencana	Angka	172,12	113,79	133,89
9	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Angka	73,69	83,93	113,9
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama					108,3

Keterangan * : Realisasi Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Tujuan Utama Pemerintah Kabupaten Tegal terdapat 8 (delapan) indikator kinerja (77%) yang capainya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu (1) Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan; (2) Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (3) Indeks Pembangunan Gender (IPG); (4) Persentase Penduduk Miskin; (5) Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan; (6) Indeks Risiko Bencana; dan (7) Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan serta 2 (dua) indikator kinerja (23%) yang capainya belum sesuai Bencana; dan dengan yang direncanakan antara lain (1) Indeks Reformasi Birokrasi dengan target yang ditetapkan sebesar 78,91 terealisasi 77,6 (Nilai RB Tahun 2023) dengan tingkat capaian 98,3%,; (2) Pertumbuhan Ekonomi dengan target yang ditetapkan 5,2-5,5 terealisasi 4,97 dengan tingkat capaian 95,5%.



Perbandingan Rata-Rata Realisasi IKU 2019-2024

NO	URAIAN IKU	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64,21	64,62	67,41	77,6	82,48
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,2	2,55	3,07	3,07	3,16
3	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	78,61	82,2	81,38	85,26	86,38
4	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	63,61	62,56	63,26	64,25	65,58
5	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP*
6	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Angka	72,12	44,76	50,49	67,85	80,61
7	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	Angka	72,31	-	80,9	80,46	82,98
8	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	%	72,88	-	82,46	82,44	87,51
9	Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak	%	74,88	-	76,96	78,02	85,30
10	Rasio Konektivitas Kabupaten	Angka	75,2	-	79,3	79,3	79,3
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	55,05	55,05	60,67	66,8	61,94
12	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,46	3,72	5,14	4,93	4,97
13	Laju PDRB Sektor Pertanian	%	2,18	2,77	1,67	-2,04	0,29
14	Laju PDRB Sektor Industri	%	-0,46	4,28	4,43	5,1	3,87
15	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	%	1,85	-	4,5	13,77	4,91
16	Laju PDRB Sektor Perdagangan	%	-4,2	4,07	2,62	5,05	6,62
17	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	68,39	68,79	69,53	71,12	71,7
18	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	86,85	72,32	73,76	88,22	88,64*
19	Indeks Pendidikan	Angka	0,546		0,5958	0,61	0,61
20	Indeks Kesehatan	Angka	0,794		0,798	0,85	0,835
21	Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja Bisnis	Orang	200	300	400	577	677
22	Persentase Penduduk Miskin	%	8,14	8,6	7,9	7,3	6,81
23	Indeks Kedalaman Kemiskinan	%	1,08	1	0,95	0,88	0,97
24	Indeks Keparahan Kemiskinan	%	0,19	0,19	0,17	0,17	0,22
25	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,82	9,97	9,64	8,6	7,53
26	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	%	82,66	84,66	86,96	89,38	92,58



NO	URAIAN IKU	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
27	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	%	82,66	84,66	86,66	89,38	93,38
28	Indeks Risiko Bencana	Angka	183	181,91	176,85	126,26	113,79
29	Indeks Kapasitas Daerah	Angka	0,60	0,64	0,69	0,75	0,81
30	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Angka	44,74	-	55,67	64,61	83,93
31	Persentase Seni dan Kesenian yang Dilestarikan	Angka	57,5	-	68,75	78,16	84,34

Keterangan * : Realisasi Tahun 2023

Berdasarkan di atas rata-rata capaian kinerja selama 5 tahun P-RPJMD Kabupaten Tegal periode tahun 2019-2024 realisasi capaian indikator kinerja utama Bupati Tegal tercapai dengan baik dan dominan tercapai. Pandemi Covid 19 yang sempat melanda seluruh dunia, mempengaruhi kondisi perekonomian Kabupaten Tegal yang semakin memburuk periode 2020-2022 yang mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran dan meningkatnya angka inflasi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Tegal. Mulai periode tahun 2022 akhir sampai dengan 2023 menandai awal kebangkitan perekonomian Kabupaten Tegal ke arah yang positif yang ditunjukkan dengan kenaikan capaian kinerja.

- 1) Terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan yang baik dan bersih

Pemerintah Kabupaten Tegal selama periode RPJMD 2019-2024 telah berupaya untuk mengimplementasikan tujuan transparansi, akuntabilitas, dan budaya anti korupsi dengan moto “Mbangun Berkah, Gawe Berkah” dengan meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dalam menerima layanan. Moto tersebut menjadi pedoman bagi seluruh ASN di Kabupaten Tegal dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan kinerja agar dapat menjadi berkah dalam hidup.

Reformasi Birokrasi telah menjadi perhatian penuh Pemerintah Kabupaten Tegal selama masa RPJMD 2019-2024 yang merupakan gambaran singkat dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas. Birokrasi



yang berkualitas akan menjadi tolak ukur tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima layanan. Berbagai upaya telah dilakukan Kabupaten Tegal selama masa periode RPJMD 2019-2024 diantaranya: Mengintegrasikan layanan yang ada, dengan membangun Mal Pelayanan Publik sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan, pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), dan meningkatkan kapasitas ASN dalam memanfaatkan teknologi dan membangun budaya kerja yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

Capaian kinerja tujuan mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan budaya anti korupsi dalam pemerintah dengan didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 78,91 dengan realisasi sebesar 77,6 (n-1) dengan capaian sebesar 113,59 % atau dengan kategori Sangat Tinggi pada tahun 2023. Tujuan ini dicapai dengan 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator dengan pengukuran sebagaimana tabel berikut:

**Pengukuran Kinerja Tujuan 1 dan Sasaran
Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya anti korupsi
dalam pemerintahan**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian 2023	Capaian 2024			Target Akhir RPJMD	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	100,5	86,2	86,38	100,1	86,2	100,1
2.	Indeks SPBE	Angka	95,94	3,5	3,16	90	2,6	121
3.	Nilai SAKIP	Angka	98,53	73,61	65,58	89	73,61	89
4.	Opini BPK	Opini	100	WTP	WTP*	100	WTP	100
5.	Indeks Profesionalisme ASN	Angka	112,5	80,56	80,61	100,25	80,56	100,25
Rata-rata capaian tujuan 1			101,5		101,5			95,8

Keterangan * = Nilai Tahun 2023

Dari tabel di atas diketahui bahwa dalam mencapai tujuan 1 (satu) dijabarkan melalui 5 (lima) sasaran strategis dengan capaian rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 95,8% atau dengan kategori “Sangat Tinggi” bila dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja capaian target akhir kinerja yang selesai pada tahun 2024 sudah tercapai sebesar 102%. Dari 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan terdapat 2 (dua) indikator yang capaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% dan



Indeks Profesionalisme ASN dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan terdapat 3 (tiga) indikator yang tidak tercapai target pada tahun 2024 yaitu (1) Indeks SPBE dengan tingkat capaian kinerja sebesar 90%; (2) Nilai SAKIP dengan tingkat capaian kinerja sebesar 89%; dan (3) OPINI BPK dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%

Adapun analisis keberhasilan capaian kinerja untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya anti korupsi dalam pemerintah yaitu Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 bahwa pelaksanaan RB adalah guna menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, *Road Map* RB 2020–2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Dengan adanya perubahan peraturan tersebut, Tim RB Kabupaten Tegal segera menyesuaikan dengan melakukan upaya-upaya antara lain :

- a) Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 34 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. sesuai dengan mandatori Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mencantumkan dan menetapkan indikator dan target Kegiatan Utama yang jumlahnya sesuai dengan mandatori Peraturan Menteri PANRB dimaksud, yaitu 21 (dua puluh satu) indikator kegiatan utama. Selain itu, RB Tematik yang diatur dalam peraturan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Pengentasan Kemiskinan, Digitalisasi Pemerintahan fokus pada Penanganan Stunting, Peningkatan Realisasi Investasi, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan Pengendalian Inflasi.



- b) Memperkuat kolaborasi antar perangkat daerah dalam merumuskan rencana aksi baik dari RB General dan RB Tematik agar dapat saling menunjang untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c) Menindaklanjuti rekomendasi lembar hasil evaluasi penilaian RB pada tahun 2023 dari TIM TPI Inspektorat dengan meningkatkan kualitas pada perumusan rencana aksi sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks SPBE dengan capaian kinerja masing-masing Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 100,1% atau kategori “Sangat Tinggi” dan Indeks SPBE sebesar 90% atau dengan kategori “Tinggi” .Hal tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya maksimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah dan BUMD. Capaian nilai IKM tahun ini sebesar 86,38 yang masuk dalam kategori “Baik” menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah dilaksanakan dengan baik.

Dalam mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya diantaranya yaitu:

1. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat menggunakan aplikasi SEPAKAT;
2. Melakukan pembinaan pada perangkat daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pelayanan publik melalui penyelenggaraan forum konsultasi publik; dan
3. Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat perangkat daerah.

Capaian kinerja Indeks SPBE belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 90%, namun bila dibandingkan dengan target akhir rencana jangka menengah daerah tingkat capaian sebesar 121%. Hal tersebut



menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terpadu berbasis digital.

Dalam mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks SPBE, Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya diantaranya yaitu:

1. Mengajak seluruh Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan Gerakan Menuju Smart City, Penerapan SMKI melalui Agen CSIRT. Tegal *Smart City* bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh layanan dan memudahkan akses informasi bagi masyarakat pengguna layanan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat;
2. Melanjutkan penyusunan kebijakan internal SPBE diantaranya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Standar Teknis Dan Prosedur Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi Khusus, Penyelenggaraan Audit TIK SPBE, Pedoman Manajemen Perubahan SPBE, dan Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain;
3. Melaksanakan reviu berkala terhadap layanan yang ada serta mengintegrasikan layanan dengan layanan daerah/pusat dan melakukan perbaikan/peningkatan secara berkala pada semua layanan di tahun 2025;
4. Melakukan digitalisasi layanan publik seperti pembangunan/pengembangan website desa dan website kecamatan, menambah/memperluas cakupan koneksi Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD), Menambah/meningkatkan kualitas layanan pusat data dan memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada SDM SPBE

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan didukung oleh 1 (satu) indikator Nilai SAKIP dengan capaian sebesar 89% atau dengan kategori “Tinggi”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya untuk menerapkan manajemen kinerja yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Capaian kinerja Nilai SAKIP tahun ini belum melampaui target akhir RPJMD, namun dari tahun 2020-2024 Pemerintah Kabupaten Tegal mengalami peningkatan capaian kinerja. Capaian positif ini menjadi semangat bagi Pemerintah Kabupaten Tegal guna melakukan upaya perbaikan dalam



penerapan dan penguatan SAKIP, perbaikan tersebut dilakukan baik pada level Pemerintah Kabupaten maupun level Perangkat Daerah.

Dalam mewujudkan sasaran meningkatkan kualitas manajemen kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yang diantaranya yaitu :

1. Penguatan kepada perangkat daerah dalam penyusunan laporan kinerja guna lebih meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan analisis yang memadai atas pencapaian kinerja yang berorientasi hasil dan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja serta memastikan agar pimpinan OPD memanfaatkan laporan kinerja sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
2. Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi ESAKIP sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal sarana monitoring evaluasi kinerja secara bulanan atau Triwulanan dan menjamin keandalan, akurasi pengumpulan data kinerja guna mendukung budaya kinerja organisasi di berbagai level.
3. Menyusun kebijakan pemberian TPP Bonus pada Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, bagi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang memperoleh predikat A berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025.
4. Mereviu kembali dokumen perencanaan kinerja dan memastikan kembali penjenjangan kinerja yang telah dimiliki mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu penyusunan penjenjangan kinerja dilakukan berdasarkan kerangka berpikir logis/logical framework dan mengutamakan CSF sebagai penjenjangan kinerja antara level kinerja; dan
5. Melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan dalam tindak lanjut hasil evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah.

Capaian kinerja meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan didukung oleh 1 (satu) indikator OPINI BPK dengan capaian sebesar 100% atau kategori "Sangat Tinggi". Capaian WTP selama periode RPJMD 2019-2024 atau 5 tahun berturut-turut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam mewujudkan sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yang diantaranya yaitu :



1. Memanfaatkan Aplikasi Sistem Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Tersusunnya regulasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain :
 - a) Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tanda Tangan Elektronik Pada Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga meminimalisir risiko dokumen palsu dan memudahkan proses bisnis dengan waktu dan biaya yang lebih hemat.
 - b) Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal sehingga dapat menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu diterapkan pembayaran secara Non Tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - d) Keputusan Bupati Tegal Nomor 100.3.3.2/604 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 sehingga dapat meminimalisir risiko kecurangan dalam melakukan belanja daerah. dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Melakukan Pembinaan dan monitoring kepada Pengelola Keuangan dan Aset Daerah SKPD secara Periodik;
4. Menggunakan aplikasi eBMD milik BPKAD yang bertujuan untuk memudahkan Perangkat Daerah dalam rangka input data barang belanja modal.

Capaian kinerja meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan didukung oleh 1 (satu) indikator Indeks Profesionalisme ASN dengan capaian sebesar 100% atau kategori "Sangat Tinggi". Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas ASN di Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya telah



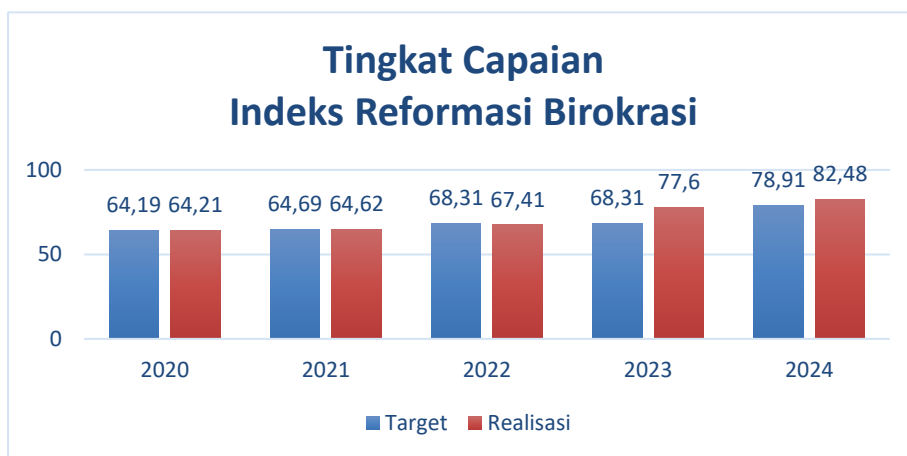
bekerja dengan baik. Pencapaian kinerja indikator sasaran indeks profesionalitas ASN sangat dipengaruhi oleh faktor adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk mengembangkan kompetensi ASN.

Dalam mewujudkan meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yang diantaranya yaitu :

1. Menerapkan inovasi yaitu melaksanakan pengembangan kompetensi melalui seminar *online*, *workshop* dan sosialisasi melalui program “Kamis Belajar” yang diselenggarakan dengan narasumber yang kompeten pada bidangnya masing-masing.
2. Kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi berupa pelatihan *Government Transformation Academy* yang diselenggarakan secara daring dan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan pelatihan teknis dengan metode *Massive Open Online Course (MOOC)*.

Sebagai perbandingan untuk target dan realisasi tujuan 1 (satu) Indeks Reformasi Birokrasi sebagaimana grafik berikut.

Tingkat Capaian Indeks Reformasi Birokrasi



Sebagai perbandingan untuk realisasi capaian kinerja tujuan Terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan yang baik dan bersih selama 5 (lima) tahun terakhir 2020-2024, sebagaimana tabel berikut ini :

Capaian Sasaran Tujuan 1

NO	URAIAN IKU	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,2	2.55	3.07	3.07	3,16



2.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	78,61	82,2	81,38	85,26	86,38
3.	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	63,61	62,56	63,26	64,25	65,58
4.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP*
5.	Indeks Profesionalisme ASN	Angka	72,12	44,76	50,49	67,85	80,61

Sasaran strategis ini dilaksanakan melalui program :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 4) Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 5) Program Pendaftaran Penduduk;
- 6) Program Pencatatan Sipil;
- 7) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Program Aplikasi Informatika Program Informatika dan Komunikasi Publik;
- 8) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- 9) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 10) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 11) program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
- 12) Program Perekonomian dan Pembangunan;
- 13) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
- 14) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 15) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 16) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 17) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 18) Program Pengelolaan Arsip;
- 19) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- 20) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
- 21) Program Kepegawaian Daerah; dan
- 22) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- 2) Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan kualitas



infrastruktur dasar yang berwawasan lingkungan meningkatkan pada 2 (dua) komponen yaitu percepatan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah; dan komponen peningkatan kesehatan lingkungan hidup. Infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah menjadi satu kesatuan yang mempunyai peranan yang penting dalam pengembangan suatu wilayah. Pemerataan infrastruktur dasar difokuskan pada pemerataan pelayanan lingkungan permukiman yang layak, pemenuhan sarana air bersih serta jaringan jalan sebagai salah satu penunjang aksesibilitas wilayah. Oleh karena itu pemerataan aksesibilitas menekankan pada dua hal penting yaitu layanan jaringan jalan dan transportasi (perhubungan) yang baik secara menyeluruh hingga pelosok pedesaan. Kesehatan lingkungan menjadi kunci kelancaran berbagai aktivitas pembangunan. Peningkatan kesehatan lingkungan di Kabupaten Tegal menekankan pada 3 (tiga) aspek yaitu Aspek jenis pencemaran, stakeholders, dan kewilayahan. Aspek jenis pencemaran menekankan pada upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan baik pencemaran air, udara, maupun tanah atau lingkungan permukiman baik itu berupa limbah padat, limbah cair, maupun limbah gas.

Dari hasil pengukuran untuk tujuan mewujudkan infrastruktur dasar yang berwawasan lingkungan dengan 1 (satu) indikator indeks infrastruktur wilayah mantap berwawasan lingkungan dengan capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 101,99% atau kategori “Sangat Baik”. Tujuan ini dicapai dengan 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 indikator dengan pengukuran sebagaimana tabel berikut.

Pengukuran Kinerja Tujuan 2
Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian 2023	Capaian 2024			Target Akhir RPJMD	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	Angka	100,52	81,36	82,98	101,99	81,36	101,99
2.	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	%	104,51	83,89	87,51	104	83,89	104



3.	Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak	%	100	79,15	85,30	107	79,15	107
4.	Rasio Konektivitas Kabupaten	Angka	98,63	80,5	79,3	98,5	75,5	105
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	120,4	65,83	61,94	94,09	55,83	110,9
Rata-rata capaian tujuan 2			104,8			101,1		105,7

Dari di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tujuan mewujudkan infrastruktur dasar yang berwawasan lingkungan yang diukur dengan 5 indikator sasaran rata-rata tercapai sebesar 101,1% atau kategori “Sangat Baik”, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019-2024 sudah mencapai 105,7%.

Capaian indikator indeks infrastruktur wilayah mantap berwawasan lingkungan melebihi target realisasi tahun 2024 sebesar 82,98 dengan capaian sebesar 101,99% dari target tahun 2023 sebesar 81,36. Pada Tahun 2024 dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang berwawasan lingkungan mencapai keberhasilan didukung oleh 3 sasaran dengan 4 indikator dimana terdapat 2 (dua) indikator yang mencapai realisasi lebih dari 100% seperti Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap Persentase; dan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak. Pada indikator rasio konektivitas Kabupaten Tegal dan indeks lingkungan hidup pada tahun 2024 belum mencapai target kinerja namun, realisasi capaian tersebut telah melebihi target akhir RPJMD 2019-2024 dengan kategori “Sangat Baik” .

Dalam mewujudkan tujuan meningkatnya infrastruktur dasar berwawasan lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya dengan Menerapkan prinsip-prinsip *Quality Infrastructure Investment (QII)*; *Green Infrastructure* dan *Circular Economy Infrastructure*.

Capaian kinerja meningkatnya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap dan permukiman yang mantap dengan didukung 2 (dua) indikator yaitu persentase infrastruktur pekerjaan umum yang mantap dan persentase infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang layak dengan masing-masing capaian kinerja sebesar 104% atau kategori “Sangat Baik” dan 107% atau kategori “Sangat Baik”. Capaian ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal dalam membangun infrastruktur yang andal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Tegal.



Dalam mewujudkan Meningkatnya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap, Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen berupaya diantara lain:

1. Meningkatkan kolaborasi yang melibatkan banyak pihak dalam penyediaan PSU untuk kawasan kumuh yaitu DPUPR, PDAM dan PLN terutama dalam menangani penyediaan air minum, penanganan limbah dan penyediaan listrik;
2. Meningkatkan kolaborasi DPUPR dan BPBD dalam penanganan pemberian bantuan pada korban bencana agar dapat segera dipenuhi; dan
3. Proses pemberian rekomendasi ijin perumahan bagi pengembang yang diawasi dengan melengkapi persyaratan.

Sasaran kinerja meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan didukung oleh 1 (satu) indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja sebesar 98,5% atau kategori "Sangat Tinggi". Capaian ini belum melampau target kinerja yang telah ditetapkan tahun 2024, namun bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019-2024 capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 110,94%. Meskipun tergolong dalam kategori "Sangat tinggi", status lingkungan hidup di Kabupaten Tegal masih berada dalam kondisi "sedang." Ini menunjukkan bahwa lingkungan di daerah Kabupaten Tegal telah memenuhi kriteria lingkungan yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1).

Dalam Mewujudkan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yang diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan.
2. Mendorong program strategis yang diterapkan untuk meningkatkan tiga indikator utama pendukung IKLH, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
3. Mendorong program rehabilitasi lahan dan penanaman pohon untuk meningkatkan kembali kualitas tutupan lahan.

Sasaran strategis ini dilaksanakan melalui program :

- 1) Program Lingkungannya Pengelolaan Sumber Daya Air;



- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
 - 4) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
 - 5) Program Penataan Bangunan Gedung;
 - 6) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - 7) Program Penyelenggaraan Jalan;
 - 8) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - 9) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
 - 10) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
 - 11) Program Penataan Desa;
 - 12) Program Peningkatan Kerja sama Desa;
 - 13) Program Pengembangan Perumahan;
 - 14) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
 - 15) Program Kawasan Permukiman;
 - 16) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan
 - 17) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Haji.
- 3) Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata

Strategi dalam mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata Pemerintah Kabupaten Tegal menekankan pada komponen utama dengan tetap menekankan pada aspek keberlanjutan yaitu komponen Percepatan transformasi dan hilirisasi sektor pertanian dan ketahanan pangan berkelanjutan; Pemulihan dan hilirisasi Industri Lokal dan Iklim investasi berkelanjutan; Pemulihan dan pengembangan Kolaborasi usaha pariwisata era tatanan baru berkelanjutan; dan Percepatan transformasi Perdagangan, Koperasi dan UKM Era tatanan baru berkelanjutan.

Pertanian menjadi salah satu sektor basis di Kabupaten Tegal, namun sektor ini belum mampu memberikan kesejahteraan pada petani. Oleh karena itu transformasi dan hilirisasi sektor pertanian menjadi poin penting. Aspek transformasi menekankan pada efektivitas dan produktivitas pertanian. Transformasi ini tidak hanya sebatas mekanisasi (alat) namun juga cara/teknik yang produktif dan ramah lingkungan. Industri merupakan



sektor yang cukup parah terdampak *covid-19* di Kabupaten Tegal. Dengan pemulihan sektor industri yang merupakan sektor basis dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Kabupaten Tegal. Pemulihan dilakukan melalui serangkaian fasilitasi / stimulus usaha industri dari industri skala kecil hingga industri skala besar. Dalam kondisi sektor pariwisata yang sedang tertekan akibat Covid-19, maka berbagai usaha pariwisata perlu dipulihkan. Pariwisata bisa pulih jika kunjungan wisatawan mulai normal bahkan meningkat. Untuk itu daya tarik wisata harus ditingkatkan melalui pengembangan obyek dan destinasi wisata yang telah ada maupun menciptakan obyek dan destinasi wisata baru, pemasaran daya tarik obyek dan destinasi wisata yang lebih efektif, serta mengembangkan pariwisata kreatif. Sektor Perdagangan dan UKM merupakan sektor yang cukup terimbas dampak *covid-19* di Kabupaten Tegal. Dengan segala pembatasan sosial yang ada telah merusak jejaring *supply* dan *demand* seluruh aktivitas perdagangan dan UKM di Kabupaten Tegal. Rusaknya jejaring tersebutlah yang kemudian merusak rantai produksi hingga pemasaran pada setiap aktivitas perdagangan dan UKM yang ada.

Dari hasil pengukuran untuk tujuan mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata dengan 1 (satu) indikator Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 95,5% atau kategori “Sangat Baik”. Tujuan ini dicapai dengan 4 (empat) sasaran strategis dan 4 indikator dengan pengukuran sebagaimana tabel berikut:

Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata

No.	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian 2023	Capaian 2024			Target Akhir RPJMD	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	100	5,2-5,5	4,97	95,5	4,9	101,4
2.	Laju PDRB Sektor Pertanian	%	0	2,95-3,35	0,29	9,8	3,23	8,9
3.	Laju PDRB Sektor Industri	%	138,59	3,75-5,23	3,87	100	3,78	134,9
4.	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap	%	593,53	12,5	4,91	39,28	2,33	210,7



	PAD Kabupaten							
5.	Laju PDRB Sektor Perdagangan	%	128,82	4,5- 5,65	6,62	117	4,56	145,17
Rata-rata capaian tujuan 3			192			70,3		120.2

Berdasarkan data Tahun 2024 bersumber BPS, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal sebesar 4,97% lebih rendah bila di dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 5,1% dan lebih besar dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,95% tentunya hasil ini cukup baik. Pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional terjadi karena adanya nilai ekspor yang menurun secara nasional yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal dan fenomena El Nino yang berkepanjangan yang berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Tegal.

Sasaran kinerja Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian dengan didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu Laju PDRB Sektor Pertanian dengan capaian kinerja sebesar 9,8% atau kategori “Sangat Rendah”. Sejak tahun 2019, laju PDRB sektor pertanian mengalami tren negatif, hal tersebut berpengaruh akibat badai el nino, yang menyebabkan kurangnya curah hujan di Kabupaten Tegal. Pada saat itu kebutuhan air irigasi kurang mencukupi dan berkembangnya beberapa OPT yang menyebabkan gagal panen. Gambaran ini menunjukkan bahwa ketergantungan iklim menjadi faktor dominan di sektor pertanian.

Dalam mewujudkan Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di antara lain :

1. Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan ternak dengan memberikan penyuluhan dan pengobatan terhadap hewan ternak untuk menangani penyakit mulut dan kuku (PMK);
2. Menjaga produktivitas tanaman Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan; dan
3. Meningkatkan kompetensi penyuluh swadaya untuk wilayah binaan desa dan melayani kelompok-kelompok tani secara ideal.

Sasaran kinerja Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan dengan didukung 1 (satu) indikator yaitu Laju PDRB Sektor Industri dengan capaian kinerja sebesar 100% atau kategori “Sangat Tinggi”. Capaian kinerja tahun ini bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019-2024 sebesar 134,9% atau kategori “Sangat Tinggi”. Peningkatan laju PDRB sektor industri di Kabupaten Tegal dapat



disebabkan oleh beberapa faktor penting. Pertumbuhan investasi di sektor industri lokal, seperti pengembangan infrastruktur dan teknologi, mendorong kapasitas produksi yang lebih besar. Peningkatan permintaan produk industri, baik dari pasar lokal maupun nasional, turut mempercepat laju pertumbuhan.

Dalam mewujudkan Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya mencapai target diantaranya yaitu:

1. Peningkatan Pendampingan dan Pembinaan terhadap Komoditas Industri Unggulan yang mandiri dan berdaya saing; dan
2. Tersedianya wilayah Industri yang ditujukan untuk berkembangnya kegiatan industri dengan akses infrastruktur industri dan penunjang yang disediakan pemerintah, infrastruktur tersebut meliputi jaringan energi dan listrik, sumber daya air dan pasokan bahan baku, sanitasi dan transportasi.

Sasaran Meningkatnya Produktivitas Pariwisata dengan didukung 1 (satu) indikator yaitu rasio PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten dengan capaian kinerja sebesar 39,28% atau kategori “Sangat Rendah”. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan antara target yang diharapkan dengan kondisi nyata di lapangan, namun capaian kinerja tahun ini bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019-2024 sebesar 210,7% atau kategori “Sangat Tinggi”. Capaian ini di dapat dari wisata unggulan di Kabupaten Tegal yaitu wisata air panas Guci, selain menawarkan pemandian air panas di wisata Guci terdapat banyak wahana rekreasi keluarga milik swasta yang menawarkan aneka daya tariknya seperti Guci Forest, Golden Park, Taman The Geong, Baron Hill, Guciku, Rindu Alam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, sejumlah event seni budaya pun kerap digelar di sini seperti sedekah bumi Guci, coffee expo hingga event olahraga untuk mempromosikan wisata.

Dalam mewujudkan Meningkatnya Produktivitas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:

1. Penggunaan etiketing retribusi secara konsisten dengan tambahan fasilitas *cashless payment* (non tunai) di Wisata Unggulan;
2. Pembentukan tim KPSN Guci, pengembangan DTW Guci dari aspek potensi sumber daya alam, budaya dan buatan, perbaikan sarana dan prasarana pariwisata, penyiapan rencana investasi Guci, pemberdayaan masyarakat;



3. Meningkatkan promosi pariwisata melalui media sosial, website, dan aplikasi wisata; dan
4. Mempermudah akses perizinan untuk investor pariwisata.

Sasaran Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan dengan didukung 1 (satu) indikator yaitu laju PDRB Sektor Perdagangan dengan capaian kinerja sebesar 117% atau kategori “Sangat Tinggi” dan capaian sebesar 145,17% atau kategori “Sangat Tinggi” bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019-2024. Beberapa hal yang mendukung capaian pada tahun 2024, diantaranya adalah perekonomian yang semakin pulih dan bangkit pasca pandemik covid pada tahun 2020 – 2021. Kondisi pulihnya perekonomian ditandai dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dan daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dan daya beli maka akan berpengaruh positif pada peningkatan PDRB khususnya di sektor Perdagangan.

Dalam mewujudkan Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yang diantaranya yaitu:

1. Melakukan Pemantauan Harga dan Stok Bapokting agar inflasi dapat dikendalikan;
2. Dalam hal penyediaan Sarana Perdagangan yang layak, sejak tahun 2023 telah dilakukan rehab/pemeliharaan Pasar dengan capaian tingkat rehab sebesar 100%;dan
3. Meningkatkan Pembinaan Perdagangan Agar Tertib Niaga.

Sasaran strategis ini dilaksanakan melalui program :

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- 2) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 3) Program Pengawasan Perikanan Budidaya;
- 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- 5) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 7) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- 8) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat;
- 9) Program Penyuluhan Pertanian;
- 10) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 11) Program Pengawasan Keamanan Pangan



- 12) Program perencanaan dan pembangunan industri Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota
- 13) Program pengelolaan sistem informasi industri Nasional
- 14) Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
- 15) Program pemasaran pariwisata
- 16) Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 17) Program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
- 18) Program standardisasi dan perlindungan konsumen;
- 19) Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- 20) Program perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- 21) Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- 22) Program pendidikan dan latihan perkoperasian;
- 23) Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);dan
- 24) Program pengembangan UMKM.

4) Sumber daya Manusia yang Berkualitas

Strategi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di Pemerintah Kabupaten Tegal selama periode P-RPJMD 2019-2024 yaitu menekankan pada 4 (empat) komponen utama yaitu komponen Penguatan mutu dan transformasi pendidikan era tatanan baru; Penguatan mutu dan transformasi layanan kesehatan era tatanan baru; Percepatan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup keluarga berencana; dan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Wirausaha Muda dan Olahraga.

Pendidikan menjadi kunci kualitas SDM. Tenaga pendidikan dan kependidikan harus kompeten dan mampu menjamin mutu pendidikan baik sistem tatap muka maupun non-tatap muka; Protokol kesehatan akan menjadi syarat berlangsungnya belajar mengajar dalam situasi apa pun; Seluruh peserta didik harus dapat mengakses layanan pendidikan khususnya dalam format non-tatap muka; Sistem pembelajaran non-tatap muka harus menjadi salah satu opsi konsep yang baku, bukan hanya konsep sementara; Sarana dan prasarana pendukung transformasi pendidikan harus terpenuhi secara bertahap.

Pandemi *covid-19* di Kabupaten Tegal dapat mencerminkan kesiapan sektor kesehatan dalam menghadapi wabah. Untuk itu mutu standar



pelayanan kesehatan harus ditingkatkan. Protokol kesehatan harus wajib diberlakukan di setiap layanan fasilitas kesehatan. Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan harus terus ditingkatkan. Hal yang tidak kalah penting, transformasi layanan digital kesehatan harus mulai dikembangkan di Kabupaten Tegal. Saat era digital sekarang ini, komunikasi dan konsultasi pasien dan dokter tidak boleh terbatas oleh ruang bahkan waktu. Untuk itu layanan kesehatan online harus menjadi salah satu penekanan strategi sektor kesehatan kedepan.

Ukuran keadilan saat ini mulai berkembang dan mengarah berdasarkan gender. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan di Kabupaten Tegal. Untuk mendukung akselerasi pengarusutamaan gender, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender. Untuk melaksanakan hal tersebut maka ada beberapa hal yang perlu dikuatkan terlebih dahulu antara lain ketersediaan data perencanaan yang terpilah gender dan kelembagaan yang khususnya meliputi organisasi hingga sumber daya manusianya.

Dampak wabah pandemi yang sempat terjadi mengakibatkan banyak tenaga kerja asal Kabupaten Tegal di PHK. Untuk itu langkah awal yang harus dilakukan ialah untuk memunculkan minat wirausaha masyarakat terutama yang terdampak *covid-19*. Jika minat wirausaha sudah berkembang kemudian dilanjutkan dengan fasilitasi dan pendampingan mulai dari permodalan, pelatihan dan pemasaran. Wirausaha yang terbentuk harus tetap didampingi hingga produktif dan mandiri. Selain itu sebagai pendukung penciptaan produktivitas pemuda dan kesehatan masyarakat, maka pembudayaan olah raga di masyarakat perlu diwujudkan dengan dukungan berbagai sarana dan prasarana pendukungnya.

Pencapaian tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran strategis antara lain (1) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan; (2) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat; dan (3) Meningkatnya produktivitas pemuda dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, dengan hasil pengukuran sebagaimana pada tabel berikut.



Pengukuran Kinerja Tujuan 4
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

No.	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian 2023	Capaian 2024			Target Akhir RPJMD	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	IPM (indeks Pembangunan Masyarakat)	Angka	101,41	71	71,7	100,9	70,83	101,2
2.	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	%	99,25	88,5	88,64*	100,16	87,21	101,6
3.	Indeks Pendidikan	Angka	100	0,60	0,61	101	0,560	108,9
4.	Indeks Kesehatan	Angka	105,9	0,804	0,835	103	0,804	103,8
5.	Wirausaha Pemula Berbasis Kinerja Bisnis	Orang	115,4	600	677	112	600	112
Rata-rata capaian tujuan 4			104,3			103,4		105,5

Dari di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tujuan membangun sumber daya manusia yang berkualitas yang diukur dengan 3 indikator sasaran rata-rata tercapai sebesar 103,4% atau kategori “Sangat Baik”, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah mencapai 105,5%.

Dalam periode tahun 2020-2024, pembangunan manusia di Kabupaten Tegal terus mengalami kemajuan. IPM Kabupaten Tegal meningkat dari 69,28 pada tahun 2020 menjadi 71,40 pada tahun 2024. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Tegal rata-rata tumbuh sebesar 0,86 persen per tahun, lebih cepat dibandingkan rata-rata pertumbuhan IPM Jawa Tengah sebesar 0,69 persen dan Nasional sebesar 0,75. Peningkatan IPM Kabupaten Tegal semakin meningkat pada tahun 2024 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi dan kesehatan yang berpengaruh positif terhadap indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan serta Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH).

Dalam mewujudkan tujuan membangun sumber daya manusia yang berkualitas Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yang diantaranya yaitu:

1. Program dari Dinas Pendidikan “Yuk Sekolah Maning” yang berdampak terhadap menurunnya angka putus sekolah



2. Program Rames Saceting (Rame-rame Sakabehe ASN Cegah Stunting) yang merupakan gerakan iuran ASN untuk membantu program penanggulangan stunting dengan nominal iuran seikhlasnya yang terbukti menurunkan angka stunting di Kabupaten Tegal.
3. program 'One Day One Endog' (satu hari satu telur), merupakan program yang konsisten memberikan satu butir telur setiap hari selama tiga bulan, para kepada baduta. Program ini diprakarsai Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Slawi dan sudah mampu mengintervensi 345 baduta.
4. Program pendirian Rumah Pelita oleh pemerintah desa. Rumah Pelita didirikan guna mengelola PMT dari dana desa dengan memodifikasi variasi tampilan PMT dan kebutuhan nutrisi PMT.
5. Pemkab Tegal melalui tim percepatan penurunan stunting (TPPS) di berbagai tingkatan tengah menjalankan aksi bersama intervensi serentak pencegahan stunting dengan melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi dan intervensi bagi seluruh calon pengantin, ibu hamil dan balita secara berkelanjutan.
6. Program Wirausaha Pemuda yang membantu para UMKM di Kabupaten Tegal untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Capaian kenaikan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tegal tentunya tak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh segenap komponen yang ada di Kabupaten Tegal sehingga indeks pembangunan gender juga meningkat, upaya yang dilakukan untuk merealisasikan target IPG di antaranya melalui kebijakan yang memberikan kemudahan dalam mengakses pendidikan, kesehatan serta kesempatan untuk memperoleh standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita. Beberapa upaya tersebut antara lain : Pelatihan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak (FPRA), Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), Pelatihan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Sosialisasi Bagi Lembaga Pendidikan Dengan Pelayanan Ramah Anak yang terdiri dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Yayasan Difabel, TPA dan SMP dengan basis Pondok Pesantren, Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, dan Pembukaan atau Launching Sekolah Perempuan "RAIH ASA".

Capaian Indeks Pendidikan pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang mempresentasikan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata



Lama Sekolah (RLS) yang ikut meningkat. Capaian Indikator Kinerja rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 adalah 7,36 dan bila dibandingkan target yang telah ditentukan pada tahun 2024 yaitu sebesar 7,34 maka memperoleh presentasi capaian 100,27% dengan kategori sangat tinggi sehingga dapat disimpulkan tingkat kemajuan untuk rata-rata lama sekolah dapat tercapai. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan capaian rata-rata lama sekolah tahun 2024 sudah dapat pula mencapai angka target pada akhir periode RPJMD dimana tercatat sebesar 7,34 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 100,27%.

**Perbandingan Capaian Kinerja Pendukung
Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan 2022-2024**

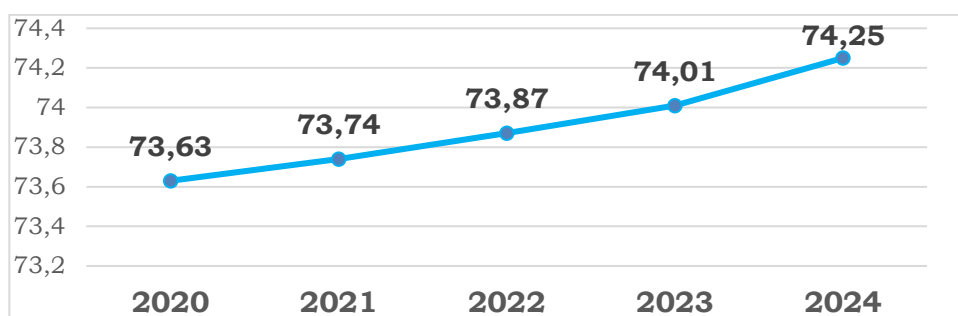
No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024	% Capaian 2023	% Capaian 2022
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,34	7,36	100,27	104,11
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92	12,96	100,31	101,25
Rata-rata Capaian Kinerja Pendukung Sasaran				100,29	102,68	102,27

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan dengan didukung 1 (satu) indikator (indeks kesehatan). Capaian Indeks Kesehatan pada tahun 2024 yaitu 0,835, lebih tinggi dari capaian tahun 2023 yaitu sebesar 0,831. Capaian Indeks kesehatan Kabupaten Tegal tahun 2024 telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 0,804. Indikator yang dapat menggambarkan derajat kesehatan suatu wilayah adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA), serta peningkatan capaian pelayanan kesehatan masyarakat lainnya. Upaya yang telah dilakukan Kabupaten Tegal untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di antara lain : pelayanan antenatal (periksa kehamilan), kelas ibu hamil, persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, rujukan ibu bersalin, dan promosi kesehatan ibu hamil dan bersalin, selanjutnya untuk kelengkapan sarana prasarana antara lain Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti *call center* penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), pengadaan ambulans



bagi puskesmas, data ibu hamil yang terintegrasi, puskesmas mampu persalinan, konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan KB Pasca Persalinan, Penyediaan Buku KIA, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK, pemberian TTD (Tablet Tambah Darah), pengadaan alat kesehatan, obat puskesmas mampu persalinan dan PONED.

Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Tegal 2020-2024



Capaian kinerja meningkatkan produktivitas pemuda dengan didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja utama Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja Bisnis. *Capaian Kinerja Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja Bisnis* Pada tahun ini, target ditetapkan sebesar 600 orang. Namun, hasil yang tercatat melebihi target tersebut dengan realisasi mencapai 677 orang. Dengan demikian, capaian ini menghasilkan persentase sebesar 112,83% dari target yang telah ditetapkan dengan kategori *Sangat Tinggi*. Keberhasilan ini menunjukkan adanya antusiasme dan minat yang tinggi di kalangan generasi muda untuk memulai usaha berbasis bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, ini juga mencerminkan keberhasilan program dan kebijakan yang telah diterapkan untuk mendorong kewirausahaan di kalangan pemuda. Capaian lebih dari target ini menunjukkan bahwa berbagai inisiatif yang dilaksanakan, seperti pelatihan, pendampingan, dan akses ke sumber daya untuk memulai bisnis, telah memberikan dampak positif yang signifikan. Ke depannya, pencapaian ini diharapkan dapat mendorong semakin banyak wirausaha muda untuk berkembang lebih jauh, memperkuat sektor ekonomi lokal, dan menciptakan lapangan kerja baru. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, perlu terus dioptimalkan dukungan terhadap wirausaha muda melalui pembinaan yang berkelanjutan serta memperluas akses pasar dan pembiayaan yang dapat mendukung kelangsungan usaha mereka.



Sasaran strategis ini dilaksanakan melalui program :

- 1) Program pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program pengembangan kurikulum;
- 3) Program pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4) Program pembinaan perpustakaan;
- 5) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- 6) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- 7) Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
- 8) Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan;
- 9) Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan; dan
- 10) Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

5) Laju Kemiskinan di Kabupaten Tegal yang semakin menurun

Pada tahun 2024 secara persentase penduduk miskin di Kabupaten Tegal mengalami penurunan yaitu 7,30 persen pada tahun 2023 menjadi 6,81 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal berkurang sebanyak 7,01 ribu orang yaitu dari 105,03 ribu orang pada tahun 2023 menjadi 98,02 ribu orang pada tahun 2024. Garis Kemiskinan Kabupaten Tegal pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 497.315 per kapita per bulan, angka ini naik 5,65 persen lebih tinggi dari garis kemiskinan tahun 2023 yang mencapai Rp 470.728 per kapita per bulan. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap Tingkat kemiskinan Kabupaten Tegal tahun 2024 adalah ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2023 tumbuh positif sebesar 4,93 persen. Sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Tegal sebesar 36,40 persen, dengan laju pertumbuhan 5,10 persen. Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada Maret 2024 sebesar -0,8 persen, lebih tinggi dibandingkan IPH pada Maret 2023 sebesar -2,32 persen. Andil komoditi dalam IPH Maret 2024 adalah beras, cabai merah dan telur ayam. UMK Kabupaten Tegal Tahun 2024 diketahui mengalami kenaikan berkisar Rp 84.924. Sehingga kini di tahun 2024 menjadi Rp 2.191.161,- per bulan. Implementasi kebijakan instrumen insentif dan kemudahan berusaha di Kabupaten Tegal ini tidak terlepas dari kerja sama banyak pihak dalam membangun kepercayaan investor, baik dalam hal penciptaan kondusifitas wilayah maupun pelayanan perizinan investasi dan usaha yang baik.

Indeks kedalaman kemiskinan, Kabupaten Tegal menunjukkan tren



fluktuatif dengan penurunan yang konsisten dari tahun 2020 sebesar 1,08 hingga tahun 2023 sebesar 0,88, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 0,97. Kenaikan pada tahun 2024 mengindikasikan perlunya perhatian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kedalaman kemiskinan, seperti ketahanan ekonomi lokal dan intervensi program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Dari angka Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Tegal cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin besar. Ada penurunan kesejahteraan pada masyarakat dengan kategori miskin di Kabupaten Tegal.

Indeks keparahan kemiskinan, Kabupaten Tegal menunjukkan tren yang relatif stabil pada kisaran nilai rendah dari tahun 2020 hingga 2023, yaitu 0,19 (2020-2021) dan 0,17 (2022-2023). Namun, pada tahun 2024, terdapat kenaikan menjadi 0,22. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat termiskin di Kabupaten Tegal mengalami kesulitan yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun nilainya masih jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, tren kenaikan ini memerlukan perhatian lebih, terutama pada faktor-faktor yang memengaruhi kondisi masyarakat termiskin, seperti akses terhadap layanan dasar, keberlanjutan pendapatan, dan efektivitas intervensi pengentasan kemiskinan. Upaya strategis diperlukan untuk mencegah keparahan kemiskinan lebih lanjut dan memastikan bahwa program sosial dan ekonomi menjangkau masyarakat yang paling rentan.

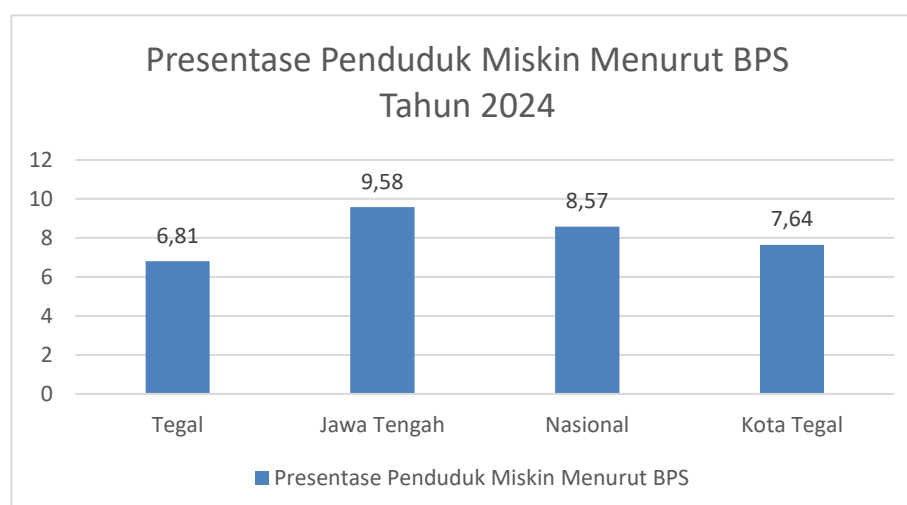
Tujuan menekan laju kemiskinan di Kabupaten Tegal diukur ketercapaiannya melalui 1 (satu) indikator tujuan persentase penduduk miskin dengan capaian kinerja sebesar 101% dan didukung dengan 2 (dua) indikator sasaran strategis untuk mencapai tujuan menekan laju kemiskinan yaitu Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahannya kemiskinan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 47,82% dengan kategori “Sangat Rendah”.

Capaian Tujuan dan Sasaran 5 Misi 4

NO.	INDIKATOR IKU	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Penduduk Miskin	%	8,14	8,6	7,9	7,3	6,81
2.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	%	1,08	1,0	0,95	0,88	0,97
3.	Indeks Keparahannya Kemiskinan	%	0,19	0,19	0,17	0,17	0,22



Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2024



Dalam mewujudkan tujuan Menekan Laju Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yang diantaranya yaitu:

1. komitmen kepemimpinan dan kerja berkolaborasi pada implementasi program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan dan program bantuan sosial lainnya.
2. Program rehab rumah tidak layak huni (RTLH) yang menyasar kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Sepanjang lima tahun periode pemerintahan, sedikitnya 6.375 RTLH berhasil dipugar dengan indeks bantuan pembangunan Rp20 juta per unit rumahnya.
3. Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan cara pemberdayaan bantuan keluarga.
4. Menyelenggarakan ekspo yang digagas oleh Dinas Tenaga Kerja dengan mengundang perusahaan dalam dan luar negeri, untuk menyampaikan program-programnya dan kebutuhan tenaga kerjanya untuk mengurangi angka pengangguran.

Misi 4 Tujuan 5 dan Sasaran strategis ini dilaksanakan melalui program :

- 1) Program Pemberdayaan Sosial;
- 2) Program Rehabilitasi Sosial;
- 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
- 5) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
- 6) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 7) Program Penempatan Tenaga Kerja;
- 8) Program Hubungan Industrial;



- 9) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- 10) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 11) Program Promosi Penanaman Modal;
- 12) Program Pelayanan Penanaman Modal;
- 13) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- 14) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

6) Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat

Dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama yaitu persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan. Capaian kinerja tujuan meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2024 sebesar 92,98 atau 102,55 % dari target tahun 2024 dengan kategori "Sangat Tinggi". Untuk realisasi capaian kinerja Tegal tahun 2024 sebesar 92,98 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 90,66 sehingga sudah melampaui target akhir. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tegal harus terus meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Capaian Kinerja Tujuan 6

Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Umum

No.	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian 2023	Capaian 2024			Target Akhir RPJMD	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	%	100,81	92,58	102,55	90,66	102,55	90,66
2.	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	%	100,81	90,66	93,38	103	90,66	103
Rata-rata capaian tujuan 6			100,81			96,83		96,83

Capaian kenaikan cakupan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum ini tentunya tak lepas dari salah satu upaya menjaga ketenteraman



dan ketertiban umum Satpol PP melakukan kegiatan patroli siaga di seluruh wilayah Kabupaten Tegal, yang menjadi sasaran patroli yaitu tempat keramaian, hiburan malam, PGOT dan PKL yang berjualan di sepanjang bahu jalan, sesuai SPM patroli dilaksanakan tiga kali dalam sehari namun baru dilaksanakan dua kali dalam sehari.

Penegakan Perundang-undangan Daerah dilaksanakan agar jumlah pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal akan semakin menurun. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati guna terpeliharanya ketenteraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor terkait.

Untuk penyelesaian Penegakan Perda dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan yang signifikan, namun tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebesar 85,71%. Hal ini perlu penanganan yang lebih intensif dan kerja sama yang baik sehingga penanganan pelanggaran Perda semakin meningkat. Kurangnya dukungan tenaga PPNS dan anggaran untuk penegakan Perda secara pro yustisi sangat mempengaruhi penyelesaian Penegakan Perda. Perda yang ditegakkan di tahun 2022. Namun pada tahun 2023 telah dilaksanakan Diklat PPNS bagi 3 (tiga) anggota Satpol PP Kabupaten Tegal sehingga Penegakan Perda mengalami peningkatan yaitu sebesar 92,16%. Perda yang ditegakkan antara lain Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, dan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032.

Pelanggaran Peraturan Daerah yang Ditindak Lanjuti 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penegakan Perda					
a	Jumlah Pelanggaran Perda	129	529	525	421	302
b	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	107	485	450	388	282
c	Penyelesaian Penegakan Perda (%)	83	91,68	85,71	92,16	93,38
2.	Penegakan K3					
a	Jumlah Pelanggaran K3	1669	1667	1662	1100	353
b	Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	1604	1608	1600	1068	343
c	Penyelesaian Penegakan K3 (%)	96	96,46	96,27	97,09	97,16



No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3.	SPM Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran strategis ini dilaksanakan melalui program :

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;¹
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 4) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 6) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
- 7) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

7) Menurunnya Risiko Bencana di Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal mempunyai potensi bencana yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Risiko kebakaran, tanah longsor, banjir, gempa, gunung merapi, kekeringan menjadi jenis bencana yang cukup serius jika tidak diantisipasi. Mitigasi risiko bencana Kabupaten Tegal harus dilakukan sedini mungkin. Bersamaan dengan itu kualitas penanggulangan bencana harus ditingkatkan. Respon dan penanganan saat terjadi bencana maupun pasca bencana juga harus ditingkatkan kualitasnya. Untuk itu peran serta masyarakat dibarengi dengan peningkatan kapasitas relawan terlatih dalam penyelenggaraan kebencanaan menjadi salah satu kunci penting keberhasilan selain kerja sama yang baik antara BPNB, BPBD Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Sekitar dengan mengoptimalkan akses sumber daya yang ada. Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana pendukung menjadi syarat utama yang mendukung kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana di Kabupaten Tegal.

Untuk mengurangi risiko bencana tersebut Kabupaten memiliki Tujuan Menurunnya Risiko Bencana dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2024 sebesar 133,89% atau dengan kategori Sangat Tinggi. Realisasi Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Tegal tahun 2024 sebesar 113,79 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 172,12



sehingga telah melampaui target akhir.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja
Tujuan Menurunnya Risiko Bencana

No.	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian 2023	Capaian 2024			Target Akhir RPJMD	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Risiko Bencana	Angka	127,69	172,12	113,79	133,89	171,84	133,7
2.	Indeks Kapasitas Daerah	Angka	93,75	0,89	0,81	91,01	0,9	90
Rata-rata capaian tujuan 7			110,72			112,45		111,85

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan menurunnya risiko bencana dengan 2 indikator sasaran rata-rata tercapai sebesar 112,45 atau kategori “Sangat Baik” apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 terdapat peningkatan 1,73%.

Dalam mewujudkan Menurunnya Risiko Bencana Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yang diantaranya yaitu:

1. Pengukuhan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) melalui Keputusan Bupati Tegal Nomor 300.2/950 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Tegal yang melibatkan unsur pentahelix;
2. Pembaharuan aplikasi TITIR CETAR yaitu sistem informasi berbasis elektronik yang menampilkan data dan informasi kebencanaan;
3. Peningkatan kapasitas TRC Penanggulangan Bencana dan pelatihan kepada aparatur di kawasan rawan bencana;
4. Peningkatan sistem peringatan dini bencana melalui pengadaan *Early Warning System* (EWS) di daerah rawan longsor, pemantauan tinggi muka air, titik api, dan curah hujan; dan
5. Melakukan kaji cepat dan penentuan status tanggap darurat.

Sasaran strategis ini dilaksanakan melalui program :

- 1) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 2) Program Penanggulangan Bencana; dan
- 3) Program Penanganan Bencana.



8) Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan

Kabupaten Tegal mempunyai kekayaan budaya dan kearifan lokal yang harus dilestarikan. Tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, kekayaan budaya dan kearifan lokal juga mampu membendung pengaruh buruk budaya luar yang semakin cepat masuk di era globalisasi dengan kemajuan teknologi saat ini. Untuk itu budaya dan kearifan lokal harus dikenalkan dan diajarkan sejak dini mulai dari lingkungan sekolah. Berbagai ajang seni budaya lokal perlu diselenggarakan untuk lebih mengenalkan budaya dan kearifan lokal dimasyarakat. Untuk itu konsep pelestarian budaya dan kearifan lokal tidak hanya sebatas menyimpan dalam suatu tempat seperti museum, namun lebih dari itu pelestarian budaya dan kearifan lokal harus disimpan dalam setiap diri masyarakat Kabupaten Tegal.

Tujuan 8 ini dicapai melalui 1 (satu) sasaran yaitu meningkatnya pelestarian dan pewarisan kebudayaan serta diukur dengan 1 indikator dengan hasil capaian kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

Pengukuran Kinerja Tujuan 8
Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian 2023	Capaian 2024			Target Akhir RPJMD	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Angka	102,3	73,69	83,93	113,9	73,69	113,8
2.	Persentase Seni dan Kesenian yang Dilestarikan	Angka	110,87	79,45	84,34	106,15	75,5	111,7
Rata-rata capaian tujuan 8			106,585			110,02		112,75

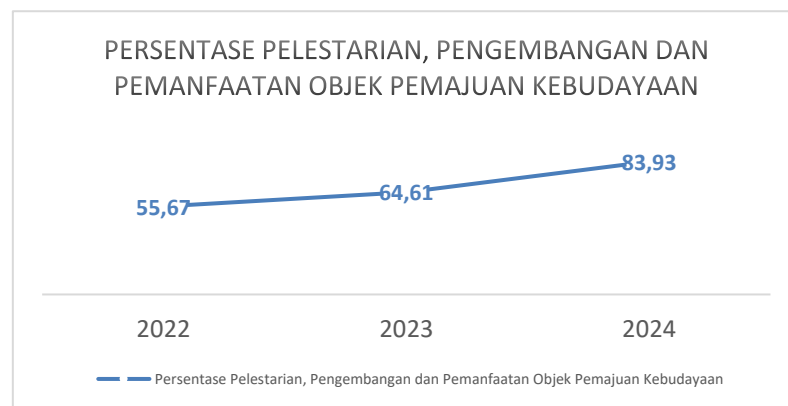
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan meningkatnya pelestarian dan pewarisan kebudayaan yang diukur dengan 2 indikator sasaran rata-rata tercapai sebesar 110,02 atau kategori “Sangat Baik” apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 terdapat peningkatan 3,43% dan sudah melampaui target kinerja RPJMD 2019-2024.

Capaian realisasi kinerja tujuan 8 tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 maka realisasi capaian kinerja terdapat kenaikan



sebesar 19,32%. Hal ini bisa dilihat dari realisasi tahun 2023 yang hanya mencapai 64,61% sedangkan tahun 2024 mencapai 83,93%. Pada tahun 2021 tidak menghitung karena indikator Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan merupakan indikator baru dari RPJMD Perubahan 2019-2024 sehingga target awalnya adalah di tahun 2022. Sedangkan apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 maka ada kenaikan sebesar 28,26% dari 55,67% ke 83,93%.

Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam mewujudkan meningkatnya pelestarian dan pewarisan kebudayaan Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui bidang Kebudayaan untuk terus memelihara dan melestarikan kebudayaan dengan melaksanakan program-program dan kegiatan yang dapat mendukung Pengembangan Kebudayaan, terutama Pengembangan Kesenian Tradisional Kabupaten Tegal.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka perlu banyak peningkatan di masing-masing indikator bidang kebudayaan antara lain dalam hal seni dan kesenian baik pelakunya maupun seni itu sendiri. Hal ini bertujuan agar eksistensi budaya daerah tetap terjaga kelestariannya terutama budaya Kabupaten Tegal.

Festival seni dan rumah budaya sangat strategis untuk memberi ruang bagi pelaku seni dan budaya untuk menampilkan, mengembangkan dan pemajuan daya kritis, kreatif, produktif dan apresiatif terhadap hasil kerja dan temuan karya yang berakar pada nilai budaya masyarakat Kabupaten Tegal. Peningkatan apresiasi seni dan penampilan kesenian daerah terus ditingkatkan frekuensinya.

Sasaran strategis ini dilaksanakan melalui program :



- 1) Program Pengembangan Kebudayaan
- 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- 3) Program Pembinaan Sejarah
- 4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- 5) Program Pengelolaan Permuseuman



BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN

3.1 DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3.2 GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomikan sekalipun kepada daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di Daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.



Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Provinsi adalah penugasan dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). Dana dekonsentrasi pada hakikatnya merupakan bagian anggaran kementerian/ lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan. Sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga yang dialokasikan untuk Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan/atau Desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan



dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Sehingga berdasarkan pola pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, maka yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten / Kota hanyalah pelaporan tugas pembantuan.

3.3 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten Tegal

Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Tegal tidak mendapat Dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat.

3.3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Kabupaten Tegal

Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Tegal tidak mendapat Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar pendidikan yang dikelola oleh kabupaten/kota terdiri dari :

1. Pendidikan Dasar Usia Dini
2. Pendidikan Dasar
3. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan yang dikelola kabupaten/kota dengan ketentuan Pendidikan dasar usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 tahun sampai dengan 6 tahun, penerima jenis layanan Pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun dan penerima jenis layanan Pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu warga negara, dengan ketentuan :

1. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini;
2. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar; dan
3. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2. Target Capaian SPM

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						ANGGARAN
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	12 Bulan	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 Tahun	100%	12 Bulan	27.756.855.474
					Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi B	70,83%		
					Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S.1/D.4	74,19%		
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	12 Bulan	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 Tahun	100%	12 Bulan	267.951.109.014
					Kemampuan Literasi SD	58,64%		
					Kemampuan Literasi SMP	71,76%		
					Kemampuan Numerasi SD	41,83%		
					Kemampuan Numerasi SMP	67,85%		
					Iklm Keamanan SD	74,18%		
					Iklm Keamanan SMP	73,9%		



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						ANGGARAN
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
					Iklm Kebinekaan SD	73,67%		
					Iklm Kebinekaan SMP	71,4%		
					Iklm Inklusivitas SD	61,29%		
					Iklm Inklusivitas SMP	61,72%		
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan	100%	12 Bulan	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan	100	12 Bulan	10.901.166.189



4.1.3. Realisasi SPM

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	59.082	58.587	99,16	27.756.855.474	27.294.290.944	98,33
2	Pendidikan Dasar	259.942	254.886	98,05	267.951.109.014	260.394.486.315	97,18
3	Pendidikan Kesetaraan	7.266	6.925	95,31	10.901.166.189	10.614.800.389	97,37
		326.290	320.398	98,19	306.609.130.677	298.303.577.648	97,29

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Pendidikan

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					97.21 %
1 .	Pendidikan Anak Usia Dini					98.33 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.33 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	59082	58587	495	99.16 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	94.98 %
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100	77.12	22.88	77.12 %
	2 . Angka partisipasi murni	%	70.9	67.67	3.23	95.44 %
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	70.83	74.32	-3.49	100.00 %
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	74.19	82.65	-8.46	100.00 %
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	9	9	0	100.00 %
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	12.57	12.57	0	100.00 %
	7 . Indeks distribusi guru	%	0.45	0.37	0.08	82.22 %



	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	34	44.5	-10.5	100.00 %
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	5.29	5.66	-0.37	100.00 %
2 .	Pendidikan Dasar					98.08 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.44 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	259942	254886	5056	98.05 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.64 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	98.18 %
	SD					98.31 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	101.68	-1.68	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	99.54	0.459999999999999	99.54 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	58.64	76.01	-17.37	100.00 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	41.83	64.98	-23.15	100.00 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	100.00 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	100.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	74.18	71.15	3.03	95.92 %
	8 . Indeks iklim kebinekaan	Nilai	73.67	72.62	1.05	98.57 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61.29	54.21	7.08	88.45 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	3.53	12.57	-9.04	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.36	0.35	0.01	97.22 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	35	34.42	0.58	98.34 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0.05	0.05	0	100.00 %
	SMP					98.04 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	108.29	-8.29	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	96.57	3.43	96.57 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	71.76	77.65	-5.89	100.00 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	67.85	72.25	-4.4	100.00 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	100.00 %



	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	100.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	73.9	69.15	4.75	93.57 %
	8 . Indeks iklim kebinekaan	Nilai	71.4	73.01	-1.61	100.00 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61.72	57.17	4.55	92.63 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	3.53	7.94	-4.41	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.33	0.35	-0.02	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	50.25	46.13	4.12	91.80 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0.19	0.19	0	100.00 %
3 .	Pendidikan Kesetaraan					95.22 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76.25 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	7266	6925	341	95.31 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.97 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	94.87 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	95.5	4.5	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	33.34	66.66	33.34 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	51.28	62.18	-10.9	100.00 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	45.94	53.09	-7.15	100.00 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	100.00 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	100.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	62.93	64.19	-1.26	100.00 %
	8 . Indeks iklim kebinekaan	Nilai	59.44	60.27	-0.8300000000000001	100.00 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	48.75	50.34	-1.59	100.00 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100.00 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100.00 %



4.1.4. Alokasi Anggaran SPM

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
	Program Pengelolaan Pendidikan	23.153.400.000	306.609.130.677	
1	Pendidikan Usia Dini	174.366.200.000	27.756.855.474	
2	Pendidikan Dasar	6.831.100.000	267.951.109.014	
3	Pendidikan Kesetaraan		10.901.166.189	
	Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Lainnya		40.605.000.000	
1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		6.905.000.000	
2	Pemerataan Kualitas dan Kuantitas PTK bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF		33.600.000.000	
3	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat		50.000.000	
4	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang penuturannya dalam daerah kabupaten/kota		50.000.000	
			347.214.130.677	

4.1.5. Dukungan Personil

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dalam rangka mendorong pencapaian SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	220
3	Strata 1 / Diploma 4	9.219
4	Diploma 3	230
5	Diploma 2	205
6	Diploma 1	37
7	SMA / MA / Sederajat	733
8	SMP / MTs / Sederajat	142
9	SD / MI / Sederajat	66
	TOTAL	10.852



4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2024

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
I. INTERNAL			
1		Mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan masih rendah	Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Pendidik sehingga mereka mampu untuk mendidik sesuai standar yang diharapkan
2		Mutu pendidikan masih rendah	Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Pendidik dan perbaikan manajemen sekolah
3		Sarana Prasarana kurang/belum mencukupi standar minimal	Pemberian bantuan sarana dan prasarana
4		Jumlah penyebaran pendidik yang tidak merata	Pemerataan serta distribusi Kualitas dan Kuantitas pendidik
II. EKSTERNAL			
1		Jumlah satuan pendidikan masih kurang tetapi untuk izin pendirian TK persyaratannya melibatkan lintas sektor	Mempermudah pemberian ijin pendirian sekolah
2		Angka Drop Out SD dan SMP masih tinggi	Memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan serta menampung mereka yang DO untuk mengikuti program "Yuh Sekolah Maning"
3			Pemberian BOP kepada satuan pendidikan
4		Keberadaan satuan pendidikan yang belum merata	Memberikan kemudahan untuk izin pendirian dan izin operasional

NO	TAHAPAN PENERAPAN SPM	PERMASALAHAN
1.	PENGUMPULAN DATA	Data Anak yang bersekolah diluar kabupaten dan dipondok pesantren tidak terkumpul
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	Perhitungan Indikator yang ada pada Rapor Pendidikan belum keseluruhan tercantum
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Sub Kegiatan yang ada belum secara keseluruhan mencakup penganggaran yang menunjang peningkatan SPM
4.	PELAKSANAAN	Dalam pelaksanaan penginputan data yang diambilkan dari Rapor Pendidikan masih belum mencukupi data sesuai indikator
5.	LAIN - LAIN	Hasil perhitungan pendidikan kesetaraan pada Rapor Pendidikan digabung dengan jenjang pendidikan formal SD/MI/Paket A serta SMP/MTs/Paket B sehingga susah untuk memisahkan yang kesetaraan

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah kabupaten/kota terdiri dari 12 jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh oleh warga negara dilakukan di semua fasilitas pelayanan kesehatan baik fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat:

1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

1. ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita;

5. usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2. Target Capaian SPM

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						ANGGARAN
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	100%	12 Bulan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	20.253	12 Bulan	1.859.930.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	100%	12 Bulan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	20.253	12 Bulan	2.196.513.800
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	100%	12 Bulan	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	20.130	12 Bulan	1.235.204.170
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar dibagi Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	100%	12 Bulan	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar dibagi Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	110.934	12 Bulan	692.800.000



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						ANGGARAN
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama.	100%	12 Bulan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama.	231.175	12 Bulan	796.726.500
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	100%	12 Bulan	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	674.555	12 Bulan	200.000.000
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	100%	12 Bulan	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	148.567	12 Bulan	150.000.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	100%	12 Bulan	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	163.472	12 Bulan	779.820.000



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						ANGGARAN
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	100%	12 Bulan	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	28.455	12 Bulan	2.854.757.100
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	100%	12 Bulan	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	3.225	12 Bulan	50.000.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	100%	12 Bulan	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	33.598	12 Bulan	2.170.189.400
12	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	100%	12 Bulan	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	32.587	12 Bulan	97.725.000



4.2.3. Realisasi SPM Kesehatan

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.253	20.510	101,3	150.000.000	122.410.300	81,6
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	20.253	20.235	99,9	1.261.795.800	1.017.742.400	80,7
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	20.130	20.130	100	854.924.170	769.365.300	90,0
4	Pelayanan Kesehatan Balita	110.934	110.934	100	692.800.000	656.927.000	94,8
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	231.175	231.175	100	149.999.200	107.991.500	72,0
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	674.555	674.555	100	200.000.000	191.442.000	95,7
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	148.567	147.656	99,4	150.000.000	147.151.800	98,1
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	163.472	163.472	100	779.820.000	764.718.300	98,1
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	28.455	28.455	100	445.825.000	401.824.500	90,1
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	3.255	3.255	100	50.000.000	46.965.700	93,9
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	33.598	33.598	100	100.000.000	95.564.800	95,6
12	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV	32.587	32.587	100	75.000.000	62.227.000	83,0



Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					99.22 %	
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						99.96 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	20253	20510	-257	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.96 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	99.82 %	
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	20253	19634	619	96.94 %	
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	3645540	3691800	-46260	100.00 %	
	3 . Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	21990	21990	0	100.00 %	
	4 . Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	29	29	0	100.00 %	
	5 . Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	29	29	0	100.00 %	
	6 . Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urine (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	29	29	0	100.00 %	
	7 . Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	29	29	0	100.00 %	
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	29	29	0	100.00 %	
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	21990	21990	0	100.00 %	
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	29	29	0	100.00 %	
	11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	1466	1466	0	100.00 %	
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	83	83	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	330	330	0	100.00 %	



	(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)						
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	785	785	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	79	79	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	47	47	0	100.00 %	
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	20253	20510	-257	100.00 %	
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						99.94 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.94 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	20253	20239	14	99.93 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Formulir partograf	Formulir	20253	20253	0	100.00 %	
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	20253	20253	0	100.00 %	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	20253	20253	0	100.00 %	
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	29	29	0	100.00 %	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	83	83	0	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	785	785	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	330	330	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	79	79	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	47	47	0	100.00 %	



3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	20130	20130	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	20130	20130	0	100.00 %	
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	20130	20130	0	100.00 %	
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	20130	20130	0	100.00 %	
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	20130	20130	0	100.00 %	
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	20130	20130	0	100.00 %	
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	20130	20130	0	100.00 %	
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	29	29	0	100.00 %	
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	83	83	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	785	785	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	330	330	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	79	79	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	64	64	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	47	47	0	100.00 %	
	14 . Kader Kesehatan	Orang	7457	7457	0	100.00 %	
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	110934	110934	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	



			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM							
1 . Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen		110934	110934	0	100.00 %	
2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir		110934	110934	0	100.00 %	
3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang		110934	110934	0	100.00 %	
4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul		11151	11151	0	100.00 %	
5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul		88632	88632	0	100.00 %	
6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin		19751	19751	0	100.00 %	
7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin		17479	17479	0	100.00 %	
8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin		15509	15509	0	100.00 %	
9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin		16639	16639	0	100.00 %	
10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin		24000	24000	0	100.00 %	
11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin		22506	22506	0	100.00 %	
12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin		23354	23354	0	100.00 %	
13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit		106250	106250	0	100.00 %	
14 . Peralatan Anafilaktik	Paket		29	29	0	100.00 %	
15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket		29	29	0	100.00 %	
16 . Tenaga medis : Dokter	Orang		79	79	0	100.00 %	
17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang		785	785	0	100.00 %	
18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		330	330	0	100.00 %	
19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang		47	47	0	100.00 %	
20 . Guru PAUD	Orang		2439	2439	0	100.00 %	
21 . Kader Kesehatan	Orang		7457	7457	0	100.00 %	
5 . Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar							97.59 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang		231175	231175	0	100.00 %	



PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						17.59 %	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	87.94 %	
1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	231175	15200	215975	6.58 %		
2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	231175	15200	215975	6.58 %		
3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	231175	231175	0	100.00 %		
4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	225958	225958	0	100.00 %		
5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	5217	5217	0	100.00 %		
6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	1740778	1316354	424424	75.62 %		
7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	116	116	0	100.00 %		
8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	28252	26583	1669	94.09 %		
9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	29	29	0	100.00 %		
10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	26697	26697	0	100.00 %		



	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	111	111	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	785	785	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	330	330	0	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	47	47	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	79	79	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	64	64	0	100.00 %	
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	8488	8488	0	100.00 %	
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	7457	7457	0	100.00 %	
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	674555	674555	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	29	29	0	100.00 %	
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	1148	1148	0	100.00 %	
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	1148	1148	0	100.00 %	
	4 . Alat : Glukometer	Unit	2009	2009	0	100.00 %	
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	116	116	0	100.00 %	
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	674555	674555	0	100.00 %	
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	29	29	0	100.00 %	
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	29	29	0	100.00 %	
	9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	29	29	0	100.00 %	
	10 . Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstruktif Kronis/PPOK)	Dokumen	19517	19517	0	100.00 %	
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	87	87	0	100.00 %	



	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	29	29	0	100.00 %	
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	20510	20510	0	100.00 %	
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	79	79	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	785	785	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	330	330	0	100.00 %	
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	47	47	0	100.00 %	
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	64	64	0	100.00 %	
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	7457	7457	0	100.00 %	
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut						98.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		79.51 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	148567	147656	911		99.39 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						18.49 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		92.46 %
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	29	29	0		100.00 %
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	29	29	0		100.00 %
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	29	29	0		100.00 %
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	29	29	0		100.00 %
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	29	29	0		100.00 %
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	148567	2900	145667		1.95 %
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	29	29	0		100.00 %
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	79	79	0		100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	785	785	0		100.00 %



	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	330	330	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	47	47	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	64	64	0	100.00 %	
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1295	1295	0	100.00 %	
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	163472	163472	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	29	29	0	100.00 %	
	2 . Obat Hipertensi	Paket	29	29	0	100.00 %	
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	1148	1148	0	100.00 %	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	163472	163472	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	29	29	0	100.00 %	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	79	79	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	785	785	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	330	330	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	47	47	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	64	64	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	79	79	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	64	64	0	100.00 %	



9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	28455	28455	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	29	29	0	100.00 %	
	2 . Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	2009	2009	0	100.00 %	
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	28455	28455	0	100.00 %	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	28455	28455	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	29	29	0	100.00 %	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	79	79	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	785	785	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	330	330	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	79	79	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	64	64	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	47	47	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	59	59	0	100.00 %	



10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat						95.56 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3225	3225	0		100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						15.56 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		77.78 %
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku	60	60	0		100.00 %
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenis	5	5	0		100.00 %
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	155000	155000	0		100.00 %
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	348	348	0		100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	30	30	0		100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	29	29	0		100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	29	29	0		100.00 %
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	0	0	0		0.00 %
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	0	0	0		0.00 %



11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						99.56 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	33598	33598	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.56 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	97.78 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	40	40	0	100.00 %	
	2 . Reagen Zn TB	Kit	92	92	0	100.00 %	
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	40	40	0	100.00 %	
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	33598	33598	0	100.00 %	
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	26727	26727	0	100.00 %	
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	40	40	0	100.00 %	
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	40	40	0	100.00 %	
	8 . Tuberkulin	Vial	900	600	300	66.67 %	
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	88	88	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	330	330	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	79	79	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	64	64	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	59	59	0	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	24	24	0	100.00 %	
	15 . Kader Kesehatan	Orang	7457	7457	0	100.00 %	
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	



	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	32587	32587	0	100.00 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %		
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	29	29	0	100.00 %		
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	32587	32587	0	100.00 %		
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	29	29	0	100.00 %		
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	29	29	0	100.00 %		
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	87	87	0	100.00 %		
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	785	785	0	100.00 %		
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	330	330	0	100.00 %		
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	59	59	0	100.00 %		
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	64	64	0	100.00 %		
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	10	10	0	100.00 %		



4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	Kesehatan ibu hamil	1.709.930.000	150.000.000	
2	Kesehatan ibu bersalin	934.718.000	1.261.795.800	
3	Kesehatan bayi baru lahir	380.280.000	854.924.170	
4	Kesehatan balita		692.800.000	
5	Kesehatan pada usia pendidikan dasar	646.727.300	149.999.200	
6	Kesehatan usia produktif		200.000.000	
7	Kesehatan usia lanjut		150.000.000	
8	Kesehatan penderita hipertensi		779.820.000	
9	Kesehatan Penderita diabetes melitus	2.408.932.100	445.825.000	
10	Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat		50.000.000	
11	Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	2.070.189.400	100.000.000	
12	Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	22.725.000	75.000.000	

4.2.5. Dukungan Personil

Dalam upaya pemenuhan SPM Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal memiliki jumlah SDM yang tertera pada tabel berikut :

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata 3	0
2	Strata 2	18
3	Strata 1 / Diploma 4	315
4	Diploma 3	1018
5	Diploma 2	0
6	Diploma 1	0
7	SMA / MA / Sederajat	0
8	SMP / MTs / Sederajat	0
9	SD / MI / Sederajat	0
	TOTAL	1.351



4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
I. INTERNAL			
1	Akses ke pelayanan	Akses pelayanan kesehatan mengalami kendala terutama di daerah pegunungan	tersedianya sarana untuk pertolongan persalinan sesuai standar di desa
2	Sarana prasarana	Jumlah sasaran tidak sebanding dengan SDM dan sarana	Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan
		Jumlah bahan habis pakai belum memenuhi semua sasaran	Mengajukan anggaran untuk BHMP lewat dana desa, namun belum semua desa memenuhinya
3	Kesenjangan data	Data pasien yang berkunjung di TPMD dan klinik belum dilaporkan ke Dinas Kesehatan	Penggunaan RME di TPMD dan klinik untuk integrasi data (dashboard satu sehat)
		Jumlah sasaran awal tahun lebih banyak dibandingkan sasaran real	Denominator yang digunakan adalah jumlah sasaran real
4	Pelayanan di fasyankes	Pelaksanaan SDIDTK bagi balita dan anak prasekolah belum optimal	Melakukan pendampingan dan pembinaan
		Kepatuhan pelayanan bayi muda termasuk BBL dengan pendekatan MTBM dan balita sakit dengan pendekatan MTBS belum optimal	Melakukan sosialisasi, orientasi, penguatan, dan pelatihan
II. EKSTERNAL			
1	Kondisi kesehatan ibu hamil	Kehamilan yang berakhir sebelum lengkap diperiksa minimal enam kali (K6)	Pemberian pelayanan Antenatal Care (ANC) sesuai standar
			Skrining Pasangan Usia Subur (PUS) layak hamil
2	Mobilitas penduduk	Mobilitas penduduk termasuk ibu hamil yang tidak melalui K6	Mencatat pelayanan K6 yang sudah didapat oleh ibu hamil
		Ada sebagian masyarakat merantau ke luar kota, padahal sudah menjadi sasaran di awal tahun	Untuk awal tahun 2024 dilakukan pendataan sasaran riil usia (15-59 tahun) <i>by name by address</i> per RT
3	Pemberdayaan Masyarakat	belum optimalnya dukungan multisektor dalam penanganan penyakit menular	melakukan advokasi, pertemuan dan koordinasi
		Belum semua kebijakan kepala sekolah yang mendukung terlaksananya Program UKS/M di semua jenjang pendidikan (TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA)	Advokasi kepada Dinas Pendidikan dan pihak terkait untuk mendapat dukungan kegiatan
4	Kebijakan	belum optimalnya dukungan sumber daya (anggaran, SDM terlatih) dalam penanggulangan penyakit menular	advokasi, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, workshop, OJT
		perubahan juknis skrining PTM	Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan
		Perubahan indikator kinerja program anak	Melakukan sosialisasi, orientasi, penguatan, dan pelatihan
5	Administrasi	Masih ada ODGJ yang belum memiliki NIK	Kerja sama dengan Dukcapil untuk perekaman identitas ODGJ di rumah
6	Perilaku masyarakat terkait kesehatan	masih ada persalinan oleh non tenaga kesehatan (10 kasus dari 15.572 persalinan) karena kepercayaan terhadap dukun yang kuat	mengaktifkan kelas ibu hamil, kerja sama dengan aparat desa dalam sosialisasi pada masyarakat



NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
		Pemanfaatan buku KIA belum maksimal oleh ibu hamil, kader, dan nakes	Sosialisasi buku KIA
		Kunjungan lansia ke tempat layanan masih kurang, terutama laki - laki.	memberi pelayanan lansia melalui posyandu mobile untuk memperluas jangkauan layanan
		Masyarakat belum sadar dan peduli akan pentingnya cek kesehatan secara berkala dan merasa takut ketahuan penyakitnya	Edukasi, penyuluhan, promosi yang masif terkait pentingnya Gerakan Cek Kesehatan Penyakit Tidak Menular (GERCEP)
		masih ada ODGJ yang dipasung karena belum optimalnya tim TPKJM (tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat) tingkat kabupaten dan kecamatan	Melakukan advokasi pada pemerintah desa, kecamatan, dan pemangku kepentingan lain untuk mengaktifkan TPKJM
		Penderita Hipertensi tidak rutin kontrol ke faskes dan tidak minum obat rutin setiap bulan, karena merasa tidak ada keluhan. Padahal penderita hipertensi harus minum obat rutin setiap hari agar terkendali dan mencegah terjadinya komplikasi serta kematian	pada tahun 2023 sudah dilakukan kegiatan MRINGIS (Marani penderita hipertensi dan kencing manis) di seluruh desa di wilayah Kab. Tegal untuk mendekatkan akses penderita hipertensi dan diabetes melitus untuk kontrol dan mendapatkan obat secara gratis. Dan promosi kesehatan terkait PATUH untuk penyandang PTM
10	Anggaran	Anggaran APBD terbatas	Advokasi penggunaan dana desa

NO	TAHAPAN PENERAPAN SPM	PERMASALAHAN
1.	PENGUMPULAN DATA	Data pasien yang berkunjung di TPMD dan klinik belum dilaporkan ke Dinas Kesehatan
		Jumlah ibu hamil real di akhir tahun jauh di bawah estimasi sasaran di awal tahun
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	kebutuhan anggaran obat, vaksin tidak bisa rinci per satuan orang
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Pengurangan anggaran pada anggaran perubahan
4.	PELAKSANAAN	Belum optimalnya dukungan multisektor dalam penanganan penyakit 2 3. 4.
		Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dalam deteksi dan pengobatan penyakit
		Belum optimalnya dukungan sumber daya (anggaran, SDM terlatih)
		Perubahan juknis membutuhkan sarana dan peningkatan kapasitas SDM
		Masih ada ODGJ yang dipasung karena belum optimalnya tim TPKJM (tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat) tingkat kabupaten dan kecamatan
		Masih ada ODGJ yang belum memiliki NIK
		Masih ada persalinan oleh non tenaga kesehatan (13 kasus dari 18.587 persalinan) karena kepercayaan terhadap dukun yang kuat
		Jauhnya jarak akses pelayanan ANC terstandar sesuai SPM. Saat ini baru terdapat di RS dan puskesmas.



4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar pekerjaan umum pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada bidang urusan Pekerjaan Umum adalah setiap warga negara.

4.3.2. Target Capaian SPM

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	12 bulan	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	1.623.595	12 bulan	2.752.476.000
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	12 bulan	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	1.623.595	12 bulan	2.519.075.000



4.3.3. Realisasi SPM

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.623.595	1.319.664	81,28	2.752.476.000	2.329.443.350	84,63
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	1.623.595	1.616.349	99,55	2.519.075.000	2.517.230.000	99,93

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			82.90 %
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					73.15 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	65.02 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1623595	1319664	303931	81.28 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					8.13 %
	JARINGAN PERPIPAAN					
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	40.64 %
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	405899	147357	258542	36.30 %
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	405899	147357	258542	36.30 %



BUKAN JARINGAN PERPIPAAN						
	3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	405899	182559	223340	44.98 %
	4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	405899	182559	223340	44.98 %
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					92.64 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.64 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1623595	1616349	7246	99.55 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					13.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	64.99 %
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	405899	404087	1812	99.55 %
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	405899	7584	398315	1.87 %
	3 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	405899	379671	26228	93.54 %



4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari		2.752.476.000	
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik		2.519.075.000	

4.3.5. Dukungan Personil

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi

NO	TAHAPAN PENERAPAN SPM	PERMASALAHAN
1	PENGUMPULAN DATA	Pemda (Dinas PUPR) tidak memiliki data base / data dasar atas pengelolaan SPM
		Masih terdapat inkonsistensi data dari masing-masing OPD
2	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	Karena kondisi tersebut di atas Dinas PUPR sulit untuk melakukan perhitungan kebutuhan
3	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Keterbatasan Pagu Anggaran OPD membuat Dinas PUPR tidak mampu untuk mengalokasikan anggaran
4	PELAKSANAAN	Keterbatasan anggaran DAU/APBD membuat capaian rendah
5	LAIN - LAIN	SPM tidak menjadi visi misi Kepala Daerah sehingga minim perolehan anggaran



4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar pada SPM bidang urusan Perumahan Rakyat terdiri atas :

1. Penyediaan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkenal relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis dan sekurang-kurangnya memuat :

1. Standar jumlah dan kualitas barang/jasa;
2. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada bidang urusan Perumahan Rakyat adalah setiap warga negara, dengan ketentuan:

1. Korban bencana Kabupaten yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota;
2. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.4.2. Target Capaian SPM

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	12 bulan	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	32	12 bulan	56.726.000
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	12 bulan	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	12	12 bulan	100.000.000



4.4.3. Realisasi SPM

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				95.00 %	
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.00 %	
	Terjadi Bencana					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	32	32	0	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	32	32	0	100.00 %
	2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %
	3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %
	4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					90.00 %
	Ada Relokasi Program Pemerintah					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	12	12	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	10.00 %



			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					50.00 %
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0	0	0	0.00 %
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	0	0	0	0.00 %
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	0	0	0	0.00 %
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	0	0	0	0.00 %
	2 . Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	12	12	0	100.00 %



4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		56.726.000	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota		100.000.000	

4.4.5. Dukungan Personil

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

NO	TAHAPAN PENERAPAN SPM	PERMASALAHAN
1.	PENGUMPULAN DATA	Dengan banyaknya data dan sifat data yang berkelanjutan, maka perlu adanya SDM yang kompeten dan fokus
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	Penerapan belum maksimal karena keterbatasan data dan SDM
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Penganggaran masih terbatas pada salah satu mutu SPM saja
4.	PELAKSANAAN	Keterlambatan pembangunan umumnya dikarenakan masyarakat belum siap swadaya
5.	LAIN-LAIN	Penerapan SPM masih minim anggaran, kemungkinan disebabkan belum adanya kesamaan visi dari OPD pengampu SPM dengan Kepala Daerah.

4.5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum yang berlaku untuk Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten//Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana Kabupaten//Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten//Kota dengan jenis pelayanan dasar terdiri atas:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Mutu Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat:

1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
2. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia
3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara, dengan ketentuan :

1. masyarakat yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
3. masyarakat yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2. Target Capaian SPM

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100%	12 bulan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	386	12 bulan	3.734.156.623
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	12 bulan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	860.940	12 bulan	140.000.000
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	12 bulan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	890	12 bulan	1.406.200.000
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	12 bulan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	20.679	12 bulan	730.000.000



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	12 bulan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	388	12 bulan	1.085.412.000



4.5.3. Realisasi SPM

Realisasi SPM Sub Urusan Trantibum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN					
		PENERIMA LAYANAN DASAR			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	386	386	100	3.734.156.623,00	3.567.570.004,00	95,54
2.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	-	-	-	-	-	-

Realisasi SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN					
		PENERIMA LAYANAN DASAR			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Layanan respons Time penanggulangan kejadian kebakaran	100%	63,29%	63,29%	1.050.412.000	824.103.036	92%
2.	Layanan pemadaman dan pengendalian kebakaran	163 Kegiatan	163 Kegiatan	100%			
3.	Layanan penyelamatan dan evakuasi non kebakaran	113 Kegiatan	113 Kegiatan	100%			
4.	Layanan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	50 Orang	50 Orang	100%	25.000.000	24.376.000	98%
5.	Layanan pendataan, inspeksi, dan investigasi kejadian kebakaran	40 Kegiatan	40 Kegiatan	100%	10.000.000	10.000.000	100%



Realisasi SPM Sub Urusan Bencana

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN					
		PENERIMA LAYANAN DASAR			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	860.940	860.940	100,00	140.000.000	137.867.060	98,48
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	890	890	100,00	1.406.200.000	1.372.030.348	97,57
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20.679	20.679	100,00	730.000.000	668.201.059	91,53

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 2024

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					98.60 %
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					98.60 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	386	386	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	18.60 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					92.99 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan	Unit	252	241	11	95.63 %



	operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)					
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara* (SOP penegakan Perda, Trantibumlinmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	30	30	0	100.00 %
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	7669	4778	2891	62.30 %
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	1875000	0	1875000	100.00 %
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	1875000	0	1875000	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					100.00 %
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	860940	860940	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %



	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	860940	860940	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	280	280	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	6	6	0	100.00 %
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	890	890	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	27	27	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	890	890	0	100.00 %
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	



			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	20679	20679	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1	1	0	100.00 %	
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	20679	20679	0	100.00 %	
	3 . Melakukan respons cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	5	5	0	100.00 %	
	4 . Respons Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respons secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	1	0	1	100.00 %	
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	20679	20679	0	100.00 %	
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					95.19 %	
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					95.19 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	388	388	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	15.19 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		



B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					75.97 %
1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	163	105	58	64.42 %
2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	8	8	0	100.00 %
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	94	84	10	89.36 %
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	49	1	48	2.04 %
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	0	0	0	100.00 %
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	1	1	0	100.00 %



4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	-	3.734.156.623,00	-
2	Pelayanan informasi rawan bencana	-	140.000.000	-
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	250.000.000	1.406.200.000	26.324.250
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	730.000.000	-
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	935.312.000	-

4.5.5 Dukungan Personil

Personil yang tersedia untuk jenis pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan jenis pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum yaitu sebagai berikut:

Sub Urusan Trantibumlinmas

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	2
3	Strata 1 / Diploma 4	27
4	Diploma 3	-
5	Diploma 2	-
6	Diploma 1	-
7	SMA / MA / Sederajat	60
8	SMP / MTs / Sederajat	2
9	SD / MI / Sederajat	-
	TOTAL	91

Sub Urusan Pemadam Kebakaran

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata 3	0
2	Strata 2	0
3	Strata 1 / Diploma 4	4
4	Diploma 3	0
5	Diploma 2	0
6	Diploma 1	0
7	SMA / MA / Sederajat	43
8	SMP / MTs / Sederajat	0
9	SD / MI / Sederajat	0
	TOTAL	47



Sub Urusan Bencana

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata 3	0
2	Strata 2	7
3	Strata 1 / Diploma 4	16
4	Diploma 3	2
5	Diploma 2	0
6	Diploma 1	0
7	SMA / MA / Sederajat	6
8	SMP / MTs / Sederajat	2
9	SD / MI / Sederajat	0
	TOTAL	33

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Sub Urusan Trantibumlinmas

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
I. INTERNAL			
1		Keterbatasan Sumber Daya (SDM)	Pemenuhan sumber daya manusia penunjang kegiatan
2		Keterbatasan Anggaran	Pemenuhan Anggaran di Satpol PP
3		Kesadaran pentingnya SPM Trantibum masih rendah	
II. EKSTERNAL			
1		Perubahan lingkungan Strategis	
2		Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Trantibum semakin meningkat	
3		Keterbatasan Regulasi	

Sub Urusan Pemadam Kebakaran

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
I. INTERNAL			
1		Kurangnya sarana dan prasarana	Melengkapi kebutuhan akan Sarpras Damkar
2		Minimnya jumlah personel Damkar	Membuka perekrutan anggota Damkar
3		Belum terlatihnya / tersertifikasinya personel	Memfasilitasi pelatihan bagi anggota Damkar
II. EKSTERNAL			
1		Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat

Sub Urusan Bencana

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
I. INTERNAL			
1		Minimnya tenaga dan sarana prasarana di BPBD mengakibatkan pelaksanaan pelayanan kurang maksimal	Memanfaatkan tenaga dan sarana prasarana yang ada secara optimal
2		Belum adanya sensus atau pendataan ke lapangan secara menyeluruh dan serentak yang memerlukan tenaga dan biaya yang	Memperkirakan jumlah korban bencana baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung



		besar	
3		BPBD belum mendapatkan akses data kependudukan untuk memperoleh data warga negara yang dilayani secara by name by address termasuk NIK, nomor KK dan informasi kependudukan lainnya	Berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil terkait jumlah penduduk di kawasan rawan bencana dengan menampilkan data kumulatif
II.	EKSTERNAL		
1		Kepedulian Pemerintah terhadap sub Urusan Bencana masih minim sehingga BPBD mendapatkan alokasi anggaran yang cukup kecil, padahal sub Urusan Bencana merupakan urusan wajib pelayanan dasar dan juga merupakan unsur dalam SPM yang harus diutamakan oleh Pemerintah	Membuat perencanaan anggaran dengan mengalokasikan kegiatan berdasarkan prioritas dalam mendukung capaian penerapan SPM

NO	TAHAPAN PENERAPAN SPM	PERMASALAHAN
1.	PENGUMPULAN DATA	Belum adanya sensus atau pendataan ke lapangan secara menyeluruh dan serentak terkait data kebencanaan yang memerlukan tenaga dan biaya yang besar
		BPBD belum mendapatkan akses data kependudukan untuk memperoleh data warga negara yang dilayani secara by name by address termasuk NIK, nomor KK dan informasi kependudukan lainnya
		Tugas sebagai Pengolah Data masing - masing Bidang di Satpol PP kurang bekerja
		Pemahaman tentang SPM masih kurang bagi Pelaksana SPM
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	Keterbatasan SDM Kebencanaan yang tersertifikasi
		Keterbatasan peralatan kebencanaan, bahkan sudah banyak yang kurang layak
		Keterbatasan SDM yang berstatus PNS dan masih banyaknya tenaga Non ASN sehingga menjadi kendala peningkatan SDM dan karier di Satpol PP
		Keterbatasan sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran
		Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemadam Kebakaran
		Keterbatasan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Kepedulian Pemerintah terhadap sub Urusan Bencana masih minim sehingga BPBD mendapatkan alokasi anggaran yang cukup kecil, padahal sub Urusan Bencana merupakan urusan wajib pelayanan dasar dan juga merupakan unsur dalam SPM yang harus diutamakan oleh Pemerintah
		Terbatasnya anggaran untuk Sub Urusan Kebakaran, padahal merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang harus diutamakan pemerintah
		Keterbatasan anggaran yang ada, sehingga penganggaran belum seluruhnya berorientasi pada SPM
4.	PELAKSANAAN	Minimnya tenaga dan sarana prasarana di Damkar Kabupaten Tegal
		Minimnya tenaga dan sarana prasarana di BPBD mengakibatkan pelaksanaan pelayanan kurang maksimal
		Minimnya sarana prasarana kendaraan operasional patroli dan pengawalan Satpol PP



4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat:

1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan:

1. penyandang disabilitas terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. anak terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. lanjut usia terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. korban bencana Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

4.6.2. Target Capaian SPM

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	12 bulan	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	2.710	12 bulan	3.153.476.000
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%	12 bulan	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	2.221	12 bulan	3.153.476.000
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	12 bulan	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1.270	12 bulan	3.153.476.000
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	12 bulan	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	2.042	12 bulan	3.153.476.000
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	12 bulan	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	1.672	12 bulan	86.725.000



4.6.3. Realisasi SPM

Realisasi SPM Bidang Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	724	724	100	3.122.976.000	2.958.707.100	94,74
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Lansia Terlantar di Luar Panti	1850	1850	100	2.009.072.000	2.958.707.100	147,27
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	235	235	100	2.227.486.000	2.958.707.100	132,83
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna sosial khususnya Pengemis dan Gelandangan di Luar Panti	55	55	100	2.009.072.000	2.958.707.100	147,27
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca Bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	1671	1671	100	86.725.000	83.585.500	96,38

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Sosial

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2710	2710	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1986	1986	0	100.00 %



2 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	179	179	0	100.00 %
3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	18	18	0	100.00 %
4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	40	40	0	100.00 %
5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kacamata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	269	269	0	100.00 %
6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	14	14	0	100.00 %
7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	13	13	0	100.00 %
8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	13	13	0	100.00 %
9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	13	13	0	100.00 %
10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	111	111	0	100.00 %
11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	23	23	0	100.00 %
12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	23	23	0	100.00 %



	(pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)					
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	49	49	0	100.00 %
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2221	2221	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1986	1986	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	18	18	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	186	186	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	25	25	0	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	4	4	0	100.00 %



	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	9	9	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1	1	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	7	7	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	4	4	0	100.00 %
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1270	1270	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /	Jumlah Mutu Yang Terlayani /	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %



			Dipenuhi	Terpenuhi	/ Terpenuhi	
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1986	1986	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	18	18	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	1807	1807	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	25	25	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	4	4	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	1	1	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	1	1	0	100.00 %



	(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)					
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1	1	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1	1	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	14	14	0	100.00 %
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2042	2042	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1987	1987	0	100.00 %



2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	1	1	0	100.00 %
3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	30	30	0	100.00 %
4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1	1	0	100.00 %
5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100.00 %
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	1	1	0	100.00 %
7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	1	1	0	100.00 %
8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00 %
9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1	1	0	100.00 %
10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %
11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	25	25	0	100.00 %



	(pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)					
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1	1	0	100.00 %
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1672	1672	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	1327	1327	0	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	129	129	0	100.00 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	1	1	0	100.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	185	185	0	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	30	30	0	100.00 %



4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota		86.725.000	
2	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial		312.2976.000	
3	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial		2.227.486.000	
4	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial		2.009.072.000	
5	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial		2.009.072.000	

4.6.5. Dukungan Personil

Jumlah personil yang ada untuk mendukung penerapan SPM Sosial adalah sebagai berikut :

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	4
3	Strata 1 / Diploma 4	17
4	Diploma 3	-
5	Diploma 2	-
6	Diploma 1	-
7	SMA / MA / Sederajat	6
8	SMP / MTs / Sederajat	-
9	SD / MI / Sederajat	1
	TOTAL	28



4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
I.	INTERNAL	Banyaknya Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Anak Terlantar ,PGOT maupun korban Bencana yang tidak memiliki Kartu Identitas sehingga menghambat pemberian layanan sosial	Adanya Anggaran untuk Pendamping Sosial untuk melakukan penelusuran Keluarga maupun Fasilitasi pembuatan NIK Kependudukan
		Minimnya Anggaran SPM sehingga masih banyak PMKS Terlantar yang belum mendapatkan layanan sosial sesuai dengan kebutuhannya	Dengan melibatkan Pemerintah Daerah maupun CSR untuk membantu memberikan layanan dasar sosial maupun bantuan mobilitas
II.	EKSTERNAL	Belum adanya komitmen dari Pemerintah Daerah untuk Penanganan SPM Sosial (Layanan Dasar) sehingga masih banyak permasalahan sosial terutama PGOT	
		Keterbatasan Kuota Layanan Panti Rehabilitasi Sosial sehingga PMKS harus mengantri di Rumah Singgah	Ada penambahan anggaran untuk Permakanan SOSH (satu Orang Satu Hari) bagi PMKS yang tinggal sementara di Rumah Singgah

NO	TAHAPAN PENERAPAN SPM	PERMASALAHAN
1.	PENGUMPULAN DATA	Banyaknya PMKS penerima manfaat yang tidak memiliki Kartu Identitas Kependudukan (NIK) baik disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar maupun PGOT sehingga menghambat pemberian layanan sosial
		Pendataan PMKS masih belum optimal karena keterbatasan Anggaran.
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	Perhitungan Kebutuhan layanan masih belum optimal karena terkendala data yang belum valid
		Perhitungan kebutuhan dihitung berdasarkan ketersediaan Anggaran dan tidak berdasarkan kebutuhan yang ada, , sehingga masih ada PMKS yang belum mendapatkan layanan sosial sesuai kebutuhannya.
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Penganggaran untuk Penerapan SPM terutama layanan Rujukan tidak maksimal padahal masih banyak PPKS yang membutuhkan layanan sosial namun Anggaran telah habis di pertengahan Tahun Anggaran, sehingga tidak bisa melakukan rujukan ke Panti Rehabilitasi Sosial
4.	PELAKSANAAN	Terbatasnya kuota panti Rehabilitasi Kemensos sehingga Pengiriman PPKS harus antre, hal ini berdampak pada penganggaran khususnya untuk PPKS yang menunggu di Rumah Singgah, sedangkan anggaran SOSH sangat minim

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	PENDIDIKAN USIA DINI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	27.756.855.474
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.013.360.500
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	468.944.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	81.123.000
		Pengadaan Mebel PAUD	57.503.000
		Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	0
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	0
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	500.000.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	200.000.000
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	0
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	0
		Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	0
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	700.000.000
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	23.509.554.974
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	63.725.000
		Pemeliharaan Mebel Sekolah	0
		Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	300.000.000
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	724.700.000
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	0
		Penyediaan infrastruktur TIK	0
		Penataan Ruang/Sudut Baca	0
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	137.945.000
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	0
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0
2	PENDIDIKAN DASAR	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	169.035.998.136
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	290.000.000
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	565.281.000
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.704.720.000



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	217.384.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	34.077.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.097.165.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0
		Pengadaan Mebel Sekolah	8.022.167.500
		Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	0
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	5.637.800.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	500.000.000
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	770.000.000
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0
		Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	69.054.000
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	117.729.351.796
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	216.829.500
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	692.226.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	0
		Pemeliharaan Mebel Sekolah	0
		Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	0
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200.000.000
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0
		Penyediaan infrastruktur TIK	0
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	56.116.500
		Penataan Ruang/Sudut Baca	0
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	4.713.782.500
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.532.170.250
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	726.869.000
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	0
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	16.261.004.090
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	98.915.110.878
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	403.514.000
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	109.177.600
		Pembangunan Laboratorium	2.119.575.000
		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	0
		Pembangunan Asrama Sekolah	0
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0
		Pembangunan Fasilitas Parkir	0
		Pembangunan Kantin Sekolah	0



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.345.000.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	14.289.444.576
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	77.399.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	786.426.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.028.328.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	0
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0
		Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	0
		Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	0
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	661.441.280
		Pengadaan Mebel Sekolah	4.730.070.000
		Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	0
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.855.000.000
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.000.000.000
		Perlengkapan Belajar Peserta Didik	0
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	510.795.000
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	700.000.000
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0
		Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	0
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	54.208.300.902
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	281.744.900
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	650.628.000



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	241.082.000
		Pemeliharaan Mebel Sekolah	0
		Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	0
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	909.715.700
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200.000.000
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	43.059.400
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	30.000.000
		Penataan Ruang/Sudut Baca	0
		Penyediaan infrastruktur TIK	0
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	7.257.877.520
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3.500.000.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	0
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	976.532.000
3	PENDIDIKAN KESETARAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.901.166.189
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	750.000.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	2.178.000.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	304.097.500
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	150.000.000
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7.295.185.689
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	51.883.000
		Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0
		Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0
		Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0
		Penyediaan infrastruktur TIK	0
		Penataan Ruang/Sudut Baca	0
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	0
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	0
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	0
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0
		Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	0
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	100.000.000
		Pembangunan Ruang Laboratorium	0
		Pengadaan Mebel Sekolah	72.000.000
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	6.905.000.000
		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	6.775.000.000
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	130.000.000
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas PTK bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	33.600.000.000
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	33.600.000.000
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
		Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
	TOTAL		347.214.130.677



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN		
	KAB. TEGAL					347,214,130,677	337,612,718,761	97.23 %	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					306,609,130,677	298,303,577,648	97.29 %	
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar K20240327110629					169,035,998,136	165,540,989,390	97.93 %
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit		0	0	0%	
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang		290,000,000	181,514,000	62.59 %	
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang		565,281,000	520,688,000	92.11 %	
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang		0	0	0%	
		5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit		5,704,720,000	5,041,258,010	88.37 %	
		6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit		0	0	0%	
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang		217,384,000	195,448,000	89.91 %	
		8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang		34,077,000	34,077,000	100.00 %	
		9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang		1,097,165,000	1,037,671,398	94.58 %	
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit		0	0	0%	
		11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket		8,022,167,500	7,780,873,230	96.99 %	
		12	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket		0	0	0%	
		13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket		0	0	0%	
		14	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit		0	0	0%	



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	5,637,800,000	5,522,878,950	97.96 %
		16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	500,000,000	477,340,000	95.47 %
		17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	770,000,000	534,590,490	69.43 %
		18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	0	0	0%
		19	Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	0	0	0%
		20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	69,054,000	46,630,880	67.53 %
		21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	117,729,351,796	117,518,732,609	99.82 %
		22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	216,829,500	118,782,760	54.78 %
		23	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	692,226,000	659,108,000	95.22 %
		24	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	0	0	0%
		25	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		26	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang	0	0	0%
		27	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		28	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		29	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		30	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	200,000,000	129,032,167	64.52 %
		31	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		32	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
		33	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%	
		34	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	56,116,500	41,419,400	73.81 %	
		35	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%	
		36	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%	
		37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	4,713,782,500	4,628,409,000	98.19 %	
		38	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	5,532,170,250	4,954,731,385	89.56 %	
		39	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	726,869,000	651,589,809	89.64 %	
		40	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%	
		41	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	0	0	0%	
		42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	16,261,004,090	15,466,214,302	95.11 %	
JUMLAH INDIKATOR						169,035,998,136	165,540,989,390	97.93 %
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama K20240327110647				98,915,110,878	94,853,496,925	95.89 %
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%	
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%	
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	403,514,000	394,413,663	97.74 %	
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	109,177,600	109,177,600	100.00 %	
		5	Pembangunan Laboratorium	Ruang	2,119,575,000	1,802,164,474	85.02 %	



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		7	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
		8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		9	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
		10	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
		11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1,345,000,000	1,311,223,975	97.49 %
		12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	14,289,444,576	13,019,427,838	91.11 %
		13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	77,399,000	65,054,426	84.05 %
		14	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	786,426,000	763,267,041	97.06 %
		15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	1,028,328,000	986,329,750	95.92 %
		16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		18	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
		19	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
		20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	661,441,280	634,817,144	95.97 %
		21	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	4,730,070,000	4,426,963,270	93.59 %
		22	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1,855,000,000	1,819,827,800	98.10 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		24	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		25	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	2,000,000,000	1,952,367,100	97.62 %
		26	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	510,795,000	439,650,000	86.07 %
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	700,000,000	446,535,910	63.79 %
		29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
		30	Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
		31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	0	0	0%
		32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	54,208,300,902	54,114,840,421	99.83 %
		33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	281,744,900	229,823,350	81.57 %
		34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang	650,628,000	634,292,664	97.49 %
		35	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	241,082,000	234,325,387	97.20 %
		36	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		37	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
		38	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		39	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		40	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	909,715,700	870,679,350	95.71 %
		41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	200,000,000	121,052,450	60.53 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		42	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	43,059,400	37,748,675	87.67 %
		43	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	30,000,000	25,767,650	85.89 %
		45	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		46	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	0	0	0%
		48	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	7,257,877,520	6,045,230,945	83.29 %
		49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		50	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		51	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	3,500,000,000	3,426,628,200	97.90 %
		52	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
		53	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	976,532,000	941,887,842	96.45 %
	JUMLAH INDIKATOR				98,915,110,878	94,853,496,925	95.89 %
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412			27,756,855,474	27,294,290,944	98.33 %
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	1,013,360,500	813,902,050	80.32 %
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	468,944,000	362,533,500	77.31 %
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	81,123,000	79,751,000	98.31 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	57,503,000	55,597,100	96.69 %
		5	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket	0	0	0%
		6	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	0	0	0%
		7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	500,000,000	437,324,100	87.46 %
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	200,000,000	194,515,000	97.26 %
		9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik	0	0	0%
		10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	0	0	0%
		11	Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	0	0	0%
		12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	700,000,000	690,696,100	98.67 %
		13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	23,509,554,974	23,503,254,974	99.97 %
		14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	63,725,000	58,286,500	91.47 %
		15	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		16	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang	0	0	0%
		17	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		20	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	300,000,000	248,054,370	82.68 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		22	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	724,700,000	724,700,000	100.00 %
		23	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		24	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
		25	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		26	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		27	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	137,945,000	125,676,250	91.11 %
		29	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		30	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		31	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		33	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		34	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		35	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		36	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					27,756,855,474	27,294,290,944	98.33 %
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20240327112444				10,901,166,189	10,614,800,389	97.37 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit	750,000,000	712,277,860	94.97 %
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	2,178,000,000	2,163,336,480	99.33 %
		3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	304,097,500	289,117,300	95.07 %
		4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		5	Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	150,000,000	130,555,910	87.04 %
		7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	7,295,185,689	7,129,985,689	97.74 %
		8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	51,883,000	47,206,250	90.99 %
		9	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0%
		10	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		11	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		12	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		17	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		18	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		19	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		20	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		21	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0%
		22	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		23	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		24	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		25	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
		26	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
		27	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		28	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		30	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		31	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		32	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	100,000,000	74,443,800	74.44 %
		33	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		34	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	72,000,000	67,877,100	94.27 %
		35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		36	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
	JUMLAH INDIKATOR					10,901,166,189	10,614,800,389	97.37 %
	JUMLAH PROGRAM					306,609,130,677	298,303,577,648	97.29 %
KEGIATAN LAINNYA								
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA							
		1.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		6,905,000,000	6,602,768,766	95.62 %	
		2.	Pemerataan Kualitas dan Kuantitas PTK bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF		33,600,000,000	32,645,878,747	97.16 %	
		3.	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		50,000,000	32,321,600	64.64 %	
		4.	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		50,000,000	28,172,000	56.34 %	



Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.859.930.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.196.513.800
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.235.204.170
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	692.800.000
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	796.726.500
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	200.000.000
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	150.000.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	779.820.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.854.757.100
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	50.000.000



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.170.189.400
12	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	97.725.000



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
	KAB. TEGAL				13,083,665,970	12,474,920,600	95.35 %	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				13,083,665,970	12,474,920,600	95.35 %	
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				13,083,665,970	12,474,920,600	95.35 %
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1,859,930,000	1,844,530,200	99.17 %	
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	2,196,513,800	1,959,226,300	89.20 %	
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	1,235,204,170	1,104,360,300	89.41 %	
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	692,800,000	656,927,000	94.82 %	
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	796,726,500	785,830,100	98.63 %	
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	200,000,000	191,442,000	95.72 %	
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	150,000,000	147,151,800	98.10 %	
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	779,820,000	764,718,300	98.06 %	
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	2,854,757,100	2,736,606,500	95.86 %	
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	50,000,000	46,965,700	93.93 %	
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	2,170,189,400	2,142,795,400	98.74 %	
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	97,725,000	94,367,000	96.56 %	
	JUMLAH INDIKATOR				13,083,665,970	12,474,920,600	95.35 %	
	JUMLAH PROGRAM				13,083,665,970	12,474,920,600	95.35 %	



Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. TEGAL				7,927,759,117	7,402,822,488	93.38 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				2,752,476,000	2,329,443,350	84.63 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			2,752,476,000	2,329,443,350	84.63 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	0	0	0%
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
		20	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		21	Perbaiki SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
		23	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	0	0	0%
		24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0	0	0%
		25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	0	0	0%
		26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
		27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0%
		28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
		29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	0	0	0%
		30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
		31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
		32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	2,752,476,000	2,329,443,350	84.63 %
		33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					2,752,476,000	2,329,443,350	84.63 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
	JUMLAH PROGRAM					2,752,476,000	2,329,443,350	84.63 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				5,175,283,117	5,073,379,138	98.03 %	
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota			5,175,283,117	5,073,379,138	98.03 %	
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%	
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%	
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%	
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%	
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0%	
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang		0	0%	
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0%	
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%	
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%	
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	0	0	0%	
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%	
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%	
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	0	0	0%	



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%
		18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	0	0	0%
		19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	225,000,000	222,500,000	98.89 %
		20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
		21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%
		22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%
		23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
		24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	100,000,000	98,530,161	98.53 %
		25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
		26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
		27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
		28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
		29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0%
		30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
		31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
		32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
		33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	50,000,000	0	0%	
		34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0%	
		35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	0	0	0%	
		36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%	
		37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0%	
		38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	0	0	0%	
		39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	4,625,283,117	4,622,282,117	99.94 %	
		40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	100,000,000	80,284,900	80.28 %	
		41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	75,000,000	49,781,960	66.38 %	
	JUMLAH INDIKATOR					5,175,283,117	5,073,379,138	98.03 %
	JUMLAH PROGRAM					5,175,283,117	5,073,379,138	98.03 %



Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. TEGAL				156,726,000	153,621,000	98.02 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				156,726,000	153,621,000	98.02 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			56,726,000	53,621,000	94.53 %
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	6,000,000	6,000,000	100.00 %
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	5,000,000	5,000,000	100.00 %
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	6,000,000	6,000,000	100.00 %
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	5,000,000	5,000,000	100.00 %
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	6,000,000	6,000,000	100.00 %
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	5,000,000	1,895,000	37.90 %
		7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	5,000,000	5,000,000	100.00 %
		8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	6,000,000	6,000,000	100.00 %
		9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	6,000,000	6,000,000	100.00 %
		10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	6,726,000	6,726,000	100.00 %
	JUMLAH INDIKATOR				56,726,000	53,621,000	94.53 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348			100,000,000	100,000,000	100.00 %
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	100,000,000	100,000,000	100.00 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
		2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%	
		4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%	
		5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%	
		6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%	
		7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%	
		8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%	
		9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%	
		10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%	
		11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%	
		12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR					100,000,000	100,000,000	100.00 %
	JUMLAH PROGRAM					156,726,000	153,621,000	98.02 %



Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum / Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	577.000.000
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum / Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.070.000.000
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum / Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	92.000.000
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum / Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota / Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	210.000.000
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum / Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota / Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	75.000.000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.276.200.000
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	140.000.000
		1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	140.000.000
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.111.200.000
		1. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000
		2. Penyusunan Rencana Kontijensi	75.000.000
		3. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	82.945.000



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	100.000.000
		5. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	230.000.000
		6. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	573.255.000
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	295.000.000
		1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	45.000.000
		2. Koordinasi Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	250.000.000
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	730.000.000
		1. Respons Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000
		2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000
		3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	570.000.000
		4. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	50.000.000
5.	Layanan respons Time penanggulangan kejadian kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.050.412.000
6.	Layanan pemadaman dan pengendalian kebakaran		
7.	Layanan penyelamatan dan evakuasi non kebakaran		
8.	Layanan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	25.000.000
9.	Layanan pendataan, inspeksi, dan investigasi kejadian kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	10.000.000



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. TEGAL				6,945,668,623	6,619,727,507	95.31 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				3,734,156,623	3,567,570,004	95.54 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444			2,739,000,000	2,601,982,902	95.00 %
		1	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	577,000,000	544,260,757	94.33 %
		2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	2,070,000,000	1,967,578,686	95.05 %
		3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	0	0	0%
		4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
		5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
		6	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
		7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%
		8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	0	0	0%
		9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0%
		10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	0	0	0%
		11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	0	0	0%
		12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	0	0	0%
		13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli,	Kasus	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
			pengamanan, dan pengawalan					
		14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	0	0	0%	
		15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	92,000,000	90,143,459	97.98 %	
		16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0%	
		17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Laporan	0	0	0%	
		18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Unit	0	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR					2,739,000,000	2,601,982,902	95.00 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455				995,156,623	965,587,102	97.03 %
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	210,000,000	200,892,250	95.66 %	
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	710,156,623	694,211,867	97.75 %	
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	75,000,000	70,482,985	93.98 %	
		4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%	
		5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	0	0	0%	
		6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0	0	0%	
		7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%	



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
		8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%	
		9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%	
		10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%	
		11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	0	0	0%	
		12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR					995,156,623	965,587,102	97.03 %
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457				0	0	0.00 %
		1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0%	
		2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%	
		3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%	
		4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0%	
		5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	0	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR					0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM					3,734,156,623	3,567,570,004	95.54 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				2,276,200,000	2,178,098,467	95.69 %	
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456				140,000,000	137,867,060	98.48 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	140,000,000	137,867,060	98.48 %	
	JUMLAH INDIKATOR					140,000,000	137,867,060	98.48 %
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443				1,111,200,000	1,096,548,087	98.68 %
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%	
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%	
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	0	0	0%	
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	0%	
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	0	0	0%	
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	50,000,000	49,627,434	99.25 %	
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	75,000,000	73,221,057	97.63 %	
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	82,945,000	80,494,900	97.05 %	
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%	
		12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0%	
		13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0%	
		14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
		15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	100,000,000	99,108,000	99.11 %	
		16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	230,000,000	225,479,859	98.03 %	
		17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	573,255,000	568,616,837	99.19 %	
	JUMLAH INDIKATOR					1,111,200,000	1,096,548,087	98.68 %
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445				730,000,000	668,201,059	91.53 %
		1	Respons cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%	
		2	Respons cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	40,000,000	31,494,400	78.74 %	
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	70,000,000	68,281,900	97.55 %	
		4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%	
		6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	570,000,000	521,235,250	91.44 %	
		7	Respons cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%	
		8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	50,000,000	47,189,509	94.38 %	
	JUMLAH INDIKATOR					730,000,000	668,201,059	91.53 %
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446				295,000,000	275,482,261	93.38 %
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%	
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	45,000,000	44,471,152	98.82 %	
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%	
		8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%	
		9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		10	Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	250,000,000	231,011,109	92.40 %	
		11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0%	
		12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0%	
		13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	0	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR					295,000,000	275,482,261	93.38 %
	JUMLAH PROGRAM					2,276,200,000	2,178,098,467	95.69 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				935,312,000	874,059,036	93.45 %	
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449			900,312,000	839,683,036	93.27 %	
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	900,312,000	839,683,036	93.27 %	
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	0	0	0%	
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%	
		6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	0	0	0%	
		7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%	
		8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%	
		9	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	Laporan	0	0	0%	
		10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%	
		11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	Dokumen	0	0	0%	
		12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	0%	
		13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0	0	0%	
		14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%	
		15	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0	0	0%	
		16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR					900,312,000	839,683,036	93.27 %
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450			0	0	0.00 %	
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%	
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR					0	0	0.00 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451				10,000,000	10,000,000	100.00 %
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	10,000,000	10,000,000	100.00 %	
	JUMLAH INDIKATOR					10,000,000	10,000,000	100.00 %
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459				25,000,000	24,376,000	97.50 %
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	25,000,000	24,376,000	97.50 %	
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	0	0	0%	
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR					25,000,000	24,376,000	97.50 %
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458				0	0	0.00 %
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%	
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%	
		3	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%	
		4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR					0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM					935,312,000	874,059,036	93.45 %



Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.122.976.000
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.904.562.000
		Penyediaan Permakanan	1.959.499.000
		Penyediaan Sandang	19.209.000
		Penyediaan Alat Bantu	895.490.000
		Pemberian Layanan Rujukan	30.364.000
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	218.414.000
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	24.000.000
		Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	194.414.000
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lansia Terlantar di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.009.072.000
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.009.072.000
		Penyediaan Permakanan	1.959.499.000
		Penyediaan Sandang	19.209.000
		Pemberian Layanan Rujukan	30.364.000
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.227.486.000



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.009.072.000
		Penyediaan Permakanan	1.959.499.000
		Penyediaan Sandang	19.209.000
		Pemberian Layanan Rujukan	30.364.000
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	218.414.000
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	24.000.000
		Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	194.414.000
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna sosial khususnya Pengemis dan Gelandangan di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.009.072.000
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.009.072.000
		Penyediaan Permakanan	1.959.499.000
		Penyediaan Sandang	19.209.000
		Pemberian Layanan Rujukan	30.364.000
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca Bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	86.725.000
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	86725000
		Penyediaan Makanan	77825000
		Pelayanan Dukungan Psikososial	8900000



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	67.412.500
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	44.125.000
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	23.287.500



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. TEGAL				3,240,201,000	2,958,707,100	91.31 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				3,240,201,000	2,958,707,100	91.31 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			3,153,476,000	2,875,121,600	91.17 %
		1	Penyediaan permakanan	Orang	1,959,499,000	1,911,558,500	97.55 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	19,209,000	18,889,000	98.33 %
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	895,490,000	705,133,700	78.74 %
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	24,000,000	23,738,600	98.91 %
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	224,914,000	185,657,900	82.55 %
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	30,364,000	30,143,900	99.28 %
	JUMLAH INDIKATOR				3,153,476,000	2,875,121,600	91.17 %



	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			86,725,000	83,585,500	96.38 %
		1	Penyediaan makanan	Orang	77,825,000	74,728,200	96.02 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	8,900,000	8,857,300	99.52 %
	JUMLAH INDIKATOR				86,725,000	83,585,500	96.38 %
	JUMLAH PROGRAM				3,240,201,000	2,958,707,100	91.31 %



BAB V

P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tegal sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan tugas pemerintahan.

Secara substantif penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tegal dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang merupakan tujuan penerapan otonomi daerah. Sedangkan secara normatif, penyelenggaraan pemerintahan adalah dalam kerangka pelaksanaan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akuntabel dan transparan menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah senantiasa membuka diri terhadap perkembangan maupun perubahan yang terjadi demi peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Hasil-hasil yang sudah dapat kita rasakan selama ini, merupakan *output* dari pada proses pembangunan. Semua hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, merupakan hasil kerja sama dari semua pihak yang tentunya melibatkan peran aktif masyarakat, sehingga dari kerja sama tersebut merupakan kunci dan modal dasar kesuksesan bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tegal mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas dukungan dari semua Pihak selama ini. Selanjutnya, dalam kerangka mengoptimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal tersebut, kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen dan perangkat penyelenggara pemerintahan serta warga masyarakat Kabupaten Tegal pada proses perumusan dan formulasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mengoptimalkan dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera.

Dengan kerendahan hati kami senantiasa menerima kritik yang membangun, serta masukan yang konstruktif atas ketidak sempurnaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 ini demi peningkatan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal selanjutnya.

Terimakasih.



LAMPIRAN

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 58587. Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 59379	98,6661951	DINAS DIKBUD
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 171702. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 173865	98,7559313	DINAS DIKBUD
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 83184. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 87722	94,8268393	DINAS DIKBUD
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 6925. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 7412	93,4295737	DINAS DIKBUD
2.	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 1511. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 1745278	0,8657647	DINAS KESEHATAN
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 11. Jumlah RS di kabupaten/kota = 11	100	DINAS KESEHATAN

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 20510. Jumlah sasaran ibu bersalin di kabupaten/kota = 20253	101,2689478	DINAS KESEHATAN
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 20235. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 20253	99,9111243	DINAS KESEHATAN
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 20130. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 20130	100	DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 110934. Jumlah balita di kabupaten/kota = 110934	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 231175. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 231175	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 674555. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 674555	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 147656. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 148567	99,3868086	DINAS KESEHATAN

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 163472. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 163472	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 28455. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 28455	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 3255. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 3255	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 33598. Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 33598	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 34105. Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 34105	100	DINAS KESEHATAN
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 0. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 1	0	DINAS PUPR

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 0. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 1	0	DINAS PUPR
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 2783. luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 9281	29,9859929	DINAS PUPR
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 252962. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 406316	62,2574548	DINAS PUPR
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 26049. Jumlah rumah di Kabupaten A = 406316	6,41102	DINAS PUPR

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 313. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 313	100	DINAS PUPR
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 741.47. Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 847.27	87,5128353	DINAS PUPR
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 146. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 745	19,5973154	DINAS PUPR
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 637. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 637	100	DINAS PUPR
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 16. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 16	100	DINAS PERKIM
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan	100	DINAS PERKIM

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Rumah Layak Huni = 12. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 12		
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 33.25. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 58.16	57,1698762	DINAS PERKIM
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 32081. Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 413598	7,7565656	DINAS PERKIM
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 10238. Jumlah unit rumah kab/kota = 10238	100	DINAS PERKIM
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 111. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 111	100	SATPOL PP
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 11. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 21	52,3809524	SATPOL PP
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 860940. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 860940	100	SATPOL PP

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 890. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 890	100	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 20679. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 20679	100	BPBD
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat = 107. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 163	65,6441718	SATPOL PP
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	16,07	SATPOL PP
6.	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 2864. Populasi penyandang disabilitas terlantar,	31,9785619	DINAS SOSIAL

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
			anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 8956		
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 1327. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 1327	100	DINAS SOSIAL
7.	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 3. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 3	100	DINAS PERINTRANSNAKER
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 0. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 43255	0	DINAS PERINTRANSNAKER
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 29444.38. Jumlah tenaga kerja = 43255	68,0716218	DINAS PERINTRANSNAKER
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 209. Jumlah Perusahaan = 2558	8,1704457	DINAS PERINTRANSNAKER

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 17747. Jumlah pencaker yang terdaftar = 18558	95,629917	DINAS PERINTRANSAKER
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 120076834164. Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 2592669072513	4,6313984	DINAS P3AP2KB
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 40. Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 40	100	DINAS P3AP2KB
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 22. Jumlah penduduk perempuan = 622334	3,5350792	DINAS P3AP2KB
9.	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota = 21.55. Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan = 31.26	68,9379399	DINAS KPTAN
10.	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 5840906. seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 5840906	100	DINAS PERKIM

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 0. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 0	0	DINAS PERKIM
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 5809363. Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 5809363	100	DINAS PERKIM
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = 0. Jumlah penerima tanah obyek landreform = 0	0	DINAS PERKIM
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = 0. Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 0	0	DINAS PERKIM
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 0. Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 0	0	DINAS PERKIM
11.	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota		61,94	DINAS LH
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 121457. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 241610	50,2698564	DINAS LH

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 8. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 28	28,5714286	DINAS LH
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 1270298. Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 1274849	99,6430165	DINAS DUKCAPIL
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 163241. Jumlah anak usia 0-17 tahun = 470426	34,7006756	DINAS DUKCAPIL
		Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 471978. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 486810	96,9532261	DINAS DUKCAPIL
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 10. Jumlah PD = 17	58,8235294	DINAS DUKCAPIL
13.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 7. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 12	58,3333333	DINAS PERMASDES
		Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun	3,1847134	DINAS PERMASDES

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
			berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 5. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 157		
14.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)		1,8368	DINAS PERMASDES
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 162035. Jumlah Pasangan Usia Subur = 250200	64,7621902	DINAS P3AP2KB
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 19447. Jumlah Pasangan Usia Subur = 250200	7,7725819	DINAS P3AP2KB
15.	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota		0,79	DINAS PERHUBUNGAN
		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		0,372	DINAS PERHUBUNGAN
16.	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 31. Jumlah PD = 48	64,5833333	DINAS KOMINFO
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 246. Jumlah Layanan Publik = 372	66,1290323	DINAS KOMINFO
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	79,3855558	DINAS KOMINFO

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
		daerah kabupaten/kota	kabupaten/kota = 896124. Jumlah penduduk = 1128825		
17.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 56. Jumlah seluruh koperasi aktif = 303	18,4818482	DINAS KOP,UKM, PERDAGANGAN
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 247. Jumlah usaha mikro keseluruhan = 21823	1,1318334	DINAS KOP,UKM, PERDAGANGAN
18.	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = 750978645936. Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 2039567349238	36,8204877	DINAS PMPTSP
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota = 748. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 396164	0,1888107	DINAS PORAPAR
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = 218. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 396164	0,0550277	DINAS PORAPAR
		Peningkatan prestasi olahraga		8	DINAS PORAPAR
20	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 24. jumlah PD =	50	DINAS KOMINFO

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
		daerah	48		
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 24. jumlah PD = 48	50	DINAS KOMINFO
21.	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 440. Jumlah area penilaian = 645	68,2170543	DINAS KOMINFO
22.	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 82. Jumlah cagar budaya yang terdata = 33	248,4848485	DINAS DIKBUD
23.	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		70	DINAS PERPUSIP
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		48,08	DINAS PERPUSIP
24.	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)		76,25	DINAS PERPUSIP
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		50	DINAS PERPUSIP
25.	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota = 5068.848. Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	104,0877805	DINAS PERIKANAN

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
			= 4869.782		
26.	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 15. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 4	375	DINAS PORAPAR
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 127733. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 980315	13,0297914	DINAS PORAPAR
		Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = 25687. Jumlah kamar yang tersedia = 124830	20,5775855	DINAS PORAPAR
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 2035941.39. Total PDRB Berlaku = 44440285.79	4,5812968	DINAS PORAPAR
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = 29487016824. Total realisasi PAD = 600647900955.47	4,9092017	DINAS PORAPAR
27.	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 36868. luas panen = 59743	61,7109954	DINAS KPTAN
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = -1085. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 1133	-95,7634598	DINAS KPTAN
28.	Kehutanan	Bukan kewenangan kabupaten/kota		100	DINAS LH
29.	Energi dan Sumber Daya	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 0. Jumlah	0	DINAS PERINTRANSNAKER

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
	Mineral		perusahaan pemanfaatan panas bumi = 0		
30.	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 3179. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 3179	100	DINAS KOP,UKM, PERDAGANGAN
		Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi = 33466.92. RDKK = 38762.666	86,3380243	DINAS KOP,UKM, PERDAGANGAN
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 12241. jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 16334	74,9418391	DINAS KOP,UKM, PERDAGANGAN
31.	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 53. Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 30234	0,1752993	DINAS PERINTRANSNAKER
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		77,55	DINAS PERINTRANSNAKER
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 15. Jumlah izin yang dikeluarkan = 15	100	DINAS PERINTRANSNAKER
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0	DINAS PERINTRANSNAKER

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0	DINAS PERINTRANSNAKER
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		49	DINAS PERINTRANSNAKER
32.	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota		100	DINAS PERINTRANSNAKER
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
33.	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 525850936267. Jumlah APBD = 3091455662213.8	17,0098165	BPKAD
		Rasio PAD	Jumlah PAD = 601769824459. Jumlah Pendapatan pada APBD = 2992634879765	20,108361	BPKAD
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3	BPKAD
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3	BPKAD
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 2068703526495. jumlah belanja APBD = 3091455662214	66,9168105	BPKAD
		Opini Laporan Keuangan		8	BPKAD

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
34.	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0. jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 0	0	SETDA
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 353952767306.31. Jumlah seluruh pengadaan = 891752043231	39,691837	SETDA
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 606575989818.54. total belanja operasi dan modal = 1483414245199	40,8905329	SETDA
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 406871099264. Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 438465325594.58	92,7943615	SETDA
35.	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 1778. Jumlah seluruh pegawai = 2650	67,0943396	BKPSDM
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 486.	21,7839534	BKPSDM

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
			seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 2231		
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 102. seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 486	20,9876543	BKPSDM
36.	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam	Realisasi Belanja = 3091455662214. Total Belanja APBD = 3131815965300	1,2887189	BPKAD
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam	Total PAD dalam realisasi = 601769824459. Total PAD dalam APBD = 560380435000	7,3859448	BPKAD
		Manajemen Aset		4	BPKAD
		Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA = 167720240150. total belanja anggaran tahun sebelumnya = 2845915030703	5,8933678	BPKAD
37.	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 1847119437994. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 1936284521128	95,3950423	BPKAD